



LAPORAN PENELITIAN AKATIGA

INDEKS KEMANDIRIAN DESA

Oleh:

PATTIRO, YAPPIKA, AKATIGA, INISIATIF, ICW, P3M, LAKPESDAM
PRAKARSA, FITRA, FORMASI

2015

LAPORAN PENELITIAN

INDEKS KEMANDIRIAN DESA

Oleh:

**PATTIRO, YAPPIKA, AKATIGA, INISIATIF, ICW, P3M, LAKPESDAM,
PRAKARSA, FITRA, FORMASI**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Desa disahkan oleh DPR di penghujung Tahun 2013. Hal ini menjadi dasar bagi Presiden Jokowi untuk memasukan isu desa dalam kampanye politiknya pada tahun 2014. Salah satu janji politik tersebut adalah membangun kemandirian desa. Hal tersebut telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan target paling sedikit 2.000 desa mandiri.

Desa telah menjadi *battle field* berbagai program pembangunan masyarakat. Sejak reformasi berbagai program pengembangan masyarakat juga masuk ke wilayah pedesaan, namun kebanyakan program tersebut secara tak langsung telah pula mengalienasi peran pemerintahan desa. Tingginya ketidakpercayaan terhadap aparatur desa di era awal reformasi menjadi permakluman atas pemisahan tersebut. Alienasi program terhadap aparatur desa dalam hal tertentu memang akan mengurangi risiko terjadinya *elite captured*. Kendati demikian, kebiasaan ini akhirnya menyebabkan keterlibatan aparatur atau unit kerja Pemerintahan Desa pada program hanya sebagai pelengkap. Belasan tahun program-program pengembangan masyarakat di desa telah mensubstitusi pemerintahan desa dalam melakukan fungsi penguatan kelembagaan sosial ekonomi di masyarakat. Hal ini pula yang menyebabkan mengapa lebih satu dekade kapasitas Pemerintahan Desa tak berkembang dan praktis hanya menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan di atasnya (Sutoro Eko: 2014).

Konsepsi terbitnya UU Desa meningkatkan peran Pemerintah Desa. Terbitnya UU Desa dimaksudkan untuk menggeser peran Pemerintahan Desa kepada posisi yang lebih mandiri dalam menjalankan fungsi serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya perlu diberdayakan sehingga dapat menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Kendati fungsi-fungsi utama Pemerintahan Desa belum terurai secara tajam dalam UU Desa. Untuk itu diperlukan upaya menurunkan fungsi Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan normatif yang diatur oleh Undang-Undang Desa. Undang-Undang desa juga merupakan dasar hukum pengakuan keberadaan desa adat, termasuk di dalamnya kedaulatan mereka untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Dengan demikian, upaya melihat kemandirian desa juga harus melihat kemampuan Desa dalam menjalankan fungsi-fungsi *endogenous* mereka berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, termasuk hak-hak ulayat yang ada di dalamnya.

Tujuan dalam UU Desa untuk mendorong kemandirian desa. Kemandirian desa didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Desa didefinisikan tidak hanya desa, tetapi juga desa adat karena mempunyai fungsi yang sama dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan (*local self government*), keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan

pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintahan di atasnya.

Upaya mencapai kemandirian melalui pelibatan berbagai unsur dalam pembangunan desa guna optimalisasi pembangunan di desa. Dalam menjalankan fungsi kewenangan hak asal usul dan berskala lokal, desa perlu mengoptimalkan pelibatan dan peran tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kontributor dalam membangun kemandirian desa, pemberdayaan dilakukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran masyarakat; meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi; dan dapat memanfaatkan sumber daya dalam penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui optimalisasi kelembagaan yang dibentuk di desa. Desa memiliki peran dalam mengelola sumber-sumber potensial yang ada di desa guna memacu proses pembangunan yang diharapkan. Desa dapat membentuk kelembagaan desa, lembaga tersebut adalah *pertama* lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan lain sebagainya. *Kedua*, lembaga adat yang berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan *Ketiga*, pemerintah dapat memberdayakan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang bertindak sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. BUM Desa dapat berfungsi sebagai penghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa dalam bentuk pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Pengukuran Kemandirian Desa oleh Pemerintah. Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah melempar ke ruang publik kriteria teknis yang akan digunakan untuk mengukur kemandirian desa, yaitu kesiapan dalam menghadapi bencana dan indikator desa sehat. Indikator Desa Sehat dilihat dari tingkat kematian ibu dan anak saat kelahiran 0%; rumah tangga memiliki fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) 95%; 97,5% penduduk berusia di atas 10 tahun bebas buta huruf; rata-rata lama sekolah 11 tahun dan minimal 10 tahun bagi perempuan; memenuhi kecukupan gizi; 90% rumah tangga memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan; dan rumah tangga sudah teraliri listrik 95%. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka dapat dilihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa tidak mencukupi untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, peneliti merumuskan alat pengukuran kemandirian desa.

Mengukur kemandirian desa melalui kelembagaan di desa. Kelembagaan dalam masyarakat modern menjadi penting karena interaksi yang dibangun antar masyarakat tidak lepas dari organisasi yang ada dalam masyarakat tersebut dan selalu berkaitan dengan aturan main yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam konteks desa, kelembagaan yang terbentuk adalah kelembagaan pemerintah desa, kelembagaan sosial, dan kelembagaan ekonomi.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian Desa dalam tiga kelembagaan yakni kelembagaan pemerintah desa, kelembagaan sosial, dan kelembagaan ekonomi

1.3 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang akademis dan praktis. Adapun signifikansi dari penelitian ini antara lain:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemberian informasi kepada pembaca mengenai definisi kemandirian desa dan parameter yang merepresentasikan kemandirian desa secara utuh serta kemandirian yang dimiliki oleh sepuluh desa di Kebumen.

2. Signifikansi praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat mengenai pencapaian kemandirian desa sebagai salah satu dampak dalam implementasi UU Desa. Selain itu, pemerintah dapat mengetahui keberagaman tingkat kemandirian desa. Hal tersebut dapat menjadi dasar dalam merancang program intervensi yang tepat untuk masing-masing desa sehingga model program yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemandirian desa.

BAB 2

KERANGKA TEORI

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam pengukuran indeks kemandirian desa.

2.1 Konsep Kemandirian

Dalam dunia sosial, kemandirian telah menginspirasi hadirnya istilah-istilah yang bermaksud menjelaskan lepasnya ketergantungan terhadap pihak lain. Istilah tersebut antara lain swadaya, *self help*, dan otonom. Secara politik, kemandirian diartikan sebagai salah satu ciri dari kedaulatan. C.C. Fonchingong and L.N. Fonjong (2002) meringkas beberapa pendapat ahli tentang definisi tentang kemandirian, Anyanwu (1992) menyatakan bahwa konsep kemandirian berada pada lokus wacana pengembangan komunitas, dan juga terkait dengan konsep-konsep *self-help* (keswadayaan), *mutual-help* (saling menolong) atau partisipasi masyarakat adat, dan pembangunan pedesaan. Selain itu, Galtung (1980) berpendapat bahwa kemandirian sebagai pembangunan yang memanfaatkan kekayaan sumber daya negara atau wilayah itu sendiri dengan melibatkan masyarakat yang memegang kukuh tradisi dan nilai-nilai budaya. Sementara, Preiswerk (1980) menambahkan bahwa kemandirian adalah kondisi yang mana masyarakat dan orang-orang secara individu menentukan pembangunan mereka sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita mereka serta nilai-nilai kehidupan yang diyakininya.

Kemandirian hadir untuk menggunakan berbagai inisiatif lokal dan sumberdaya lokal yang dimilikinya untuk memperbaiki dan memenuhi kebutuhan masyarakat. C.C. Fonchingong and L.N. Fonjong (2002) mempertegas konsep kemandirian komunitas dengan mengutip Anyanwu (1992). Kemandirian dipandang sebagai *Self-help* (Keswadayaan) yang memungkinkan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal, untuk kebaikan komunitasnya sendiri. Kebiasaan bersikap mandiri adalah prasyarat untuk dapat bertahan hidup di dunia modern (Anyanwu, 1992).

Inisiatif kemandirian akan muncul jika desentralisasi kekuasaan dalam suatu negara dan adanya pemberdayaan masyarakat lokal merupakan konsep dasar dari *local self-government*. Selain itu, konsep ini juga menekankan adanya institusi yang demokratis dan penyelerasan antara kepentingan masyarakat lokal dengan kepentingan negara (Redaksi kmu.gov.ua, 2014). Sementara Brezovšek et al memberikan penjelasan terkait *local self-government* merupakan tingkat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga tugas yang diselesaikan oleh pemerintah tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat tersebut. Menurutnya, implementasi dari *local self-government* mengacu pada pembagian kekuasaan antara negara dengan masyarakat lokal (Brezovšek et al., 2008: 120).

Dalam penyelenggaraan *local self-government*, negara mengakui komunitas lokal dalam aturan hukumnya dan memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan isu tertentu yang dapat ditanggapi dan menentukan sumber daya untuk mengatur urusannya.

Lima elemen utama dalam *local self-government* adalah 1) adanya wilayah yang menentukan subjektifitas masyarakat lokal dalam *local self-government*; 2) adanya fungsi yang menekankan kinerja masyarakat (pemerintah) lokal berdasarkan kepentingan masyarakatnya; 3) adanya organisasi yang didasarkan pada akuntabilitas anggota masyarakat yang menjalankan tugasnya di pemerintah lokal; 4) Adanya sumber daya keuangan dan material yang menyatakan bahwa setiap masyarakat lokal mempunyai sumber daya tersebut untuk mendukung kinerjanya; 5) adanya legalitas yaang didasarkan pada premis bahwa setiap pemerintah atau masyarakat lokal dapat menikmati status hukum yang dimilikinya. (Kaučić & Grad dalam Marjan Brezovšek, 2014:7)

Prinsip-prinsip dalam *local self-government* adalah otonomi, subdiaritas, dan regionalisasi (Marjan Brezovšek, 2014: 7). Pertama, prinsip otonomi didasarkan pada independensi unit *local self-government* dari negara. Kedua, prinsip subsidiaritas fokus pada delegasi pengambilan keputusan untuk level yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari keberadaan pemerintah. Ketiga, prinsip regionalisasi didasarkan pada perpindahan kekuasaan politik dan ekonomi dari negara ke *local self-government*.

2.2 Konsep Kelembagaan

Kata “kelembagaan” merupakan padanan dari kata Inggris *institution*, atau lebih tepatnya *social institution*; sedangkan “organisasi” padanan dari *organization* atau *social organization*. Meskipun kedua kata ini sudah umum dikenal masyarakat, namun pengertian dalam sosiologi berbeda. Sebagaimana kata Horton dan Hunt (1984: 211): *What is an institution? The sociological concept is different from the common usage*. Kedua kata tersebut pada mulanya digunakan secara bolak balik, baur dan luas, namun akhirnya lebih menjadi tegas dan sempit. Tujuannya adalah membangun suatu makna yang baku secara keilmuan. Keduanya memiliki hubungan yang kuat, sering sekali muncul secara bersamaan, namun juga sering digunakan secara bolak balik, karena menyangkut objek yang sama atau banyak kesamaannya.

Menurut Uphoff (1986: 8-9), istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat *interchangeably*. Secara keilmuan, *social institution* dan *social organization* berada dalam level yang sama, untuk menyebut apa yang kita kenal dengan kelompok sosial, grup, *social form*, dan lain-lain yang relatif sejenis. Namun, perkembangan akhir-akhir ini, istilah “kelembagaan” lebih sering digunakan untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang lebih memilih istilah tersebut. Kelembagaan lebih dipilih karena kata “organisasi” menunjuk kepada suatu *social form* yang bersifat formal, dan akhir-akhir ini semakin cenderung mendapat *image* negatif. Kata kelembagaan juga lebih disukai karena memberi kesan lebih “sosial” dan lebih menghargai budaya lokal, atau lebih humanistis.

Mempelajari kelembagaan (atau organisasi) merupakan sesuatu yang esensial, karena masyarakat modern beroperasi dalam organisasi-organisasi. Tiap perilaku individu selalu dapat dimaknai sebagai representatif kelompoknya. Seluruh hidup kita dilaksanakan

dalam organisasi, mulai dari lahir, bekerja, sampai meninggal (Etzioni, 1985: 1). Itulah alasannya kenapa kita harus mempelajari kelembagaan, sebagaimana juga disampaikan oleh Mancur Olson (1971, 5) sebagai berikut: “.....*Since most (though by no means all) of the action taken by or on behalf of group of individuals is taken through organization, it will be helpful to consider organization in a general or theoretical way*”.

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat.

Analisis dan pengembangan kelembagaan memerlukan dukungan pendekatan analisis dari bidang tingkah laku organisasi, psikologi, sosiologi, antropologi, hukum dan ekonomi. Perpaduan dari berbagai pendekatan ini bisa menghasilkan analisis kelembagaan yang komprehensif. Sebagian pakar spesialis kelembagaan hanya memusatkan perhatian pada kode etik, aturan main, sedangkan sebagian hanya melihat pada organisasi dengan struktur, fungsi dan manajemennya. Kebanyakan analisis kelembagaan saat ini memadukan organisasi dan aturan main. Analisis mungkin akan menjadi lebih kompleks, tetapi bisa dicari hal-hal pragmatis yang bisa diterjemahkan ke dalam strategi pengembangan. Logika analisis institusi bisa dipakai untuk menjelaskan kegagalan pemerintah dan negara atau kegagalan pasar atau kegagalan berbagai model pembangunan.

Pendekatan pembangunan kelembagaan sebenarnya sudah lama dibicarakan terutama dari sudut pandangan antropologi, sosiologi dan politik. Pendekatan analisis kelembagaan juga dipakai dalam ilmu tentang tingkah laku organisasi. Bersamaan dengan berkembangnya penelitian-penelitian dalam bidang ilmu ini dan adanya temuan dari kegagalan berbagai model pembangunan yang direkomendasikan Bank Dunia sampai dengan akhir tahun 1990-an para donor termasuk Bank Dunia pun melakukan reorientasi kebijakan mereka dalam memberikan dukungan pembangunan baik dalam bentuk pinjaman (*loan*) ataupun bantuan (*grant*).

Dari berbagai definisi yang ada, dapat dirangkum berbagai unsur penting dari kelembagaan, di antaranya adalah: Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat; Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur, Peraturan dan penegakan aturan/hukum, Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota, Kode etik, Kontrak, Pasar, Hak milik (*property rights* atau *tenureship*), Organisasi, dan Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan.

Memperhatikan konsep-konsep tersebut, melihat kemandirian desa dari pendekatan keberfungsian dibagi menjadi dua sudut utama yaitu lembaga sebagai organisasi dan lembaga sebagai aturan main sebagaimana tersebut di atas. Terlepas dari kompleksitas permasalahan yang ada, kelembagaan dan kebijakan yang berkaitan dengan usaha-usaha masyarakat tidak terlepas dari sejarah terbentuknya kelembagaan yang relevan dengan komponen penyusun usaha tersebut, utamanya kelembagaan sosial, ekonomi, dan politik.

2.3 Konsep Kelembagaan Pemerintah Desa

Kelembagaan dalam sektor publik sering disebut dengan istilah birokrasi. Awalnya, kelembagaan dalam suatu organisasi formal disampaikan oleh Max Weber. Weber berpendapat bahwa kelembagaan adalah suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut (Sinambela dalam Rasyid Thaha,48). Selain itu, kelembagaan dalam sektor publik juga dijelaskan oleh Widodo. Menurut Widodo (2001:80), kelembagaan publik dalam era modern harus dapat bekerja secara efisien, efektif, kompetitif, responsif dan adaptif. Kelembagaan publik harus mempunyai struktur dan prosedur yang fleksibel, juga harus mempunyai kemauan dan kemampuan yang diperlukan untuk memperkembangkan diri, menyesuaikan diri dengan situasi dinamis dan ketidakpastian lingkungan. Untuk mencapai etos kerja tersebut, maka diperlukan tata kelola organisasi sektor publik yang akuntabel dari proses perencanaan, pengorganisian, pengarahan, dan pengawasan.

Ditinjau dari tugas pokok atau misi yang mendasari organisasinya, kelembagaan dibedakan dalam tiga jenis yakni kelembagaan pemerintahan umum, kelembagaan pembangunan, dan kelembagaan pelayanan (Syukur Abdullah dalam Alfian, 1991:229). Pertama, kelembagaan pemerintah umum adalah organisasi-organisasi yang menjalankan tugas pemerintahan umum yang lebih bersifat mengatur, termasuk mempertahankan keamanan dan memelihara ketertiban. Kedua, kelembagaan pembangunan adalah organisasi-organisasi yang fungsi utamanya adalah pembangunan dan adaptasi. Organisasi ini menjalankan salah satu bidang atau sektor khusus dalam mencapai tujuan pembangunan. Contohnya adalah pertanian, pendidikan, kesehatan, industri, dan sektor lainnya. Ketiga, kelembagaan pelayanan adalah organisasi-organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Contohnya adalah rumah sakit, sekolah, koperasi, bank rakyat tingkat desa, kantor atau unit pelayanan departemen sosial, transmigrasi dan berbagai unit organisasi lainnya yang bertugas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti mengukur kemandirian kelembagaan pemerintah desa melalui enam sub dimensi yaitu perencanaan, peraturan desa, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pertanggungjawaban. Pertama, sub dimensi perencanaan dilihat dari indikator Kepemilikan RPJM dan RKP Desa serta pihak yang menyusunnya; Penggunaan kajian pendahuluan terhadap kondisi objektif dan dokumen perencanaan dalam proses pembuatan RPJM dan RKP Desa; Keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pembahasan RPJM dan RKP Desa serta bentuk forumnya; Pemenuhan

(pengakomodasian) kebutuhan program masyarakat dalam perencanaan desa; dan Perencanaan Pembangunan Lintas Desa dan Bentuk Keterlibatannya. Kedua, sub dimensi peraturan desa dilihat dari indikator Kepemilikan Peraturan Desa Diluar Peraturan Desa mengatur mengenai RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa dan Pihak yang menyusunnya; Keterlibatan BPD dan Masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan desa; Pemenuhan (Pengakomodasian) Peraturan Desa terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan dasar, infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi; Kepemilikan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Sumber Inisiatifnya; dan Pemenuhan (Pengakomodasian) Kebutuhan Masyarakat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa. Ketiga, sub dimensi penganggaran dilihat dari Kepemilikan APB Desa dan Pihak yang membuatnya; Keterlibatan BPD dan Elemen Masyarakat dalam Pembahasan RAPBD; Pemenuhan (Pengakomodasian) Kebutuhan Masyarakat dalam APB Desa; Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Lintas Desa; dan Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAB Desa. Keempat, subdimensi pelaksanaan dilihat dari peran pemerintah desa dalam bidang pelayanan dasar, sarana dan prasarana dasar, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Hal-hal yang ditilik di masing-masing bidang tersebut antara lain keberfungsian pemerintah desa dalam penyelenggaraan bidang tersebut, pihak yang memprakarsai penyelenggaraan kegiatan di bidang tersebut, pelaksanaan evaluasi, sumber keuangan, transparansi penyelenggaraan pelayanan, dan kemampuan bidang pelayanan tersebut dicontoh dan melayani desa lain. Kelima, sub dimensi pengawasan dan evaluasi dilihat dari kemampuan BPD melakukan evaluasi dan pemantauan serta intensitasnya; pemerintah desa melakukan pemantauan dan evaluasi serta intensitasnya; dan ketersediaan ruang untuk melakukan pengaduan. keenam, sub dimensi pertanggungjawaban dilihat dari kepemilikan laporan pertanggungjawaban dan proses penyampaian; publikasi laporan pertanggungjawaban; dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi laporan pertanggungjawaban.

Melalui dimensi kelembagaan pemerintah desa ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan pemerintah desa dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai lembaga formal yang memiliki kewenangan dalam mengembangkan desa. Bentuk kelembagaan pemerintah desa dikatakan semakin mandiri apabila telah mampu menjalankan fungsinya, sedangkan jika pemerintah desa tidak mampu melaksanakan fungsinya maka semakin tidak mandiri kelembagaan pemerintah desa.

2.4 Konsep Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan atau institusi didefinisikan oleh Ostrom (1992) sebagai peraturan yang digunakan (berlaku) oleh sekelompok individu untuk mengatur kegiatan yang berulang, memberikan dampak atau pengaruh terhadap individu/kelompok, dan secara potensial mempengaruhi yang lainnya. Selanjutnya Ostrom menjelaskan bahwa di dalam peraturan yang berlaku terdapat sejumlah hal yang penting yaitu pengambil keputusan, kegiatan yang boleh dilakukan, prosedur yang berlaku, informasi dapat disediakan, serta biaya yang harus dikeluarkan oleh individu sebagai hasil dari kegiatannya.

Kelembagaan tidak hanya dipahami sebagai kelembagaan yang normatif atau kelembagaan formal. Namun, lebih jauh kelembagaan dipahami sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antar masyarakat atau organisasi yang saling mengikat baik secara formal maupun nonformal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Organisasi menjadi bagian teknis yang penting dalam menjamin beroperasinya suatu bentuk kelembagaan. Selain itu, asosiasi-asosiasi, kelompok-kelompok tani, SPP, BUMDes, koperasi, lembaga perkreditan, dan serikat petani yang merupakan contoh bagian kelembagaan formal. Sementara kelembagaan nonformal dapat ditemukan dalam berbagai macam kelembagaan lokal yang bersifat hubungan antar-pelaku yang bervariasi, misalnya hubungan pemilik-penggarap, sistem ketenagakerjaan setempat, pengaturan pengairan petani sehamparan, sistem bagi-hasil, dan lain lain.

Kelembagaan ekonomi melingkupi aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan dan pengorganisasian yang disepakati bersama untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi warga, baik berbentuk formal maupun nonformal.

Dimensi kelembagaan ekonomi desa ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam upaya memajukan kondisi perekonomian. Bentuk kelembagaan ekonomi tersebut dapat dikatakan semakin mandiri apabila sudah menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat. Namun, semakin tidak berjalan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat itu, berarti semakin tidak mandiri kelembagaan ekonomi tersebut.

Untuk mengukur kemandirian desa dalam kelembagaan ekonomi, peneliti membagi dimensi kelembagaan ekonomi mejadi dua sub dimensi yakni kelembagaan ekonomi desa dan peran pemerintah dalam mendukung kelembagaan ekonomi desa. Sub dimensi kelembagaan ekonomi desa dilihat dari ketersediaan kelembagaan ekonomi, pengelolaan kelembagaan ekonomi, dan peran kelembagaan ekonomi. Sub dimensi peran pemerintah dalam mendukung kelembagaan ekonomi desa dilihat dari peran pemerintah desa, khususnya dalam kepemilikan rencana yang mendorong pembangunan ekonomi, upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan unit-unit usaha di desa, usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam memfasilitasi kelembagaan ekonomi di desa dalam penyelesaian masalah yang dihadapi bersama, dan alokasi anggaran dalam meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan ekonomi desa

2.5 Konsep Kelembagaan Sosial

Konsep mengenai kelembagaan sosial sangat beragam dari berbagai perspektif, seperti yang dirangkum oleh Wulansari¹ sebagai berikut:

¹ Wulansari, Dewi. *Sosiologi Konsep Dan Teori*. Bandung: Refika Aditama, 2013. Hal. 92-93.

1. Suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1964: 113).
2. Kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk dapat melaksanakan fungsi masyarakat (Alvin L. Bertrand, 1980: 120).
3. Suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, lembaga adalah sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia (Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1987: 224-245).
4. Tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan association (Robert Mac Iver dan Charles H. Patge, 1965: 19).
5. Menggunakan istilah “Lembaga Kemasyarakatan” sebagai terjemahan dari “Social Institution” untuk merujuk pada pengertian lembaga sebagai suatu bentuk serta mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari suatu lembaga (Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 1964: 61).

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan lembaga sosial adalah suatu sistem hubungan sosial yang terorganisasi serta memperlihatkan adanya nilai-nilai dan cara-cara berhubungan satu sama lain yang diatur bersama guna memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu masyarakat tertentu². Lembaga sosial seperti yang dimaksudkan tersebut memiliki fungsi, unsur-unsur, ciri-ciri umum, dan tipe-tipe/klasifikasi. Termasuk diantaranya asosiasi warga, perkumpulan berbasis keagamaan, gerakan sosial, kelompok petani atau profesi lainnya dan banyak lagi lainnya.

Dalam perspektif Undang-undang Desa tidak menyebutkan secara khusus ‘kelembagaan sosial’ namun memuat aturan mengenai ‘lembaga kemasyarakatan desa’³. Konsep lembaga kemasyarakatan desa diterjemahkan sebagai wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Tugas lembaga kemasyarakatan desa ini adalah melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. UU Desa mengakui keberadaan kebutuhan tumbuh kembang lembaga kemasyarakatan desa dengan mencantumkan kewajiban untuk memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Selain membincang mengenai nilai-nilai serta bentuk kelembagaan, baik formal ataupun tidak, hal yang sangat penting untuk tidak luput diperhatikan adalah warga desa sebagai aktor-aktor dalam kelembagaan sosial. Tidak saja sebagai warga atau masyarakat sipil yang aktif merespon berbagai persoalan publik di wilayahnya namun juga sebagai ruang tumbuhnya kelembagaan sosial.

² Wulansari, Dewi. *Sosiologi Konsep Dan Teori*. Bandung: Refika Aditama, 2013. Hal. 94

³ Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 94, angka 1-4.

Masyarakat sipil sendiri merupakan salah satu pilah penting dalam proses demokratisasi di Indonesia, yang tidak dapat disangkal turut mendukung pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, mempengaruhi kebijakan publik, memperjuangkan perlindungan HAM, melakukan pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan kelompok rentan lainnya. Konsep masyarakat sipil sebagaimana dekonstruksi oleh CIVICUS adalah arena di luar keluarga, negara dan pasar dimana orang-orang berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan bersama⁴.

Konsep Tocquevillean memandang kelembagaan sosial sebagai sebuah bentuk asosiasi masyarakat sipil dimana dapat tumbuh rasa kepercayaan yang tinggi sehingga masing-masing anggota komunitas mempunyai keterikatan/inherensitas antar anggota yang nantinya berdampak pada partisipasi publik untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Senada dengan konsep Tocquevillean, Putnam melalui teorisasinya mengatakan bahwa modal sosial pada hakikatnya merupakan praktik dari kelembagaan dengan mengembangkan kapasitas untuk kemandirian serta partisipasi masyarakat sebagai warga negara⁵.

Dimensi kelembagaan sosial ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan masyarakat sipil dalam kelembagaan sosial ini dapat memperkuat pilar-pilar modal sosial dalam masyarakat, menumbuhkembangkan budaya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian kelembagaan sosial dipengaruhi oleh kemampuannya untuk membangun keterikatan dan kohesifitas, kemampuan serta efektifitasnya dalam menjalankan perannya. Apabila kelembagaan sosial masih sangat bergantung pada intervensi pihak eksternal untuk mampu menjalankan fungsinya, maka dapat dikatakan kelembagaan sosial belum mandiri (dependen).

Sebagai langkah awal, instrumen ini dapat digunakan untuk menakar masalah yang dihadapi dalam mengembangkan kemandirian wilayah, dalam konteks ini adalah desa, serta alat untuk merefleksikan pertumbuhan kemandirian kelembagaan sosial di desa.

Adapun penjabaran sub dimensi dan indikator Instrumen Kelembagaan Sosial:

1. Warga Aktif

1.1. Warga yang aktif dalam organisasi: memotret partisipasi formal dan informal yang dilakukan individu untuk memajukan kepentingan bersama pada tingkat yang berbeda; serta keterlibatan warga dalam kegiatan sosial dan proses pengambilan keputusan publik.

1.1.1. Keterlibatan sosial warga: untuk mendapatkan informasi mengenai bentuk-bentuk kegiatan sosial yang biasa dilakukan di desa dan aktor yang terlibat di dalamnya.

⁴ CIVICUS Global Survey of the State of Civil Society, 2007. Volume 1. Edited by Heinrich, V. Finn, Kumarian Press Inc. USA. Hal. 4.

⁵ Seperti yang dibahas oleh Jason Kaufman, dalam tulisannya "Three Views of Associationalism in 19th Century America: An Empirical Examination" yang dimuat dalam American Journal of Sociology, Volume 104 Number 5 (March 1999): 1296–1345.

- 1.1.2. Keterlibatan politik warga: untuk mendapatkan informasi mengenai forum/ruang pengambilan keputusan dan kebijakan yang ada di desa, ragam kegiatan politik non partisan serta siapa aktor yang terlibat didalamnya.
 - 1.2. Organisasi warga yang aktif: memotret aktivitas (baik formal atau informal) yang dilakukan oleh lembaga sosial dalam berpartisipasi, pada berbagai tingkat, untuk memajukan kepentingan bersama. Mencakup keterlibatan sosial dan keterlibatan politik.
 - 1.2.1. Keanekaragaman lembaga sosial: untuk mengidentifikasi lembaga sosial yang ada di desa, kelompok yang mendominasi atau berpengaruh serta kelompok yang terpinggirkan.
 - 1.2.2. Keterlibatan sosial lembaga: untuk memotret dinamika keterlibatan lembaga sosial dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan sosial di desa.
 - 1.2.3. Keterlibatan politik lembaga: untuk memotret dinamika keterlibatan lembaga sosial dalam berbagai forum pengambilan keputusan atau kebijakan di desa.
 - 1.2.4. Aksi kolektif lembaga: untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga sosial yang berfungsi sebagai motor penggerak di desa.
2. Tingkat Organisasi: untuk memotret pengembangan organisasi, kompleksitas, dengan melihat relasi antara aktor lembaga sosial.
 - 2.1. Komunikasi sektoral: untuk mengeksplorasi jaringan lembaga sosial yang ada di desa, pertukaran informasi, dan bangunan aliansi dari lembaga sosial untuk menilai sejauh mana keterkaitan dan hubungan kerja sama yang positif antara aktor lembaga sosial.
 - 2.1.1. Komunikasi: untuk mengidentifikasi dinamika komunikasi antara aktor lembaga sosial, menyangkut diantaranya media atau ruang yang digunakan, materi.
 - 2.1.2. Praktek evaluasi internal: untuk memotret mekanisme evaluasi yang dipraktikkan oleh lembaga sosial.
 - 2.1.3. Kerja sama: untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan aktor-aktor lembaga sosial, atau lembaga sosial dengan pihak di luar lembaga sosial.
 - 2.2. Sumber daya: untuk memotret kondisi keberlanjutan dan kecukupan sumber daya (SDM, dana, akses reguler atas teknologi) yang tersedia bagi lembaga sosial untuk mencapai tujuan mereka.
 - 2.2.1. Kecukupan sumber daya: untuk mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki atau tersedia bagi lembaga sosial, dan cara lembaga sosial untuk mengaksesnya.
3. Nilai-nilai: untuk memotret situasi praktik yang dilakukan oleh aktor-aktor lembaga sosial baik di dalam lembaga sosial atau di luar, atas nilai-nilai yang dikembangkan oleh arena kelembagaan sosial. Misalnya nilai transparansi, gotong-royong, anti kekerasan, akuntabilitas, nilai-nilai adat atau kultural yang berkembang di desa.

3.1. Praktik nilai dalam masyarakat

- 3.1.1. Praktik nilai oleh lembaga sosial: untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang dianggap penting oleh lembaga sosial dan memotret bagaimana praktik penerapan nilai-nilai tersebut oleh aktor-aktor lembaga sosial atau dalam lingkup lembaga sosial.
- 3.1.2. Jaringan praktik dan promosi nilai: untuk memotret dinamika kerja sama yang dilakukan antar aktor lembaga sosial atau antar lembaga sosial untuk mempromosikan nilai; serta mengidentifikasi cara atau strategi pelibatan masyarakat dalam kegiatan promosi nilai yang dilakukan oleh lembaga sosial.

4. Dampak

- 4.1. Dampak sosial: untuk mengidentifikasi (1) peran lembaga sosial dalam menyelesaikan masalah strategis warga desa, seperti kecukupan pangan, ketersediaan sandang, papan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kebencanaan; (2) peran lembaga sosial dalam membangun sikap gotong royong antar warga desa; serta (3) pendapat atau persepsi tentang kegotong-royongan yang terjadi di lembaga sosial dan lembaga ekonomi.
- 4.2. Dampak kebijakan: untuk mengidentifikasi keberhasilan lembaga sosial dalam mempengaruhi kebijakan publik di tingkat desa.
- 4.3. Kepercayaan publik: memotret tingkat kepercayaan terhadap peran atau kerja lembaga sosial, serta faktor atau hal yang meningkatkan kepercayaan terhadap keberadaan lembaga sosial di desa.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pemilihan Lokasi Penelitian

Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki 26 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 449 Desa. Dalam mengimplementasikan UU Desa, Kebumen adalah salah satu Kabupaten yang telah siap karena adanya kerjasama antara Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermades) Kabupaten Kebumen, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan Organisasi masyarakat sipil. Kendati demikian, belum seluruh desa mempunyai pendamping dalam mengimplementasikan UU Desa. Hal tersebut berdampak pada kemampuan masing-masing desa dalam mengimplementasikan UU Desa.

Pada pelaksanaannya, pengukuran tingkat kemandirian desa ini dilakukan di 10 Desa di Kabupaten Kebumen dengan mempertimbangkan beberapa kriteria desa yang berlainan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kecenderungan perbedaan karakteristik desa dan kaitannya dengan tingkat kemandirian desa. Lokasi penelitian ini dilakukan pada desa-desa sebagai berikut:

Tabel 3.1

Lokasi Penelitian dan Karakteristik Desa

NO	LOKASI	KARAKTERISTIK
1	Desa Sрати, Kecamatan Ayah	Pesisir
2	Desa Kalibeji, Kecamatan Sempor	Pertanian
3	Desa Pesuruhan, Kecamatan Puring	Pertanian
4	Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan	Industri/UKM
5	Desa Pasir, Kecamatan Ayah	Wisata
6	Desa Jembangan, Kecamatan Poncowarno	Wisata
7	Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso	Pertanian
8	Desa Karangjambu, Kecamatan Sruweng	Industri/UKM
9	Desa Seling, Kecamatan Karangsambung	Industri/UKM
10	Desa Widoro, Kecamatan Karangsambung	Jasa/perdagangan

3.2 Waktu Penelitian dan Pelaksanaan

a) Waktu Penelitian

Rangkaian proses *piloting* pengukuran Indeks Kemandirian Desa di Kabupaten Kebumen tersebut dilakukan pada tanggal 28 Agustus s/d 3 September 2015. Gambaran umum tahapan kerja kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Menyusun dan Pembahasan Instrumen Penelitian	Mei-Agustus 2015
2.	Penyusunan Panduan Penelitian	Juli-Agustus 2015
3.	Penelitian Lapangan di Kebumen	28 Agustus – 3 September 2015
	- Perjalanan ke Kebumen	28 Agustus 2015
	- Training Fasilitator	29 - 30 Agustus 2015
	- Wawancara terhadap 10 kepala desa lokasi penelitian	30 Agustus 2015
	- Pertemuan dengan Bapermades	31 Agustus 2015
	- Wawancara terstruktur secara kelompok	31 Agustus – 2 September 2015
	- Evaluasi instrument dan proses pengambilan data	3 September 2015
4.	Penulisan dan validasi data	4 – 6 September 2015
5.	Konsolidasi di Jakarta (Hotel Sofyan Betawi)	7 – 9 September 2015
	- Diskusi Pembelajaran dalam Pengukuran Indeks Kemandirian Desa	8 September 2015
6.	Penyusunan laporan	14 – 15 September 2015

b) Pelaksanaan

Kegiatan penelitian Indeks Kemandirian Desa di Kebumen ini dilakukan melalui kerja sama bersama Formasi, sebuah organisasi masyarakat sipil di Kebumen.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dibutuhkan untuk merumuskan Indeks Kemandirian Desa pada Kelembagaan Ekonomi Desa adalah:

1) Data Primer

- a) Proses pengambilan data awal dilakukan dengan wawancara terhadap kepala desa, untuk mendapatkan informasi awal mengenai desa masing-masing, terkait dengan ketersediaan dokumen-dokumen desa, infrastruktur di desa, dan ketersediaan kelembagaan-kelembagaan di desa, sebagai sumber data pendukung penelitian ini. Informasi awal ini akan menjadi acuan dalam proses pengambilan data berikutnya. Proses wawancara ini dilakukan pada hari sebelum pelaksanaan pengambilan data di desa.
- b) Data primer secara umum diperoleh melalui wawancara terstruktur secara berkelompok. Proses tersebut dilaksanakan 2 kali pertemuan dalam satu hari pelaksanaan di masing-masing desa. Pelaksanaan wawancara berkelompok tersebut dilakukan dengan pembagian berdasarkan pada:
 - Keterwakilan pihak pengambil kebijakan di desa, antara lain adalah pemerintahan desa, BPD, ketua kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa, yang berkaitan dengan kelembagaan social dan ekonomi.

- Keterwakilan kelompok lainnya sebagai penerima manfaat, antara lain terdiri dari Kader PKK, Kader Posyandu, Bunda PAUD, Anggota organisasi keagamaan, Jamaah keagamaan, Penganut kepercayaan, Petani/Nelayan (di luar anggota kelompok tani), Ibu pemilik balita, perwakilan Lansia, Orang berkebutuhan khusus/cacat/difabel, Pekerja/Buruh, dan Mantan TKI/TKW

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi berbentuk dokumen yang dapat diperoleh dari pemerintah desa maupun dokumen-dokumen dari lembaga ekonomi desa. Jenis-jenis data sekunder yang diperlukan adalah:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa),
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa),
- Laporan realisasi program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Desa,
- Peraturan Desa (dalam bentuk dokumentasi).
- AD/ART Lembaga Ekonomi Desa
- Rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan program-program yang direncanakan Lembaga Ekonomi Desa.

3.4 Pengukuran Kemandirian Desa

- Pengukuran Kemandirian Desa dilakukan terhadap 3 kelembagaan di dalam desa, yaitu kelembagaan pemerintahan desa, kelembagaan sosial dan kelembagaan ekonomi. Proses pengambilan data melalui wawancara secara kelompok dilakukan melalui pengisian instrument-instrumen pertanyaan menyangkut kelembagaan tersebut.

Masing-masing pertanyaan poin pertanyaan tersebut dihitung berdasarkan indikasi tingkat kemandiriannya, dengan acuan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Skor Kemandirian Desa

Kriteria Kemandirian	Skor
Dependen	1
Independen	2
Interdependen	3

- Analisis Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran dari ketiga dimensi kelembagaan di desa diukur dengan menghitung rata-rata dari masing-masing dimensi kelembagaan tersebut. Penentuan tingkat kemandirian desa tersebut dilakukan berdasarkan pada rentang skor tertentu dengan pembagian kriterianya sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Kemandirian Desa

Kriteria Kemandirian	Skor
Dependen	1,00 – 1, 67
Independen	1,68 – 2,34
Interdependen	2,35 - 3,00

3.5 Limitasi Penelitian

Berdasarkan pelaksanaannya, proses penelitian ini menyadari memiliki keterbatasan dalam beberapa hal, baik terkait teknik maupun substansi (*instrument*) penelitian. Beberapa pembelajaran yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a) Proses Fasilitasi Dan Fasilitator

- Tingkat pemahaman para fasilitator terhadap instrument penelitian bervariasi.
- Kemampuan fasilitator mengembangkan penggunaan contoh kasus sesuai dengan kondisi desa
- Penjelasan setiap dimensi bila responden membutuhkan
- Kemampuan fasilitator dalam membangun suasana yang rileks dan berterima dengan peserta wawancara berkelompok.

b) Responden

- Memastikan keterwakilan responden sesuai dengan kriteria yang ditentukan, dengan memperhatikan kemampuan menulis dan membaca, rentang usia, serta kelompok difabel

c) Pemerintah desa

- Keterbukaan dan responsifitas dalam proses penggalian data

d) Instrument

- Penyesuaian instrument dengan konteks lokal, termasuk identifikasi istilah-istilah yang ada dalam tiga dimensi kelembagaan dengan bahasa yang mudah dipahami.

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam Indeks Kemandirian di Sepuluh Desa

Hasil pengukuran indeks kemandirian sepuluh Desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Tahun 2015 menunjukkan bahwa desa tergolong dalam kategori *independent* dan *interdependent* dalam dimensi kelembagaan pemerintah desa. Untuk dimensi ini, kisaran skor yang dicapai adalah 1,94–2,68. Berikut tabel yang menggambarkan skor masing-masing desa di kelembagaan pemerintah desa.

Tabel 4.1
Peringkat Status Kemandirian Desa pada Dimensi Kelembagaan Pemerintah Desa

Desa	Skor	Kategori	Peringkat Dimensi Kelembagaan Pemerintah Desa
Karangjambu	2,49	Interdependen	9
Widoro	2,61	Interdependen	4
Kalibeji	2,61	Interdependen	3
Seling	2,68	Interdependen	1
Sidomulyo	2,38	Interdependen	8
Srati	2,51	Interdependen	7
Jembangan	1,94	Independen	10
Pasir	2,58	Interdependen	5
Pajengkolan	2,56	Interdependen	6
Pesuruhan	2,64	Interdependen	2

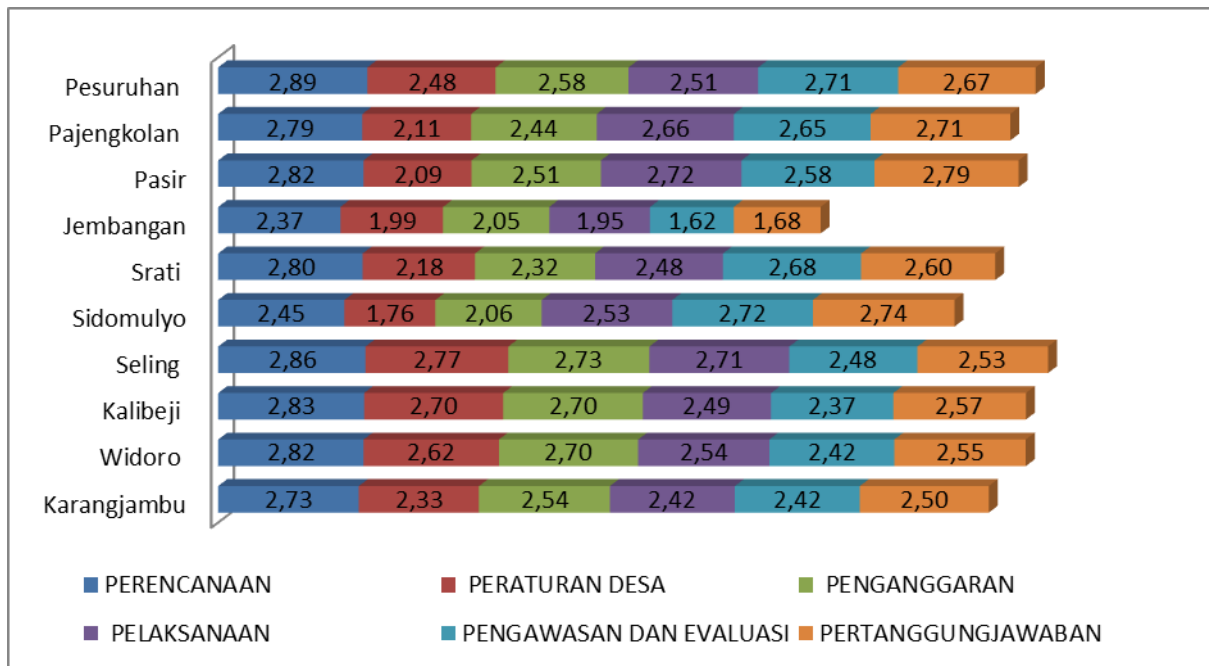
Sumber: Data Peneliti, 2015

Berdasarkan tabel di atas, desa yang memiliki skor tertinggi dalam kelembagaan pemerintah desa adalah Desa Seling dengan skor 2,68 (*interdependent*), sedangkan desa yang memiliki skor terendah adalah Desa Jembangan dengan skor 1,94 (*independent*). Delapan desa lainnya tergolong dalam kategori *interdependent*. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar desa sudah mempunyai pemerintah desa yang mampu melakukan fungsi pemerintahannya dengan mandiri. Desa tersebut tidak hanya mampu melaksanakan fungsi pemerintahannya sendiri, tetapi juga mampu melaksanakan kegiatan lintas desa.

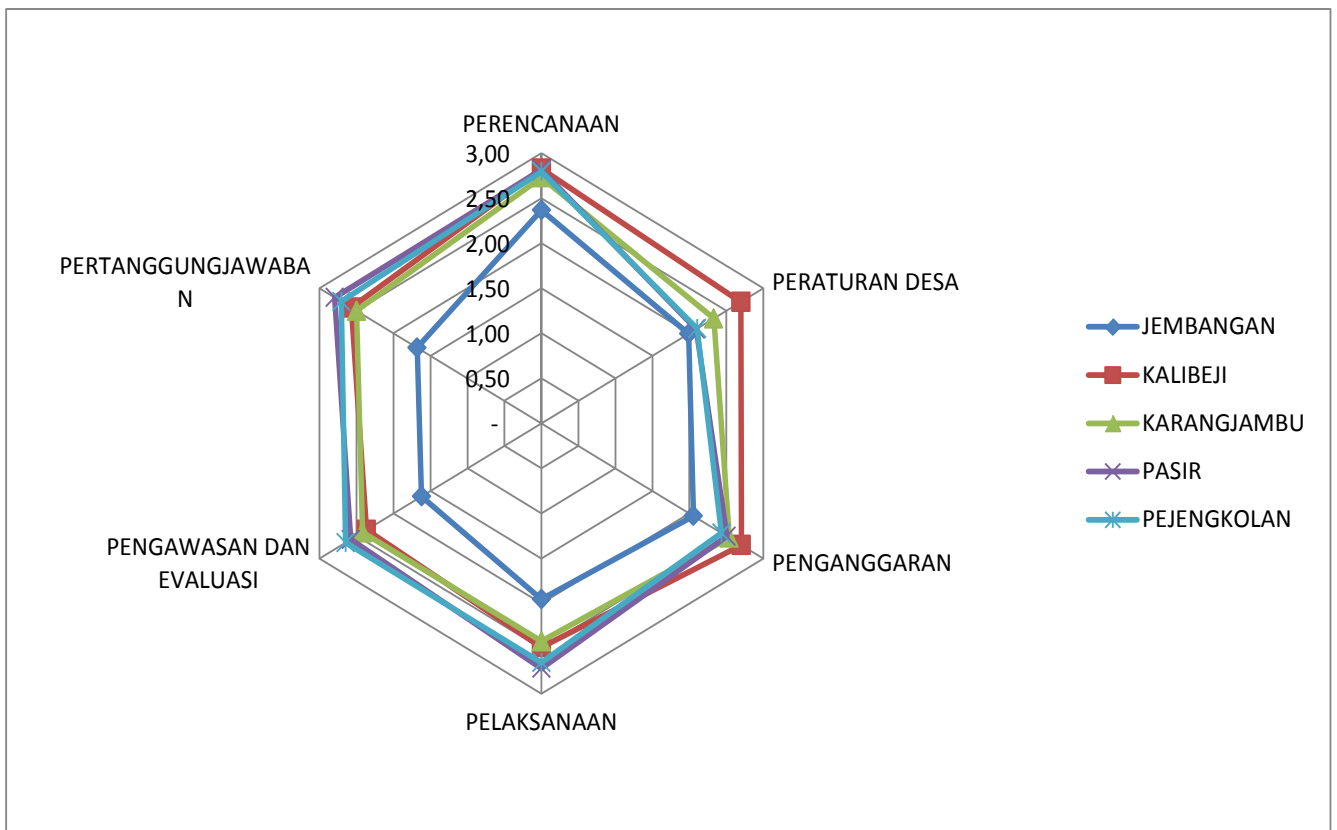
Dimensi kelembagaan pemerintah desa terdiri dari enam sub dimensi yakni perencanaan, peraturan desa, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pertanggungjawaban. Berikut grafik yang menggambarkan masing-masing sub dimensi dalam dimensi Kelembagaan Pemerintah Desa.

Grafik 4.1

Skor Enam Subdimensi dalam Dimensi Pemerintahan Desa



Sumber: Data Peneliti, 2015



Berdasarkan grafik 4.1 di atas, sub dimensi perencanaan memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan skor sub dimensi lainnya. Dalam sub dimensi perencanaan, Desa Pesuruhan memiliki skor tertinggi yakni sebesar 2,89 (*interdependent*), sedangkan desa yang memiliki skor terendah adalah Jembangan (2,37 dalam kategori *interdependent*). Hal ini menandakan bahwa dalam sub dimensi perencanaan, sepuluh pemerintah desa sudah mampu melaksanakan fungsi pemerintahannya dengan mandiri dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas desa.

Dalam sub dimensi peraturan desa, Desa yang memiliki skor tertinggi adalah Desa Seling dengan skor 2,77 (*interdependent*). Di sisi lain, Desa Sidomulyo adalah desa yang memiliki skor terendah yakni 1,76 (*independent*). Selain Sidomulyo, Desa Pajengkolan, Pasir, Jembangan, Srati, dan Karangjambu adalah desa yang tergolong dalam kategori *independent*. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa mampu melakukan fungsinya dalam pembuatan peraturan desa dan peraturan bersama kepala desa serta mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat desa.

Dalam sub dimensi penganggaran, Desa Seling adalah desa yang memiliki skor tertinggi yakni 2,73 (*interdependent*), sedangkan desa yang memiliki skor terendah adalah Desa Sidomulyo dengan skor 2,06 (*independent*). Berdasarkan grafik di atas, sebagian besar desa tergolong dalam *interdependent*. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar desa sudah mampu melakukan penganggaran dengan mandiri dan menganggarkan kegiatan yang bersifat lintas desa.

Dalam sub dimensi pelaksanaan, desa yang memiliki skor tertinggi adalah Desa Pasir (2,72-*interdependent*), sedangkan desa yang memiliki skor terendah adalah Desa Jembangan (1,95-*independent*). Desa lainnya tergolong dalam kategori *interdependent*. Hal ini menandakan bahwa desa mampu menjalankan fungsinya secara mandiri dalam bidang pelayanan dasar, sarana dan prasarana dasar, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam sub dimensi pengawasan dan evaluasi, Desa Sidomulyo adalah desa yang memiliki skor tertinggi yakni sebesar 2,72 (*interdependent*), sedangkan desa yang memiliki skor terendah adalah Desa Kalibeji (2,37 – *interdependent*). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa seluruh desa tergolong dalam kategori *interdependent* dalam sub dimensi ini. Hal ini menandakan bahwa desa sudah mampu melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi dengan mandiri serta dicontoh oleh desa lain.

Dalam sub dimensi pertanggungjawaban, Desa Pasir adalah desa yang memiliki skor tertinggi yakni 2,79 (*interdependent*), sedangkan desa yang memiliki skor terendah adalah Desa Jembangan (1,68-*independent*). Desa lainnya tergolong dalam kategori *interdependent*. Hal ini menandakan bahwa sembilan desa sudah mampu melaksanakan fungsi pertanggungjawaban dengan rutin dan cenderung proaktif.

4.2 Analisis Masing-Masing Indikator dalam Dimensi Kelembagaan Pemerintahan di Sepuluh Desa

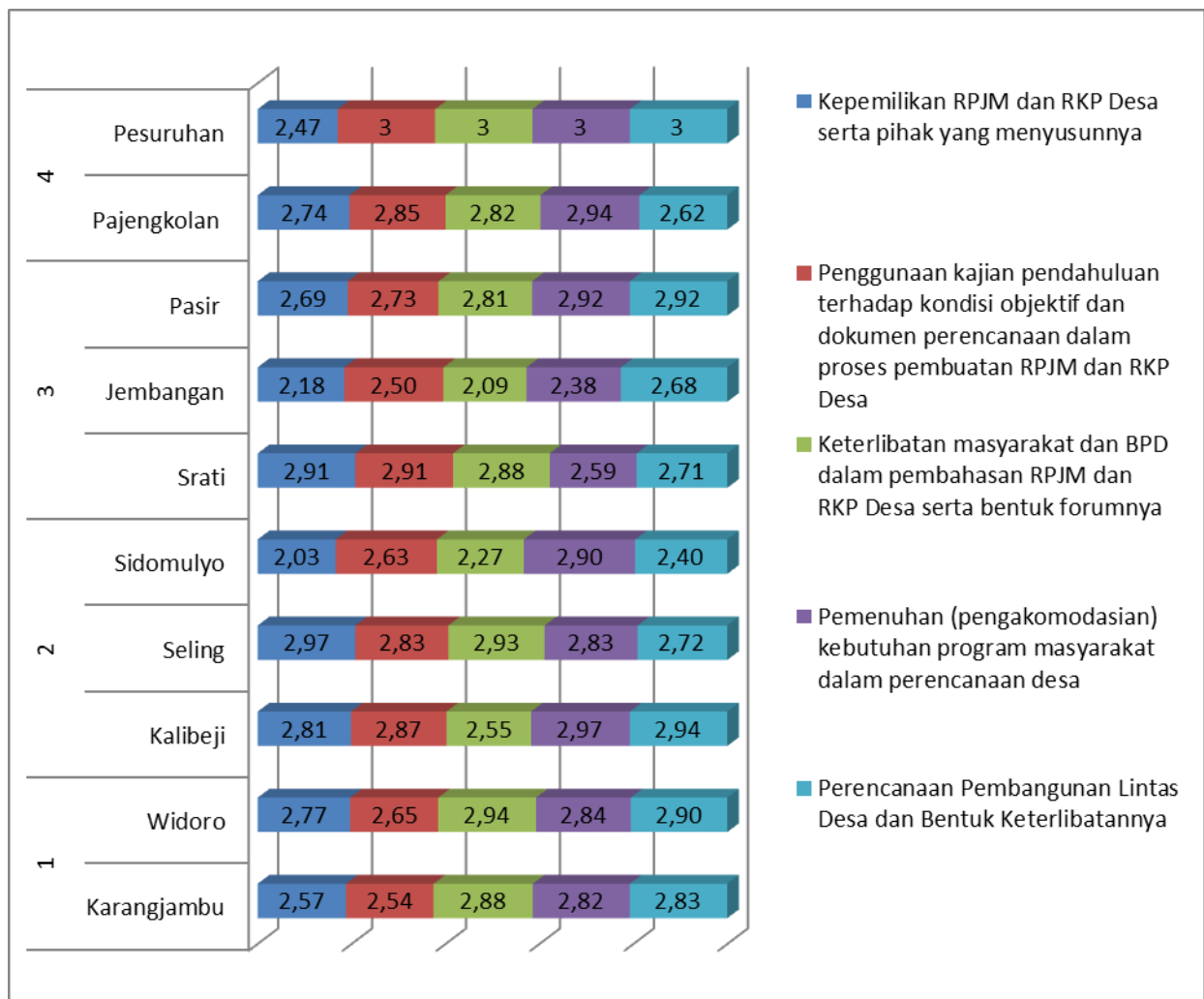
Dalam sub bab ini akan dijelaskan masing-masing indikator di sub dimensi perencanaan, peraturan desa, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pertanggungjawaban. Sepuluh desa tersebut digolongkan dalam empat tipologi desa yakni (1) perdagangan dan jasa; (2) UMKM; (3) Wisata; dan (4) Pertanian. Desa yang tergolong dalam perdagangan dan jasa adalah Karangjambu dan Widoro, sedangkan Desa Kalibeji, Seling, dan Sidomulyo adalah desa yang tergolong dalam desa UMKM. Di sisi lain, desa yang tergolong dalam desa Wisata adalah Sрати, Jembangan, dan Pasir, sedangkan desa yang tergolong dalam desa Pertanian adalah Pajengkolan dan Pesuruhan.

4.2.1 Sub-Dimensi Perencanaan

Sub dimensi perencanaan digambarkan dalam lima indikator yakni kepemilikan RPJM dan RKP Desa serta pihak yang menyusunnya; penggunaan kajian pendahuluan terhadap kondisi objektif dan dokumen perencanaan dalam proses pembuatan RPJM dan RKP Desa; keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pembahasan RPJM dan RKP Desa serta bentuk forumnya; pemenuhan kebutuhan program masyarakat dalam perencanaan desa; dan perencanaan pembangunan lintas desa dan bentuk keterlibatannya. Dua indikator pertama adalah indikator yang menggambarkan fakta yang ada. Kendati demikian, setiap responden mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang berbeda sehingga skor yang terkumpul berbeda-beda. Berikut grafik yang menggambarkan skor di masing-masing indikator dalam sub dimensi perencanaan:

Grafik 4.2

Skor Lima Indikator dalam Sub Dimensi Perencanaan



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Indikator Kepemilikan RPJM Dan RKP Desa Serta Pihak yang Menyusunnya

Berdasarkan grafik 4.2 di atas dapat dilihat bahwa dalam hal kepemilikan RPJM dan RKP Desa serta pihak yang menyusunnya, Desa Seling adalah desa yang memiliki skor tertinggi yakni 2,97 (*interdependent*). Selain Seling, desa yang memiliki kategori *interdependent* adalah karang jambu (2,57), Widoro (2,77), Kalibeji (2,81), Sрати (2,91), Pasir (2,69), Pajengkolan (2,74), dan Pesuruhan (2,47). Diantara sepuluh Desa, Desa Sidomulyo adalah desa yang memiliki skor terendah yakni 2,03 (*independent*). Berdasarkan skor tersebut juga dilihat bahwa desa dengan tipologi UMKM memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Walaupun Sidomulyo yang tergolong dalam desa UMKM memiliki skor terendah, tetapi dua desa lainnya yakni Kalibeji dan Seling adalah desa yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Untuk tipologi desa lainnya, persebaran merata dan berada dalam kategori *interdependent* dan *independent*.

2. Indikator Penggunaan Kajian Pendahuluan terhadap Kondisi Objektif dan Dokumen Perencanaan dalam Proses Pembuatan RPJM dan RKP Desa

Grafik 4.2 di atas juga menggambarkan bahwa dalam penggunaan kajian pendahuluan terhadap kondisi objektif dan dokumen perencanaan dalam proses pembuatan RPJM dan

RKP Desa, Desa Pesuruhan adalah desa yang memiliki skor tertinggi yakni 3 (*interdependent*), sedangkan desa lainnya memiliki skor yang tergolong tinggi dan berada dalam kategori *interdependent*. Dilihat dari sudut pandang tipologi desa, desa pertanian yakni Pajengkolan dan Pesuruhan memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.

3. Indikator Keterlibatan Masyarakat dan BPD dalam Pembahasan RPJM dan RKP Desa serta Bentuk Forumnya

Dalam indikator keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pembahasan RPJM dan RKP Desa serta bentuk forumnya, Desa Pesuruhan adalah desa yang memiliki skor tertinggi (3,00). Di sisi lain, desa yang memiliki skor terendah adalah Jembangan yakni 2,09 (*independent*). Selain Jembangan, desa yang tergolong dalam kategori *independent* adalah Desa Sidomulyo. Ditinjau dari tipologi desa, desa pertanian serta perdagangan dan jasa memiliki kecenderungan skor lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.

4. Indikator Pemenuhan (Pengakomodasian) Kebutuhan Program Masyarakat Dalam Perencanaan Desa

Berdasarkan grafik 4.2 di atas, skor tertinggi dalam indikator pemenuhan (pengakomodasian) kebutuhan program masyarakat dalam perencanaan desa dimiliki oleh Desa Pesuruhan dengan skor 3,00 (*interdependent*). Di sisi lain, desa yang memiliki skor terendah adalah Desa Jembangan (2,38). Seluruh desa dalam indikator ini tergolong dalam kategori *interdependent*, tetapi desa pertanian memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi.

5. Indikator Perencanaan Pembangunan Lintas Desa Dan Bentuk Keterlibatannya

Indikator perencanaan pembangunan lintas desa dan bentuk keterlibatannya memiliki skor tertinggi di Desa Pesuruhan yakni sebesar 3,00 (*interdependent*). Di sisi lain, desa yang memiliki skor terendah adalah Desa Sidomulyo yakni sebesar 2,4 (*interdependent*). Desa lainnya juga memiliki skor yang tergolong dalam kategori *interdependent*, tetapi desa dengan tipologi perdagangan dan jasa memiliki kecenderungan skor lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya.

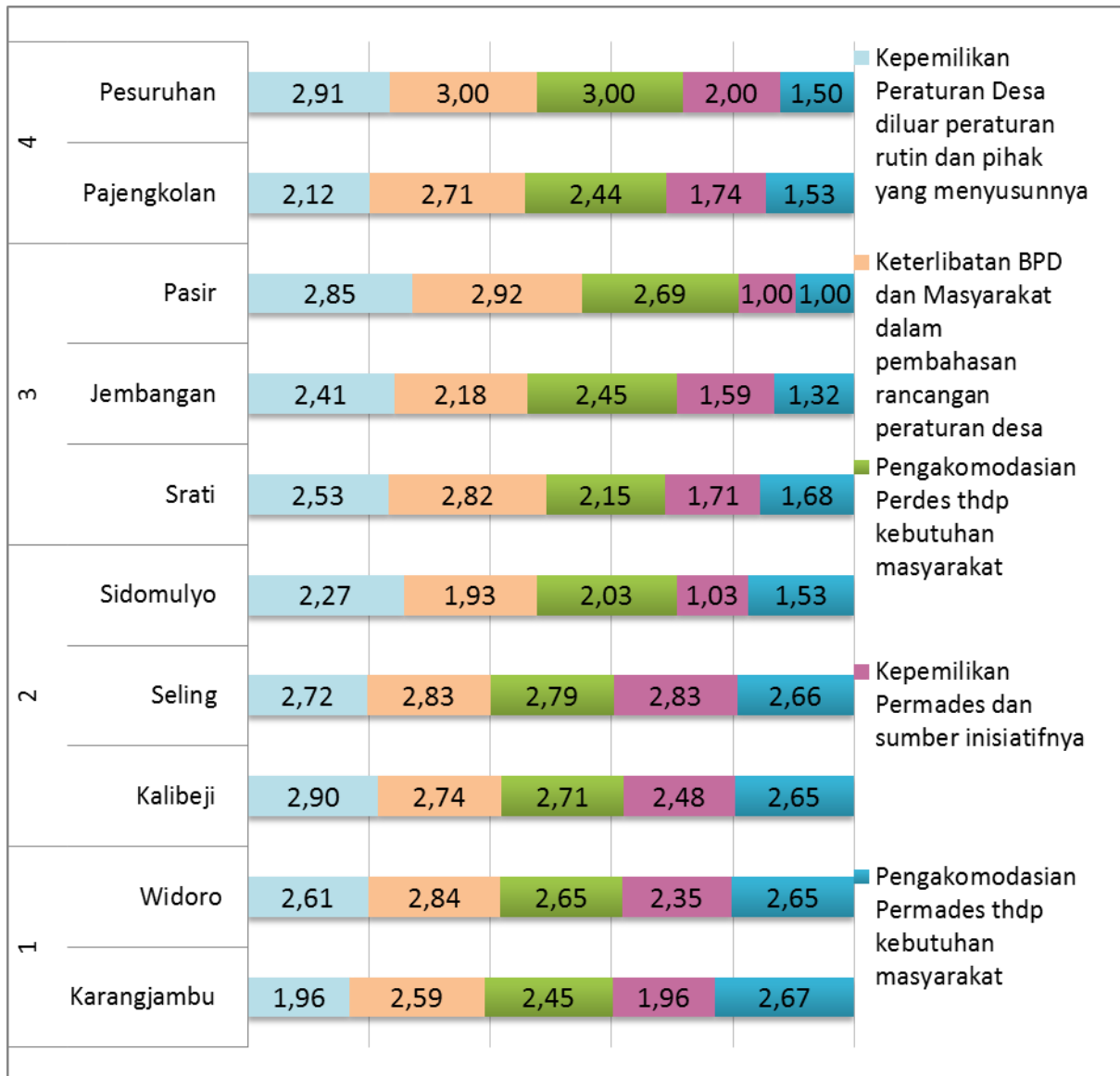
4.2.2 Sub-Dimensi Peraturan Desa

Sub-dimensi peraturan desa digambarkan dalam lima indikator yakni kepemilikan peraturan desa di luar peraturan desa rutin dan pihak yang menyusunnya; keterlibatan BPD dan masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan desa; pemenuhan (pengakomodasian) peraturan desa (perdes) terhadap kebutuhan masyarakat; kepemilikan peraturan bersama kepala desa (Permades) dan sumber inisiatifnya; dan pemenuhan (pengakomodasian) kebutuhan masyarakat dalam peraturan bersama kepala desa (permades). Indikator pertama, kedua, dan keempat adalah indikator yang sifatnya faktual, tetapi skor yang diberikan masing-masing responden berbeda-beda karena perbedaan pengetahuan dan pengalaman

responden. Berikut grafik yang menggambarkan skor di masing-masing indikator dalam sub dimensi peraturan desa:

Grafik 4.3

Skor Lima Indikator dalam Sub-Dimensi Peraturan Desa



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Indikator Peraturan Desa di Luar Peraturan Rutin dan Pihak yang Menyusunnya

Berdasarkan grafik 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa dalam indikator kepemilikan peraturan desa di luar peraturan rutin dan pihak yang menyusunnya, Desa Pesuruhan adalah desa yang memiliki skor tertinggi yakni sebesar 2,91 (*interdependent*). Di sisi lain, Desa Karangjambu adalah desa yang memiliki skor terendah dalam indikator ini (1,96-*independent*). Ditinjau dari tipologi desa, desa wisata adalah desa yang memiliki kecenderungan skor lebih tinggi

dibandingkan dengan desa lainnya. Seluruh desa dalam tipologi ini tergolong dalam kategori *interdependent*.

2. Indikator Keterlibatan BPD dan Masyarakat dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Grafik 4.3 di atas juga menggambarkan indikator keterlibatan BPD dan Masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan desa. Dalam indikator ini, Desa Pesuruhan adalah desa yang memiliki skor tertinggi yakni 3,00 (*interdependent*), sedangkan desa yang memiliki skor terendah adalah Desa Sidomulyo (1,93-*independent*). Dilihat dari sudut pandang tipologi desa, desa pertanian adalah desa yang memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya.

3. Indikator Pengakomodasian Peraturan Desa terhadap Kebutuhan Masyarakat

Dalam indikator pengakomodasian peraturan desa terhadap kebutuhan masyarakat, Desa Pesuruhan adalah desa yang memiliki skor tertinggi yakni sebesar 3,00 (*interdependent*), sedangkan desa yang memiliki skor terendah adalah Sidomulyo (2,03-*independent*). Ditinjau dari tipologi desa, desa pertanian adalah desa yang memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya. Hal ini dapat dilihat dari seluruh desa dalam tipologi ini tergolong dalam *interdependent*.

4. Indikator Kepemilikan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permades) dan Sumber Inisiatifnya

Skor tertinggi dalam indikator kepemilikan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permades) dan sumber inisiatifnya adalah Desa Seling dengan skor 2,83 (*interdependent*). Di sisi lain, Desa Pasir adalah desa yang memiliki skor terendah dalam kategori ini (1,00-*dependent*) karena tidak memiliki peraturan bersama kepala desa. Dilihat dari sudut pandang tipologi desa, dua desa UMKM memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya, walaupun salah satu desa UMKM yakni Sidomulyo termasuk dalam kategori *dependent*.

5. Indikator Pemenuhan (Pengakomodasian) Kebutuhan Masyarakat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa (Permades)

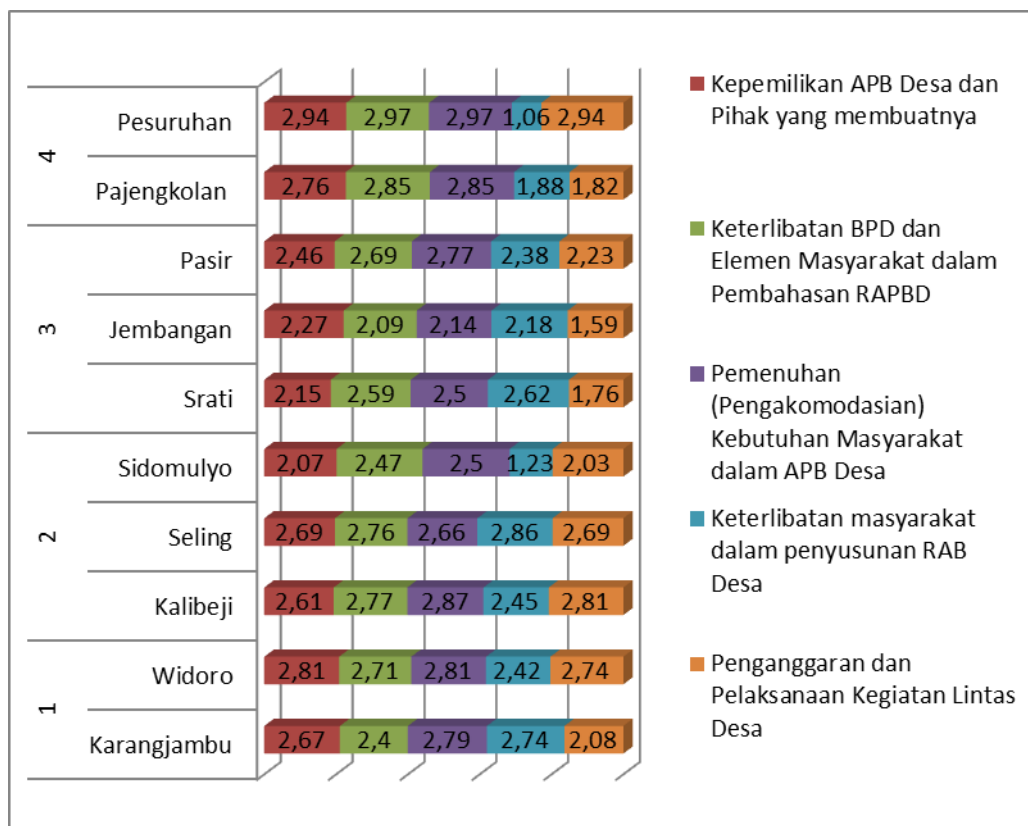
Dalam hal pemenuhan (pengakomodasian) kebutuhan masyarakat dalam peraturan bersama kepala desa (permades), skor tertinggi dimiliki oleh Desa Seling (2,66-*interdependent*), sedangkan skor terendah dimiliki oleh Desa Pasir (1,00-*dependent*). Hal ini terjadi karena Desa Pasir tidak memiliki Permades. Dalam hal tipologi desa, desa perdagangan dan jasa adalah desa yang memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipologi desa lainnya.

4.2.3 Sub dimensi Penganggaran

Sub dimensi penganggaran digambarkan melalui lima indikator, yakni kepemilikan APB Desa dan pihak yang membuatnya; keterlibatan BPD dan elemen masyarakat dalam pembahasan RAPBD; pemenuhan (pengakomodasian) kebutuhan masyarakat dalam APBD Desa; keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAB Desa; dan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan lintas desa. Indikator pertama adalah indikator yang bersifat faktual, tetapi skor ang diberikan berbeda-beda karena perbedaan pengalaman dan pengetahuannya. Berikut grafik yang menggambarkan skor di masing-masing indikator dalam sub dimensi ini antara lain:

Grafik 4.4

Skor Lima Indikator dalam Sub Dimensi Penganggaran



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Kepemilikan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan Pihak yang Membuatnya

Berdasarkan grafik 4.4 di atas, Desa Pesuruhan adalah desa yang memiliki skor tertinggi dalam hal kepemilikan APB Desa dan pihak yang membuatnya (2,94-*interdependent*). Di sisi lain, terdapat tiga desa yang tergolong dalam kategori *independent* yakni Desa Sidomulyo (2,07), Srati (2,15), dan Jembangan (2,27). Ditinjau dari tipologi desa, Desa Pertanian adalah desa yang memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi, sedangkan Desa Wisata memiliki kecenderungan skor yang lebih rendah dibandingkan yang lain.

2. Indikator Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Elemen Masyarakat dalam Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Dalam indikator keterlibatan BPD dan elemen masyarakat dalam pembahasan RAPBD, Desa Pesuruhan adalah desa yang memiliki skor tertinggi (2,97-*interdependent*) . Di sisi lain, Desa Jembangan memiliki skor terendah dalam indikator ini (2,09-*independent*). Delapan desa lainnya tergolong dalam kategori *interdependent*. Ditinjau dari tipologi desa, desa Pertanian adalah desa yang memiliki kecenderungan skor lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya.

3. Indikator Pemenuhan (Pengakomodasian) Kebutuhan Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)

Skor tertinggi dalam indikator pemenuhan (pengakomodasian) kebutuhan masyarakat dalam APB Desa dimiliki oleh Desa Pesuruhan dengan skor 2,97 (*interdependent*). Di sisi lain, Desa Jembangan adalah desa yang memiliki skor terendah yakni sebesar 2,14 (*independent*). Delapan desa lainnya tergolong dalam kategori *interdependent*. Dilihat dari sudut pandang tipologi desa, Desa Pertanian (Desa Pajengkolan dan Pesuruhan) memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi dibandingkan tipologi desa lainnya.

4. Indikator Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa

Dalam indikator keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAB Desa, skor tertinggi dimiliki oleh Desa Seling (2,86-*interdependent*). Di sisi lain, Desa Pesuruhan memiliki skor terendah dalam indikator ini (1,06-*interdependent*). Ditinjau dari tipologi desa, desa perdagangan dan jasa memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya, sedangkan desa pertanian memiliki kecenderungan skor yang lebih rendah.

5. Indikator Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Lintas Desa

Dalam indikator penganggaran dan pelaksanaan kegiatan lintas desa, skor tertinggi dimiliki oleh Desa Pesuruhan (2,94-*interdependent*). Di sisi lain, Jembangan adalah desa yang memiliki skor terendah dalam indikator ini (1,59-*dependent*). Selain itu, lima desa tergolong dalam kategori *independent*. Desa tersebut antara lain Karangjambu (2,08), Sidomulyo (2,03), Sрати (1,76), Pasir (2,23), dan Pajengkolan (1,82). Dilihat dari sudut pandang tipologi desa, desa UMKM memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipologi desa lainnya, walaupun skor tertinggi tidak terdapat dalam tipologi ini.

4.2.4 Sub-dimensi Pelaksanaan

Indikator sub dimensi pelaksanaan dalam dimensi kelembagaan pemerintah desa terdiri dari 25 indikator. Sejumlah indikator tersebut akan disajikan ke dalam lima grafik.

Grafik berikut menyajikan lima indikator, yakni :

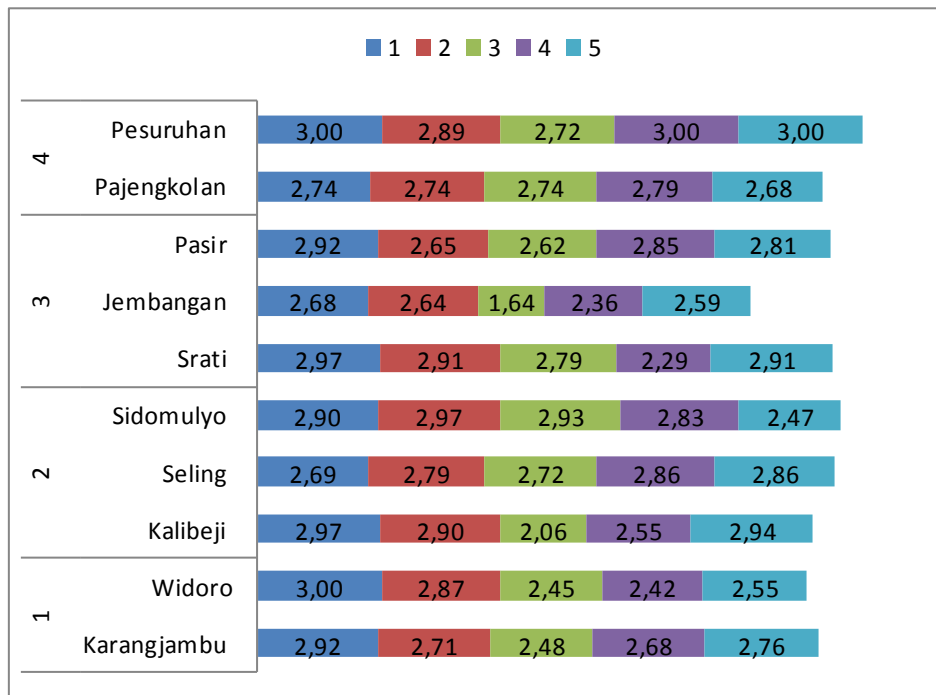
1. Keberfungsian Pemdes dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
2. Ketersediaan (prakarsa) pelayanan dasar.
3. evaluasi terhadap pelayanan dasar.
4. Sumber keuangan pelayanan dasar.

5. Transparansi penyelenggaraan pelayanan dasar.

Secara lebih lengkap gambaran nilai indikator 1-5 di sajikan dalam grafik di bawah ini

Grafik 4.5

Lima Indikator dalam Sub Dimensi Pelaksanaan (1)



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Indikator Keberfungsian Pemerintah Desa dalam Penyediaan Pelayanan Dasar

Berdasarkan grafik di atas dapat di ketahui bahwa untuk indikator pertama mengenai keberfungsian pemerintah desa dalam penyediaan pelayanan dasar, Desa Pesuruhan dan Widoro mempunyai nilai yang paling tinggi. Sementara itu, desa dengan nilai yang paling rendah adalah Desa Jembangan dan Pejengkolan. Nilai tersebut setelah dikorelasikan dengan tabel kriteria, nilai tertinggi atau terendah semuanya berada dalam kategori interdependen. Namun perlu dicatat, walaupun semua nilai skor berada dalam kategori interdependen namun nilai skor setiap desa memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan karena perbedaan tingkat pemahaman dan pengalaman dari masing-masing responden di setiap desa.

Jika di kaitkan dengan tipologi desa, dapat di ketahui bahwa semua desa dengan tipologi yang berbeda mempunyai nilai yang sama dalam hal keberfungsian pemerintah desa dalam penyediaan pelayanan dasar. Hanya saja, Desa Pesuruhan yang merupakan desa dengan tipologi pertanian dan Desa Widoro dengan tipologi perdagangan dan jasa mempunyai nilai paling tinggi. Sementara itu, Desa Jembangan dan Desa Seling merupakan desa dengan nilai skor terendah merupakan desa dengan tipologi UMKM dan wisata.

2. Indikator Ketersediaan atau Prakarsa Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Pelayanan Dasar

Indikator kedua yaitu mengenai ketersediaan atau prakarsa pemerintah desa dalam penyediaan pelayanan dasar dapat mempunyai pola nilai yang sama dengan indikator kedua. Sepuluh desa mempunyai nilai skor yang berada dalam kategori interdependen. Hanya saja, di indikator kedua ini Desa Sрати dan Kalibeji mempunyai nilai yang paling tinggi. Sedangkan nilai skor yang paling rendah adalah Desa Jembangan dan Pasir.

Jika dikaitkan dengan tipologi desa, diketahui bahwa Desa Sрати merupakan desa dengan tipologi Wisata dan Kalibeji merupakan desa dengan tipologi UMKM. Sedangkan Desa Jembangan dan Pasir merupakan sama-sama desa dengan tipologi wisata. Dari nilai skor tersebut dapat di lihat bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibanding desa dengan tipologi pariwisata.

3. Indikator Evaluasi terhadap Pelayanan Dasar

Pada indikator ke tiga yaitu mengenai evaluasi terhadap pelayanan dasar diketahui bahwa desa dengan nilai skor yang paling tinggi adalah Desa Sidomulyo. Mengacu pada tabel kriteria nilai skor maka nilai skor tersebut berada dalam kategori interdependen. Sementara itu, desa dengan nilai skor terendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel kriteria nilai skor, maka nilai tersebut berada dalam kategori dependen.

Dikaitkan dengan tipologi desa, diketahui bahwa Desa dengan tipologi UMKM merupakan desa dengan nilai skor paling tinggi diantara desa dalam tipologi lain. Sementara itu, desa dengan nilai skor yang paling rendah adalah Desa Jembangan merupakan desa dengan tipologi wisata. Dari nilai skor tersebut dapat dilihat bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa dengan tipologi lainnya dalam hal evaluasi terhadap ketersediaan pelayanan dasar.

4. Indikator Sumber Keuangan Pelayanan Dasar

Indikator ke empat adalah sumber keuangan pelayanan dasar. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa desa dengan nilai skor tertinggi adalah desa Pesuruhan, sedangkan desa dengan nilai skor terendah adalah desa Sрати. Mengacu pada tabel kriteria maka skor tersebut berada dalam kategori interdependen, sedangkan skor terendah berada dalam kategori dependen.

Dikaitkan dengan tipologi desa diketahui bahwa desa yang memperoleh nilai tertinggi adalah desa dengan tipologi pertanian. Sedangkan desa dengan nilai skor terendah adalah desa dengan tipologi wisata. Dari nilai skor tersebut dapat dilihat bahwa desa dengan tipologi pertanian mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa yang berada pada tipologi wisata dalam hal sumber keuangan pelayanan dasar.

5. Indikator Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Pada indikator yang kelima dapat diketahui bahwa desa dengan nilai skor yang paling tinggi adalah desa Pesuruhan. Sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah desa Sidomulyo. Namun mengacu pada tabel kriteria skor diketahui bahwa kedua skor tersebut berada dalam kategori interdepen. Perbedaan skor tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pengetahuan dan pengalaman responden di setiap desa.

Dikaitkan dengan tipologi desa, dapat diketahui bahwa Desa Pesuruhan merupakan desa dalam tipologi pertanian. Sementara itu, Desa Sidomulyo merupakan desa dengan tipologi UMKM. Dapat disimpulkan bahwa desa dengan tipologi pertanian dan UMKM mempunyai kategori yang sama, yaitu interdependen.

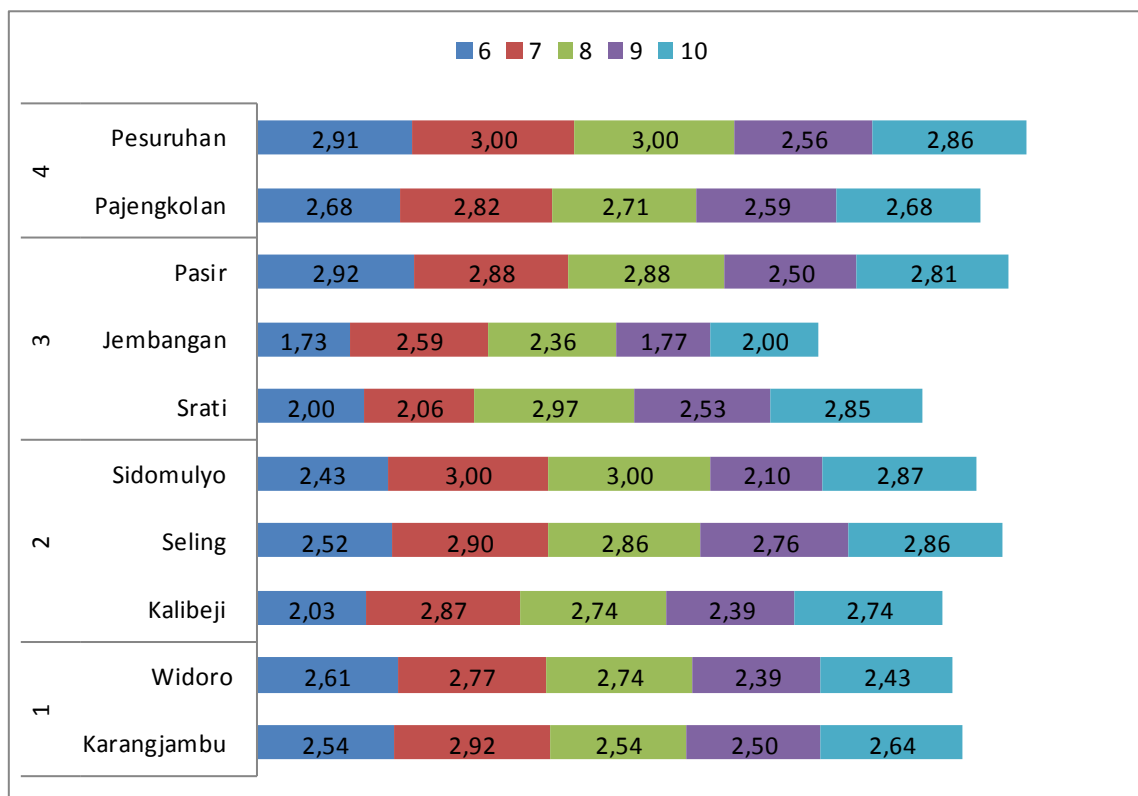
Sementara itu, grafik berikut akan menampilkan indikator 6-10:

6. Keberterimaan dan keberfungsian penyelenggaraan pelayanan dasar
7. Keberfungsian Pemdes dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana dasar.
8. Ketersediaan (prakarsa) pembangunan sarana dan prasarana dasar.
9. Evaluasi sarana dan prasarana.
10. Sumber keuangan sarana dan prasarana dasar

Secara lebih lengkap gambaran nilai indikator 6-10 di sajikan dalam grafik di bawah ini

Grafik 4.6

Lima Indikator dalam Sub Dimensi Pelaksanaan (2)



6. Indikator Keberterimaan dan Sumber: Data Peneliti, 2015 | Pelayanan Dasar

Indikator ke enam adalah keberterimaan dan keberfungsian penyelenggaraan pelayanan dasar. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa desa dengan nilai skor paling tinggi untuk indikator ini adalah Desa Pasir. Sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel kriteria skor nilai tertinggi ini berada dalam kategori interdependen, sedangkan nilai skor terendah berada dalam kategori independen.

Dikaitkan dengan tipologi desa diketahui bahwa kedua desa dengan nilai tertinggi dan terendah tersebut merupakan desa yang berada dalam satu tipologi yaitu desa UMKM. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai keragaman kategori dibandingkan desa dengan tipologi lain.

7. Indikator Keberfungsian Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Indikator ke tujuh mengenai keberfungsian pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa desa dengan nilai skor paling tinggi adalah Desa Pesuruhan. Sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Desa Sрати. Mengacu pada tabel kriteria rentang skor, nilai tertinggi tersebut masuk dalam kategori interdependen, sedangkan nilai terendah masuk pada kategori independen.

Dikaitkan dengan tipologi desa, di ketahui bahwa desa dengan nilai skor tertinggi adalah desa dengan tipologi pertanian. Sedangkan desa dengan nilai skor terendah adalah desa dengan tipologi wisata. Dalam hal keberfungsian pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dasar, desa dengan tipologi pertanian mempunyai skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipologi pariwisata.

8. Indikator Ketersediaan (Prakarsa) Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar

Indikator ke delapan mengenai Ketersediaan (prakarsa) pembangunan sarana dan prasarana dasar. Dari grafik diketahui bahwa desa dengan nilai skor tertinggi adalah desa Pesuruhan dan Sidomulyo. Sementara desa dengan nilai skor terendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel kriteria skor desa dengan skor paling tinggi berada dalam kategori interdependen. Sedangkan yang terendah berada dalam kategori independen.

Dikaitkan dengan tipologi desa, diketahui bahwa Desa diketahui bahwa dua desa dengan nilai skor tertinggi tersebut berasal dari tipologi desa yang berbeda. Desa Pesuruhan merupakan desa dengan tipologi pertanian, sedangkan Desa Sidomulyo merupakan desa dengan tipologi UMKM. Sementara itu, desa dengan nilai skor terendah adalah desa yang berada dalam tipologi wisata.

9. Indikator Evaluasi Sarana Dan Prasarana

Selanjutnya adalah indikator ke sembilan mengenai evaluasi sarana dan prasarana. Dari grafik diketahui bahwa desa dengan nilai skor paling tinggi adalah Desa Seling. Sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel kriteria rentang skor diketahui bahwa nilai tertinggi desa tersebut berada dalam kategori interdependen, sedangkan nilai skor terendah desa tersebut berada dalam kategori independen.

Dikaitkan dengan tipologi desa, diketahui bahwa dengan nilai skor tertinggi tersebut merupakan desa dengan tipologi UMKM. Sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah desa dengan tipologi pariwisata. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibandingkan desa dengan tipologi pariwisata.

10. Indikator Sumber Keuangan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

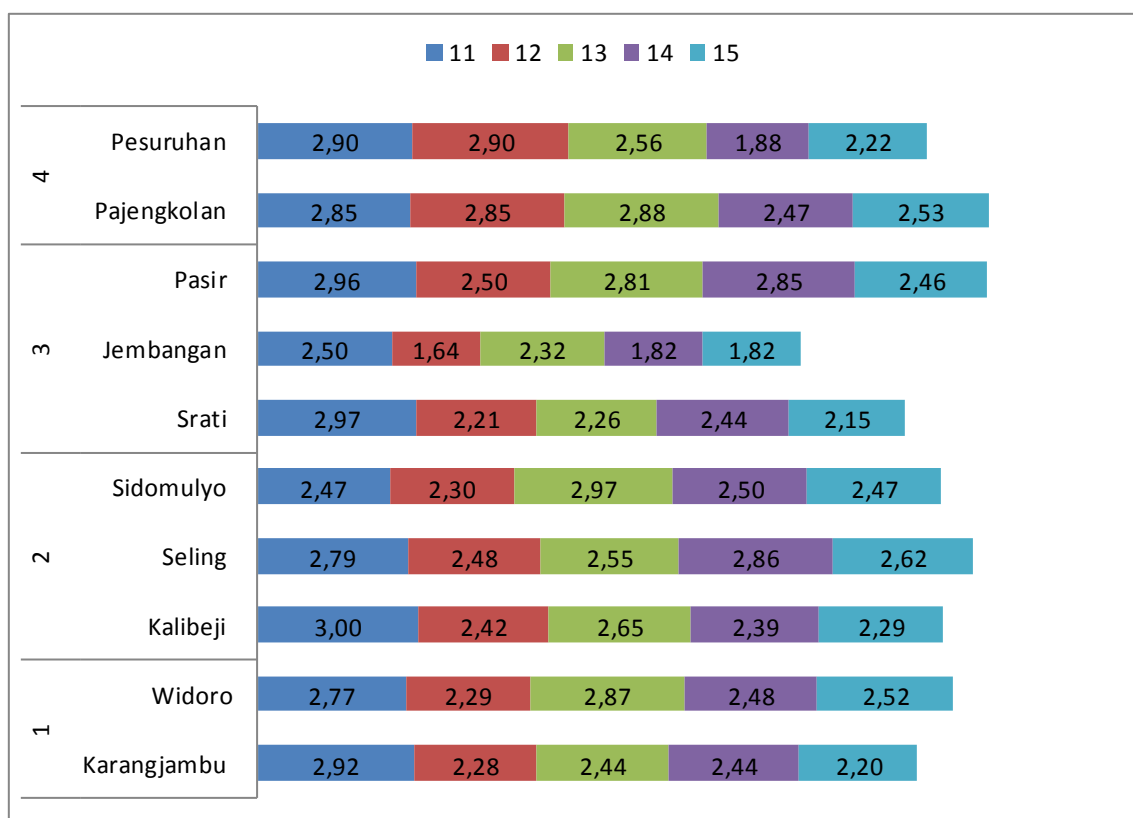
Indikator ke sepuluh mengenai sumber keuangan penyelenggaraan pelayanan dasar. Dari grafik diketahui bahwa nilai skor yang paling tinggi untuk indikator ini adalah Desa Sidomulyo. Sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel kriteria rentang skor diketahui bahwa nilai tertinggi tersebut berada dalam kategori interdependen, sedangkan nilai skor terendah berada dalam kategori independen.

Dikaitkan dengan tipologi desa, dapat dilihat bahwa desa dengan nilai tertinggi tersebut merupakan dengan tipologi UMKM. Sedangkan desa dengan nilai skor terendah adalah desa dengan tipologi pariwisata. Dapat dikatakan bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan dengan tipologi pariwisata.

Selanjutnya berikut disajikan indikator 11-15 sebagai berikut :

11. Transparansi penyelenggaraan sarana dan prasarana dasar.
12. Keberterimaan dan keberfungsian sarana dan prasarana dasar
13. Keberfungsian Pemdes dalam pengembangan ekonomi lokal.
14. Ketersediaan (prakarsa) pengembangan ekonomi lokal.
15. Keberfungsian pemerintah desa dalam kegiatan pengembangan ekonomi lokal

Skor Lima Indikator dalam Sub Dimensi Pelaksanaan (3)



Sumber: Data Peneliti, 2015

11. Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Berdasarkan grafik diketahui bahwa untuk indikator ke 11 tentang transparansi penyelenggaraan pelayanan dasar dapat di ketahui desa dengan nilai skor yang paling tinggi adalah Desa Kalibeji, sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Desa Sidomulyo. Mengacu pada tabel kriteria rentang skor diketahui bahwa desa dengan nilai tertinggi dan terendah tersebut berada dalam kategori interdependen.

Mengacu pada tipologi desa, diketahui bahwa desa dengan nilai tertinggi dan terendah tersebut merupakan desa yang berasal dari tipologi desa yang sama. Hal ini berarti bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai keragaman kategori pada indikator transparansi penyelenggaraan pelayanan dasar.

12. Keberterimaan dan Keberfungsian Sarana dan Prasarana Dasar

Indikator ke dua belas mengenai keberterimaan dan keberfungsian sarana dan prasarana dasar. Dari grafik diketahui bahwa desa dengan nilai skor paling tinggi adalah Desa Pesuruhan, sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel kriteria rentang skor diketahui bahwa nilai tersebut berada dalam kategori interdependen, sedangkan nilai terendah berada dalam kategori dependen.

Dikaitkan dengan tipologi desa diketahui bahwa desa dengan nilai tertinggi adalah desa dengan tipologi pertanian, sedangkan desa dengan nilai skor terendah adalah desa dengan tipologi wisata. Dapat dikatakan bahwa desa dengan tipologi pertanian mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibanding desa dengan tipologi wisata pada indikator keberterimaan dan keberfungsian sarana dan prasarana dasar.

13. Indikator Keberfungsian Pemdes dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Dari grafik dapat diketahui bahwa desa dengan nilai skor paling tinggi untuk indikator keberfungsian pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi lokal adalah Desa Sidomulyo. Sedangkan desa dengan nilai skor yang paling rendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel kriteria rentang skor diketahui bahwa nilai tertinggi tersebut berada dalam kategori interdependen, sedangkan nilai terendah berada dalam kategori independen.

Mengacu pada tipologi desa, diketahui bahwa desa dengan nilai skor tertinggi merupakan desa dengan tipologi UMKM, sedangkan desa dengan nilai skor terendah adalah desa dengan tipologi wisata. Dapat dikatakan bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa dengan tipologi wisata dalam indikator keberfungsian pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi lokal.

14. Ketersediaan (Prakarsa) Pengembangan Ekonomi Lokal

Dari grafik diketahui bahwa dalam ketersediaan (prakarsa) pengembangan ekonomi lokal, desa dengan nilai skor yang paling tinggi adalah Desa Seling sedangkan desa dengan nilai skor yang paling rendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel kriteria rentang skor di ketahui bahwa nilai tertinggi tersebut berada dalam kategori interdependen sedangkan nilai berada dalam kategori independen.

Mengacu pada tipologi desa, diketahui bahwa desa dengan nilai skor tertinggi merupakan desa dengan tipologi UMKM sedangkan desa dengan skor paling rendah adalah desa wisata. Dapat di katakan bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai nilai skor yang lebih tinggi di banding dengan desa dengan tipologi wisata dalam indikator keberfungsian pemerintah desa dalam prakarsa pengembangan ekonomi lokal.

15. Indikator Keberfungsian Pemerintah Desa dalam Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal

Desa yang memiliki nilai skor tertinggi di indikator keberfungsian pemerintah desa dalam kegiatan pengembangan ekonomi lokal adala Desa Seling, sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel rentang kriteria skor diketahui bahwa nilai tertinggi berada pada kategori interdependen, sedangkan nilai skor terendah berada dalam kategori independen.

Mengacu pada tipologi desa, diketahui bahwa desa dengan nilai skor paling tinggi merupakan desa dengan tipologi UMKM, sedangkan desa dengan nilai skor terendah adalah desa dengan tipologi wisata. Dapat dikatakan bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai nilai skor

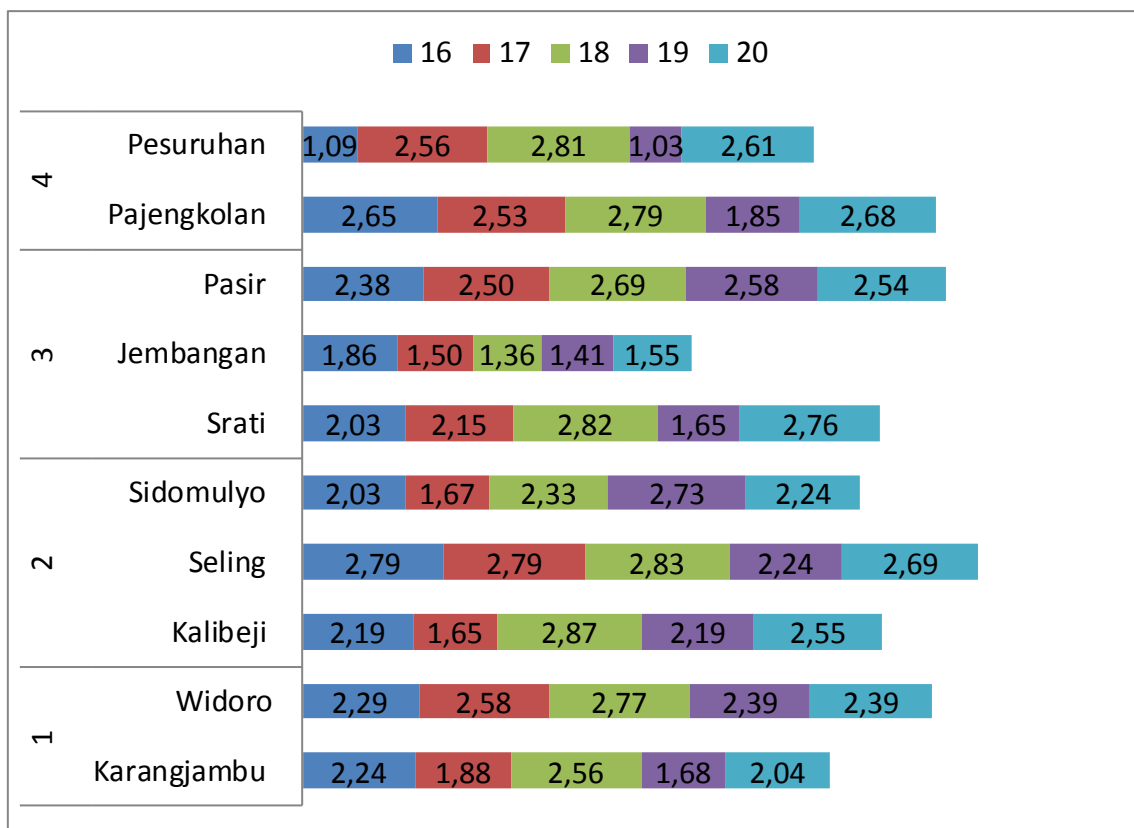
yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa dengan tipologi wisata dalam indikator keberfungsian pemerintah desa dalam prakarsa kegiatan pengembangan ekonomi lokal.

Selanjutnya akan di sajikan indikator 16-20 sebagai berikut :

- 16. Evaluasi penyelenggaraan pengembangan ekonomi lokal.
- 17. Sumber keuangan ekonomi lokal.
- 18. Transparansi penyelenggaraan ekonomi lokal.
- 19. Keberterimaan dan keberfungsian terhadap pengembangan ekonomi lokal.
- 20. Keberfungsian Pemdes dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.

Grafik 4.8

Lima Indikator dalam Sub Dimensi Pelaksanaan (4)



Sumber: Data Peneliti, 2015

16. Indikator Evaluasi Penyelenggaraan Ekonomi Lokal

Dari grafik dapat diketahui bahwa desa dengan nilai skor paling tinggi untuk indikator ini adalah Desa Seling. Sedangkan desa dengan nilai skor yang paling rendah adalah Desa Pesuruhan. Mengacu pada tabel kriteria rentang skor diketahui bahwa nilai tertinggi tersebut berada dalam kategori interdependen, sedangkan nilai terendah berada dalam kategori dependen.

Mengacu pada tipologi desa, diketahui bahwa desa dengan nilai skor paling tinggi merupakan desa dengan tipologi UMKM, sedangkan desa dengan nilai skor terendah adalah desa dengan

tipologi pertanian. Dapat dikatakan bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa dengan tipologi pertanian dalam indikator evaluasi pengembangan ekonomi lokal.

17. Indikator Sumber Keuangan Ekonomi Lokal

Selanjutnya adalah indikator 17 mengenai sumber keuangan ekonomi lokal. Dari grafik diketahui bahwa desa dengan nilai paling tinggi adalah Desa Widoro, sedangkan desa dengan nilai terendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel kriteria rentang skor diketahui bahwa nilai skor tersebut termasuk kategori interdependen, sedangkan nilai terendah berada dalam kategori dependen.

Mengacu pada tipologi desa diketahui bahwa desa dengan nilai skor tertinggi merupakan desa dengan tipologi perdagangan dan jasa, sedangkan desa dengan nilai skor yang paling rendah adalah desa dengan tipologi wisata. Dapat dikatakan bahwa desa dengan tipologi perdagangan dan jasa memiliki nilai skor yang lebih tinggi dibanding dengan desa dengan tipologi pariwisata dalam indikator sumber keuangan pengembangan ekonomi lokal.

18. Indikator Transparansi Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Lokal

Dari grafik dapat dilihat bahwa desa dengan nilai skor paling tinggi dalam indikator transparansi penyelenggaraan pengembangan ekonomi lokal adalah Desa Kalibeji, sedangkan desa dengan nilai skor yang paling rendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel kriteria rentang skor diketahui bahwa nilai tersebut berada dalam kategori interdependen, sedangkan nilai skor terendah berada dalam kategori dependen.

Mengacu pada tipologi desa, diketahui bahwa desa dengan nilai skor tertinggi adalah desa dengan tipologi UMKM, sedangkan dengan desa nilai skor paling rendah adalah desa dengan tipologi wisata. Hal ini berarti bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibanding desa dengan tipologi wisata.

19. Indikator Keberterimaan dan Keberfungsian Pengembangan Ekonomi Lokal

Dari grafik diketahui bahwa desa dengan nilai skor yang paling tinggi adalah Desa Sidomulyo sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel kriteria rentang skor diketahui bahwa nilai tertinggi tersebut berada dalam kategori interdependen, sedangkan desa dengan nilai terendah berada dalam kategori dependen.

Mengacu pada tipologi desa, bahwa desa dengan nilai skor tertinggi dengan tipologi UMKM sedangkan yang terendah adalah tipologi wisata. Dapat dikatakan bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibanding dengan tipologi wisata.

20. Keberfungsian Pemerintah Desa (Pemdes) dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dari grafik diketahui bahwa desa dengan nilai skor yang paling tinggi adalah Desa Srati, sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel

kriteria rentang skor diketahui bahwa nilai tertinggi tersebut berada dalam kategori interdependen sedangkan desa dengan nilai terendah berada dalam kategori dependen.

Mengacu pada tipologi desa, bahwa desa dengan nilai skor tertinggi dan terendah adalah desa dengan tipologi wisata. Dapat dikatakan bahwa desa dengan tipologi wisata mempunyai keragaman yang lebih dibandingkan dengan desa lainnya.

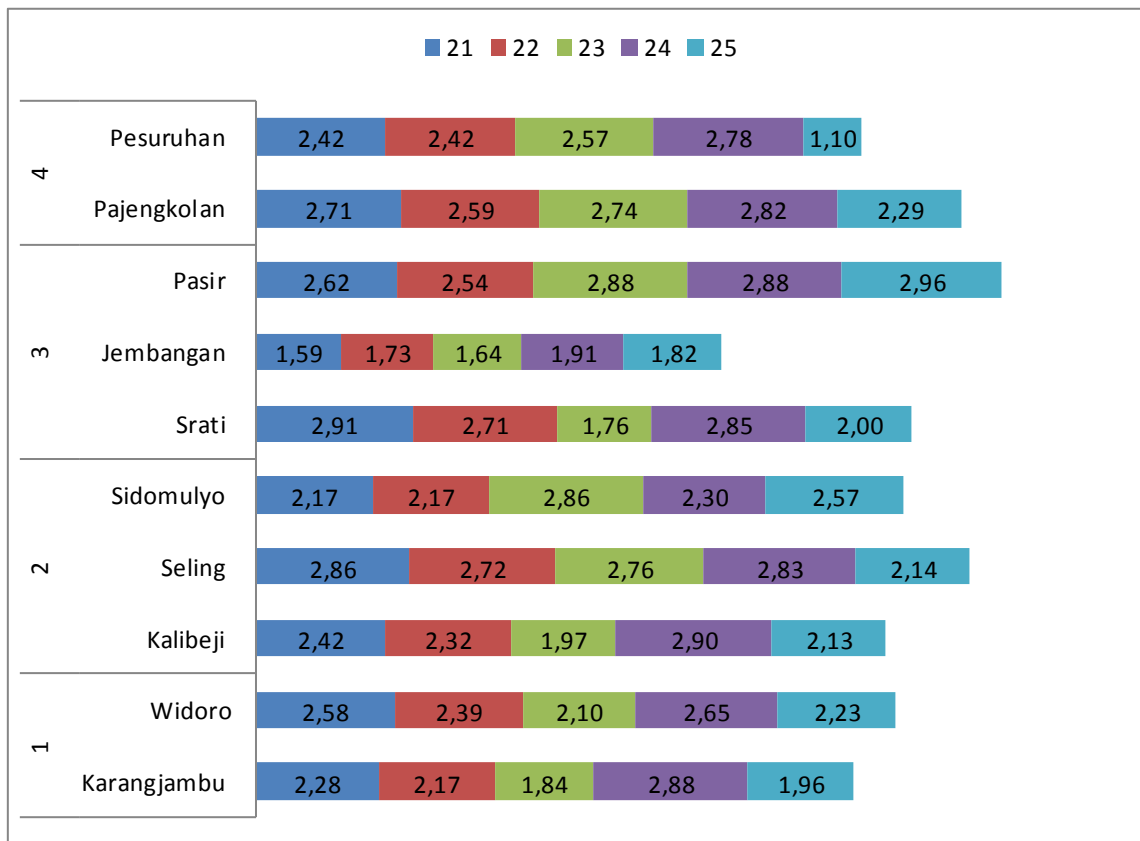
Selanjutnya akan disajikan indikator 21-25 sebagai berikut :

21. Ketersediaan (prakarsa) kegiatan pemberdayaan masyarakat.
22. evaluasi terhadap pemberdayaan masyarakat.
23. Sumber keuangan pemberdayaan masyarakat.
24. Transparansi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
25. Keberterimaan dan keberfungsian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lengkapnya disajikan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 4.9

Lima Indikator dalam Sub Dimensi Pelaksanaan (5)



Sumber: Data Peneliti, 2015

21. Indikator Ketersediaan Pemerintah dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dari grafik di atas diketahui bahwa desa dengan nilai skor yang paling tinggi adalah Desa Sрати sedangkan desa nilai skor yang paling rendah adalah desa Jembangan. Mengacu pada tabel kriteria rentang skor dapat diketahui bahwa nilai tertinggi tersebut berada dalam kategori interdependen, sedangkan nilai yang paling rendah berada pada kategori independen.

Mengacu pada tipologi desa, bahwa desa dengan nilai skor yang paling tinggi dan terendah tersebut merupakan desa dengan tipologi wisata. Dapat dikatakan bahwa desa dengan tipologi wisata mempunyai keragaman yang lebih banyak di banding desa lainnya dalam indikator ketersediaan pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

21. Indikator Evaluasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Dari grafik tersebut diketahui bahwa desa dengan nilai skor paling tinggi dalam indikator evaluasi terhadap pemberdayaan masyarakat adalah Pejengkolan, sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Desa Jembangan. Mengacu pada tabel rentang kriteria skor diketahui bahwa nilai tertinggi tersebut berada dalam ketgori interdependen sedangkan nilai terendah tersebut berada dalam kategori independen.

Mengacu pada tipologi desa, bahwa desa dengan nilai skor yang paling tinggi merupakan desa dengan tipologi pertanian, sedangkan desa dengan nilai skor terendah adalah desa

dengan tipologi wisata. Dapat dikatakan bahwa desa dengan kriteria pertanian mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibanding dengan dengan tipologi wisata.

22. Indikator Sumber Keuangan Pemberdayaan Masyarakat

Dari grafik tersebut diketahui bahwa desa dengan nilai skor paling tinggi dalam indikator sumber keuangan pemberdayaan masyarakat adalah Pasir, sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Desa Jembatan. Mengacu pada tabel rentang kriteria skor di ketahui bahwa nilai tertinggi tersebut berada dalam ketgori interdependen, sedangkan nilai terendah tersebut berada dalam kategori independen.

Mengacu pada tipologi desa, bahwa desa dengan nilai skor yang paling tinggi dan terendah merupakan desa dengan tipologi wisata. Dapat dikatakan bahwa desa dengan tipologi wisata mempunyai keragaman yang lebih banyak dibandingkan dengan desa lainya dalam indikator sumber keuangan pemberdayaan masyarakat.

23. Indikator Transparansi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat

Dari grafik tersebut diketahui bahwa desa dengan nilai skor paling tinggi dalam indikator transparansi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat adalah Kalibeji, sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Desa Jembatan. Mengacu pada tabel rentang kriteria skor diketahui bahwa nilai tertinggi tersebut berada dalam kategori interdependen, sedangkan nilai terendah tersebut berada dalam kategori independen.

Mengacu pada tipologi desa, desa dengan nilai skor tertinggi adalah desa dengan tipologi UMKM sedangkan desa dengan nilai skor yang paling rendah adalah desa Wisata. Dapat dikatakan bahwa desa dengan tipologi UMKM mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibandingkan desa dengan tipologi wisata.

24. Indikator Kebeterimaan dan Keberfungsian Pemberdayaan Masyarakat

Dalam indikator kebeterimaan dan keberfungsian pemberdayaan masyarakat, desa dengan nilai skor paling tinggi adalah Desa Pasir, sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah Pesuruhan. Mengacu pada tabel rentang skor diketahui nilai skor tertinggi tersebut berada dalam kategori interdependen, sedangkan nilai terendah berada dalam kategori dependen.

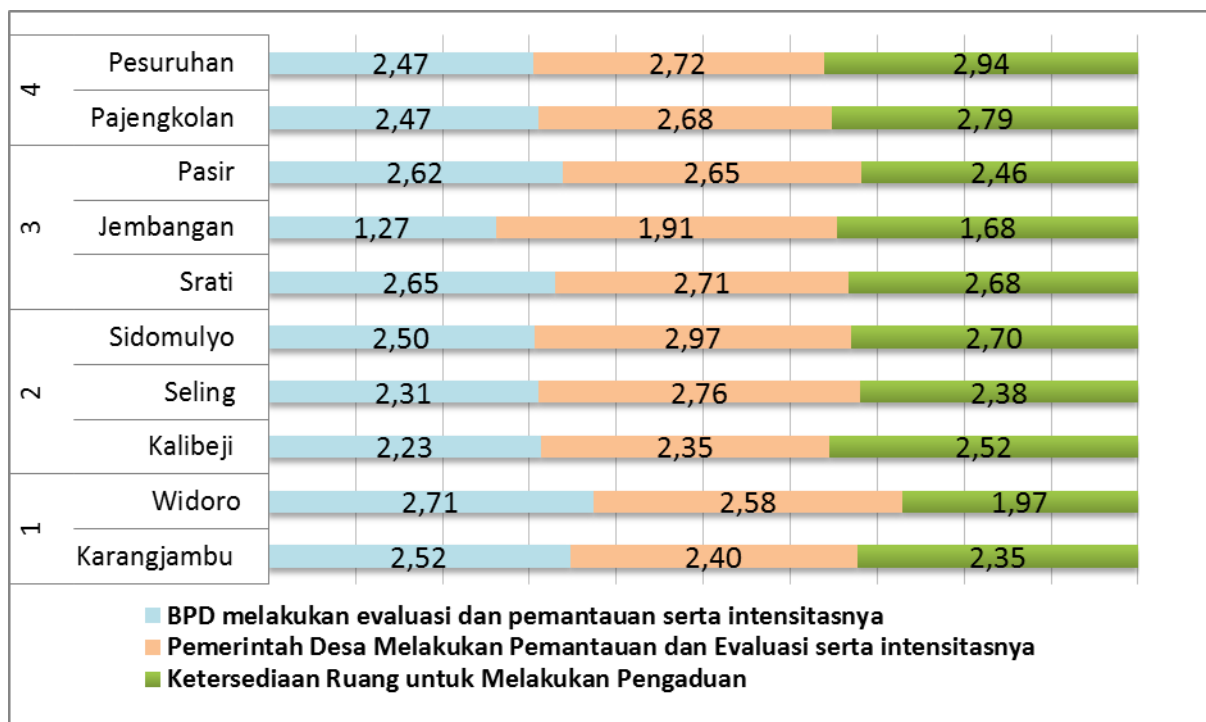
Mengacu pada tipologi desa diketahui bahwa desa dengan nilai skor tertinggi tersebut merupakan desa dengan tipologi wisata sedangkan desa dengan nilai skor paling rendah adalah desa dengan tipologi pertanian. Dapat di katakan bahwa desa dengan tipologi wisata mempunyai nilai skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan dengan tipologi pertanian untuk indikator kebeterimaan dan keberfungsian pemberdayaan masyarakat.

4.2.5 Sub-dimensi Pengawasan dan Evaluasi

Sub-dimensi pengawasan dan evaluasi digambarkan dalam tiga indikator, yakni BPD melakukan evaluasi dan pemantauan serta intensitasnya; pemerintah desa melakukan pemantauan dan evaluasi serta intensitasnya; dan ketersediaan ruang untuk melakukan pengaduan. Indikator-indikator tersebut menggambarkan fakta yang ada di lapangan, tetapi dalam pengumpulan data, setiap responden memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda sehingga menghasilkan jawaban yang beragam. Grafik di bawah ini menggambarkan skor masing-masing indikator di sepuluh desa.

Grafik 4.10

Tiga Indikator Sub Dimensi Pengawasan dan Evaluasi



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Indikator Evaluasi dan Pemantauan yang Dilakukan oleh BPD serta Intensitasnya

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa skor tertinggi dari indikator evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh BPD serta intensitasnya dimiliki oleh Widoro dengan skor 2,71 (*interdependent*), sedangkan skor terendah dimiliki oleh Jembangan (1,27-*dependent*). Dalam indikator ini, terdapat dua desa yang tergolong dalam kategori *independent* yakni Desa Kalibeji (2,23) dan Desa Seling (2,31). Ditinjau dari tipologi desa, desa pertanian memiliki skor yang sama yakni sebesar 2,47. Desa Perdagangan dan Jasa memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya.

2. Indikator Pemantauan dan Evaluasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa serta Intensitasnya

Dalam indikator pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa serta intensitasnya, Desa Sidomulyo adalah desa yang memiliki skor tertinggi yakni 2,97 (*interdependent*), sedangkan desa yang memiliki skor terendah adalah Desa Jembangan (1,91-*independent*). Ditinjau dari sudut pandang tipologi desa, desa UMKM memiliki kecenderungan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya.

3. Indikator Ketersediaan Ruang untuk Melakukan Pengaduan

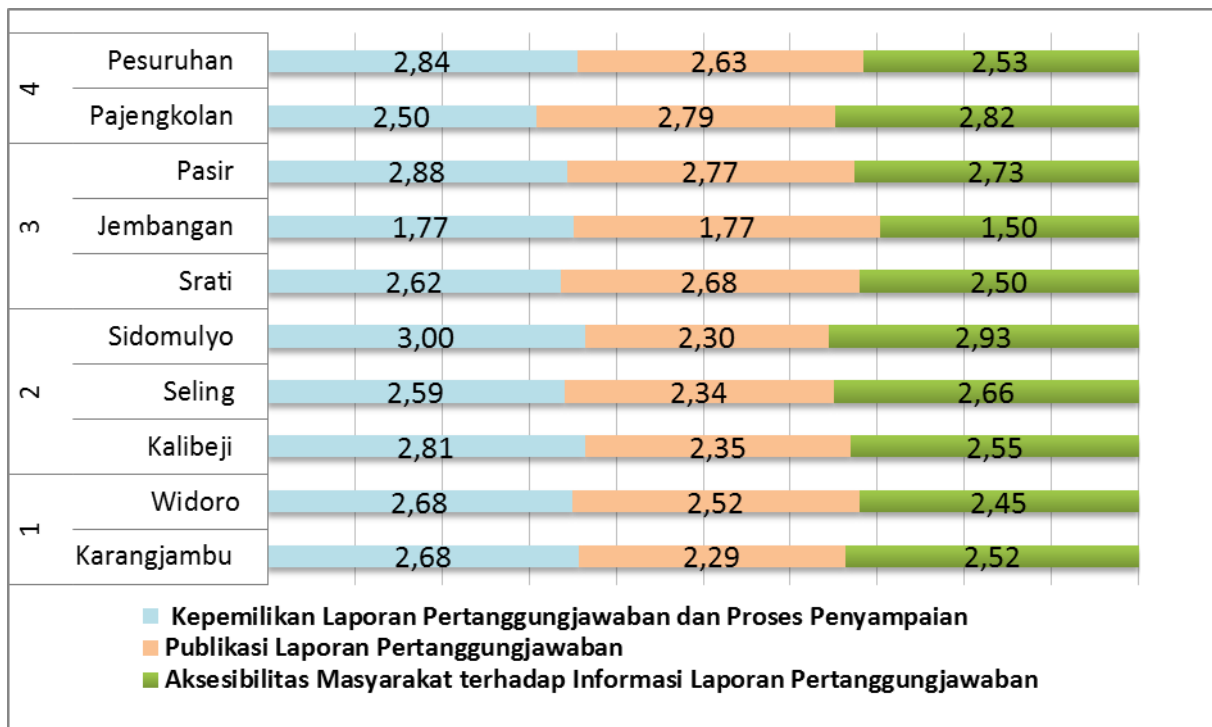
Grafik tersebut juga menggambarkan ketersediaan ruang untuk melakukan pengaduan. Desa Pesuruhan adalah desa yang memiliki skor tertinggi dalam indikator ini (2,94-*interdependent*), sedangkan desa yang memiliki skor terendah adalah Jembangan (1,68-*independent*). Dilihat dari tipologi desa, Desa Pertanian adalah desa yang memiliki kecenderungan skor lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya.

4.2.6 Sub-dimensi Pertanggungjawaban

Sub-dimensi pertanggungjawaban digambarkan dalam tiga indikator, yakni kepemilikan laporan pertanggungjawaban dan proses penyampaian; pulikasi laporan pertanggungjawaban; dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi laporan pertanggungjawaban. Walaupun indikator-indikator tersebut menggambarkan fakta yang ada di lapangan, tetapi informasi yang diperoleh dari masing-masing responden di masing-masing desa beragam karena setiap responden memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda sehingga menghasilkan jawaban yang beragam. Grafik di bawah ini menggambarkan skor masing-masing indikator di sepuluh desa.

Grafik 4.11

Tiga Indikator Sub Dimensi Pertanggungjawaban



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Indikator Kepemilikan Laporan Pertanggungjawaban dan Proses Penyampaian

Berdasarkan grafik di atas, Desa Sidomulyo memiliki skor tertinggi dalam indikator kepemilikan laporan pertanggungjawaban dan proses penyampaian (3,00-*interdependent*). Di sisi lain, skor terendah dimiliki oleh Desa Jembangan yakni sebesar 1,77 (*independent*). Dilihat dari tipologi desa, Desa UMKM adalah desa yang memiliki kecenderungan skor lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya.

2. Indikator Publikasi Laporan Pertanggungjawaban

Dalam indikator publikasi laporan pertanggungjawaban, Desa Pajengkolan adalah desa yang memiliki skor tertinggi yakni sebesar 2,79 (*interdependent*), sedangkan Desa Jembangan adalah desa yang memiliki skor terendah yakni sebesar 1,77 (*independent*). Berdasarkan tipologi desa, Desa Pertanian adalah desa yang memiliki kecenderungan skor lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya.

3. Indikator Aksesibilitas Masyarakat terhadap Informasi Laporan Pertanggungjawaban

Skor tertinggi dalam indikator aksesibilitas masyarakat terhadap informasi laporan pertanggungjawaban dimiliki oleh Sidomulyo dengan skor 2,93 (*interdependent*), sedangkan Desa Jembangan adalah desa yang memiliki skor terendah (1,50-*dependent*). Ditinjau dari tipologi desa, desa UMKM adalah desa yang memiliki skor kecenderungan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.

4.3 Analisis Kelembagaan Sosial dalam Indeks Kemandirian di Sepuluh Desa

Hasil pengukuran Indeks Kemandirian Desa (IKD) pada Dimensi Kelembagaan Sosial pada sepuluh desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tahun 2015 menunjukkan bahwa status kemandirian desa pada Dimensi Kelembagaan Sosial berada pada kategori independen yang mulai mengarah ke kategori interdependen. Skor yang diperoleh tiap desa pada Dimensi Kelembagaan Sosial ini berkisar antara 2,06 sampai 2,69.

Tabel 4.2
Peringkat Status Kemandirian Desa pada Dimensi Kelembagaan Sosial

Desa	Tipologi Desa	Skor	Kategori	Peringkat Dimensi Kelembagaan Sosial
Karangjambu	1. Desa Perdagangan dan Jasa	2,21	Independen	8
Widoro		2,36	Interdependen	4
Kalibeji	2. Desa UMKM/ Usaha Menengah Kecil Masyarakat	2,28	Independen	5
Seling		2,68	Interdependen	2
Sidomulyo		2,07	Independen	9
Srati	3. Desa Wisata	2,42	Interdependen	3
Jembangan		2,06	Independen	10
Pasir		2,69	Interdependen	1
Pajengkolan	4. Desa Pertanian	2,24	Independen	6
Pesuruhan		2,23	Independen	7

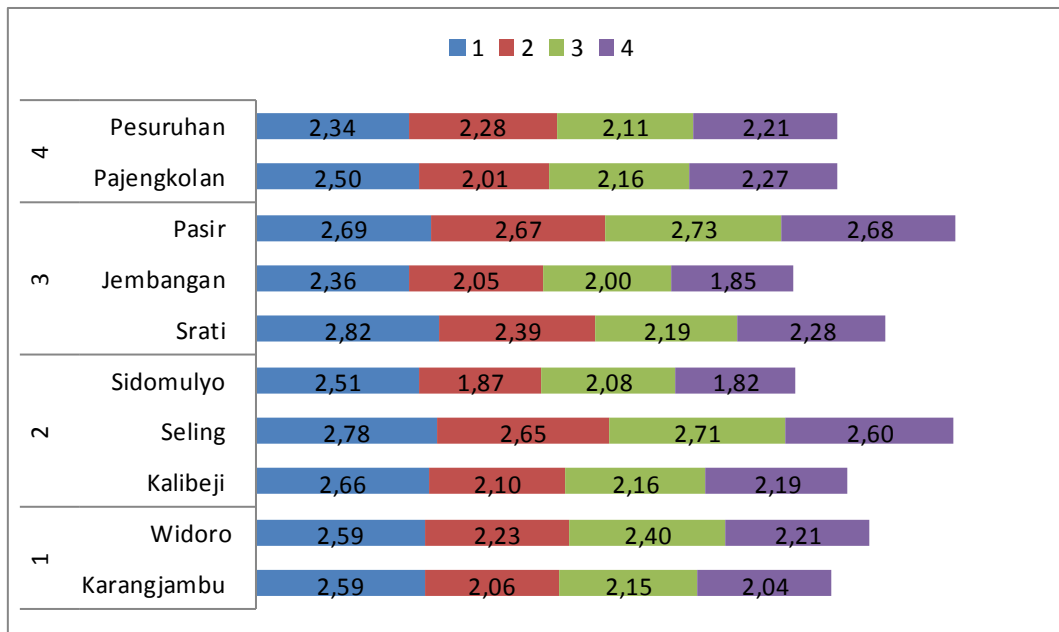
Sumber: Data Peneliti, 2015

Desa yang memiliki skor terendah atau posisi terbawah pada Dimensi Kelembagaan Sosial adalah Desa Jembangan, dengan skor 2,06, yang merupakan desa dengan karakter atau tipologi desa pertanian yang sudah mengarah pada desa wisata. Pada urutan berikutnya adalah Desa Sidomulyo, dengan skor 2,07, yang merupakan desa dengan tipologi desa pertanian yang sudah mengarah pada desa UMKM. Kedua desa di atas berada pada kategori independen, atau dapat diartikan bahwa kelembagaan sosial kedua desa di atas sudah mandiri dan mampu menjalankan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan lembaga sendiri maupun berkontribusi pada kepentingan umum warga desa.

Sedangkan desa dengan skor tertinggi pada Dimensi Kelembagaan Sosial adalah Desa Pasir, dengan skor 2,69, yang merupakan desa dengan tipologi desa pesisir yang sudah berkembang menjadi desa wisata. Pada urutan berikutnya adalah Desa Seling, dengan skor 2,68, yang merupakan desa dengan tipologi desa pertanian yang sudah berkembang menjadi desa UMKM. Kedua desa di atas berada pada kategori interdependen, yang dapat diartikan bahwa kelembagaan sosial yang ada di desa tidak hanya mandiri dan mampu menjalankan fungsinya dengan berkontribusi positif bagi lingkup lembaga sosial dan warga desanya saja namun telah mampu berkontribusi positif hingga lingkup luar desa.

Sebaran hasil pengukuran terhadap Dimensi Kelembagaan Sosial ditunjukkan oleh Tabel 2.1 di bawah ini. Keempat subdimensi dalam Dimensi Kelembagaan Sosial ditunjukkan dalam warna yang berbeda, yaitu warna biru untuk skor Subdimensi Keaktifan Warga, warna merah untuk skor Subdimensi Tingkat Organisasi, warna hijau untuk skor Subdimensi Nilai-nilai, sedangkan warna ungu untuk skor Subdimensi Dampak.

Tabel 4.12
Skor Masing-Masing Sub Dimensi Kelembagaan Sosial



Sumber: Data Peneliti, 2015

Nilai tertinggi dari kesepuluh desa dalam Subdimensi Keaktifan Warga adalah Desa Srati (2,82) yang berarti berada pada kategori interdependen. Berikutnya adalah Desa Seling (2,78) yang berada pada kategori interdependen, Desa Seling merupakan desa dengan tipologi desa pegunungan dan pesisir yang sudah berkembang menjadi desa wisata. Sedangkan desa yang memiliki skor terendah adalah Desa Pesuruhan (2,34) yang berada pada kategori independen. Desa Pesuruhan merupakan desa dengan tipologi pertanian. Skor terendah dalam Subdimensi Keaktifan Warga berikutnya adalah Desa Jembangan, (2,36) atau berada pada kategori interdependen. Yang dapat diartikan bahwa situasi keaktifan warga dalam bidang kelembagaan sosial di Desa Jembangan telah mampu memberikan kontribusi positif hingga ke lingkup luar desa.

Nilai tertinggi dari kesepuluh desa dalam Subdimensi Tingkat Organisasi diperlihatkan oleh Desa Pasir (2,67) dan berikutnya Desa Seling (2,65), keduanya berada pada kategori interdependen. Dapat diartikan bahwa organisasi lembaga sosial yang ada di Desa Pasir dan Desa Seling sudah dikelola dengan baik, dari sisi kestabilan dan kematangan organisasi, serta mampu menjalankan fungsinya secara mandiri bukan saja untuk kepentingan umum warga desanya namun hingga ke lingkup luar desanya. Sedangkan nilai terendah dari kesepuluh desa dalam Subdimensi Tingkat Organisasi adalah Desa Sidomulyo (1,87) dan berikutnya

adalah Desa Pajengkolan (2,01), kedua desa tersebut berada pada kategori independen. Desa Pajengkolan adalah desa dengan tipologi pegunungan yang basis mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah dari pertanian. Situasi ini dapat diartikan bahwa organisasi lembaga sosial di Desa Sidomulyo dan Desa Pajengkolan sudah dikelola dengan baik serta mampu menjalankan fungsinya secara mandiri untuk kepentingan umum warga desanya.

Pada Subdimensi nilai-nilai, desa yang memiliki nilai tertinggi adalah Desa Pasir (2,73) dan berikutnya adalah Desa Seling (2,71). Kedua desa tersebut berada pada kategori interdependen, atau dapat dikatakan bahwa kelembagaan sosial di desa sudah mampu memperluas pengaruh baik dalam hal promosi ataupun praktik nilai hingga ke lingkup luar desa. Adapun desa yang memiliki nilai terendah adalah Desa Jembangan (2,00) dan Desa Pesuruhan (2,11) dimana keduanya masuk dalam kategori independen. Dalam arti, kelembagaan sosial yang ada di desa Jembangan dan Desa Pesuruhan telah mampu memberikan kontribusi positif dalam hal mempromosikan nilai atau mempraktekkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh lembaga dan aktor-aktor lembaga sosial ke lembaga lainnya serta warga masyarakat di lingkup desa.

Skor tertinggi pada Subdimensi Dampak diperlihatkan Desa Pasir (2,68) dan Desa Seling (2,60), keduanya berada pada kategori interdependen. Situasi tersebut dapat diartikan bahwa keberadaan dan kerja-kerja lembaga sosial di Desa Pasir dan Desa Seling tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi warga di lingkup desa namun hingga lingkup luar desa. Sedangkan nilai terendah dalam Subdimensi Dampak diperlihatkan Desa Sidomulyo (1,82) dan berikutnya adalah Desa Jembangan (1,85), keduanya berada dalam kategori independen. Yang mana dapat diartikan bahwa keberadaan dan kerja-kerja yang dilakukan oleh lembaga sosial di Desa Sidomulyo dan Desa Jembangan baru dirasakan manfaatnya oleh warga di lingkup desanya.

Pada tabel 2.1, diperlihatkan bahwa subdimensi yang paling berpengaruh pada status kemandirian Dimensi Kelembagaan Sosial adalah Subdimensi Keaktifan Warga. Dimana sembilan dari sepuluh desa mempunyai nilai Subdimensi Keaktifan Warga yang lebih tinggi dibanding ketiga subdimensi lainnya. Kecuali Desa Pasir yang nilai tertinggi justru dikontribusikan dari nilai Subdimensi Nilai-nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai dari ketiga subdimensi lainnya. Sedangkan subdimensi yang paling kecil kontribusinya terhadap status kemandirian Dimensi Kelembagaan Sosial adalah Subdimensi Dampak dan Subdimensi Tingkat Organisasi. Situasi ini diperlihatkan oleh adanya empat desa yang mempunyai nilai Subdimensi Dampak yang lebih rendah dibanding nilai ketiga subdimensi lainnya. Serta adanya empat desa lainnya yang memiliki nilai Subdimensi Tingkat Organisasi yang lebih rendah dibanding nilai ketiga subdimensi lainnya. Situasi ini dapat dimaknai bahwa keaktifan warga dinilai sebagai hal yang mendasar atau penting bagi tumbuhnya kemandirian kelembagaan sosial di desa. Disisi lain, tingkat organisasi serta dampak kerja masih kurang mendapat perhatian yang memadai baik oleh aktor-aktor lembaga sosial sendiri, lembaga-lembaga lain yang ada di desa, serta oleh warga desa.

4.4 Analisis Masing-Masing Indikator dalam Dimensi Kelembagaan Sosial di Sepuluh Desa

Dalam sub bab ini akan dijelaskan masing-masing indikator di sub dimensi keaktifan warga, tingkat organisasi, nilai-nilai, dan dampak. Sepuluh desa tersebut digolongkan dalam empat tipologi desa yakni (1) perdagangan dan jasa; (2) UMKM; (3) Wisata; dan (4) Pertanian. Desa yang tergolong dalam perdagangan dan jasa adalah Karangjambu dan Widoro, sedangkan Desa Kalibeji, Seling, dan Sidomulyo adalah desa yang tergolong dalam desa UMKM. Di sisi lain, desa yang tergolong dalam desa Wisata adalah Sрати, Jembangan, dan Pasir, sedangkan desa yang tergolong dalam desa Pertanian adalah Pajengkolan dan Pesuruhan.

4.4.1 Sub-Dimensi Keaktifan Warga

Pengukuran Dimensi Kelembagaan Sosial pada Subdimensi Keaktifan Warga di sepuluh desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada tahun 2015 menunjukkan bahwa status kemandirian desa pada Subdimensi Keaktifan Warga berada pada kategori interdependen. Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa sembilan dari sepuluh desa memperoleh skor 2,36 sampai 2,82 atau berada pada kategori interdependen, sedangkan satu desa yaitu Desa Pesuruhan memperoleh skor 2,34 atau berada pada kategori independen. Desa yang memperoleh nilai tertinggi pada Subdimensi Keaktifan Warga adalah Desa Sрати dengan skor 2,82, dan berikutnya adalah Desa Seling dengan skor 2,78. Kedua desa tersebut berada dalam kategori interdependen.

Tabel 4.3
Peringkat Status Kemandirian Desa pada Subdimensi Keaktifan Warga

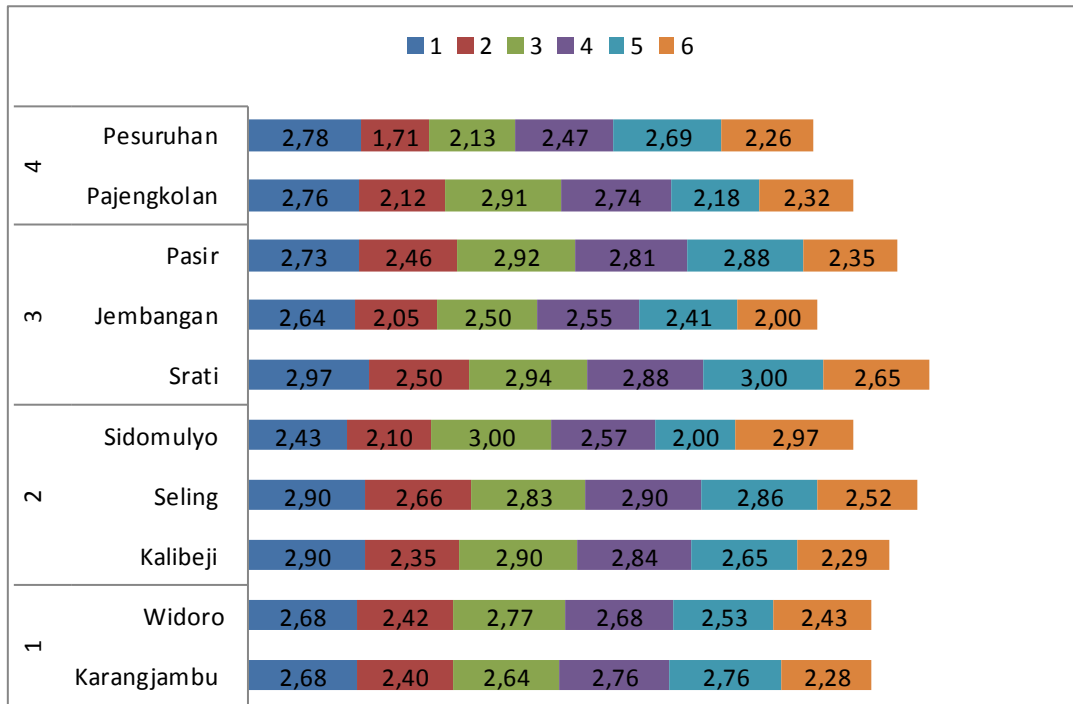
Desa	Tipologi Desa	Skor	Kategori	Peringkat Dimensi Kelembagaan Sosial
Karangjambu	1. Desa Perdagangan dan Jasa	2.59	Interdependen	5
Widoro		2.59	Interdependen	6
Kalibeji	2. Desa UMKM/ Usaha Menengah Kecil Masyarakat	2.66	Interdependen	4
Seling		2.78	Interdependen	2
Sidomulyo		2.51	Interdependen	7
Sрати	3. Desa Wisata	2.82	Interdependen	1
Jembangan		2.36	Interdependen	9
Pasir		2.69	Interdependen	3
Pajengkolan	4. Desa Pertanian	2.50	Interdependen	8
Pesuruhan		2.34	Independen	10

Sumber : Data Peneliti, 2015

Subdimensi Keaktifan Warga terdiri dari enam indikator yaitu keterlibatan sosial warga, keterlibatan politik warga, keanekaragaman lembaga sosial, Keterlibatan dalam bidang sosial,

keterlibatan dalam bidang politik serta aksi kolektif lembaga. Sebaran nilai untuk keenam indikator dalam Subdimensi Keaktifan Warga dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Grafik 4.13
Enam Indikator Subdimensi Keaktifan Warga



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Indikator Keterlibatan Sosial Warga

Indikator keterlibatan sosial warga berkisar pada nilai 2,43 sampai 2,97, dan nilai paling tinggi terdapat pada Desa Srati dengan nilai 2,94 atau berada pada kategori interdependen. Berikutnya adalah Desa Seling dan Desa Kalibeji yang sama-sama memperoleh nilai 2,90, yang berarti berada pada kategori interdependen. Sedangkan nilai indikator keterlibatan sosial warga yang paling rendah adalah Desa Sidomulyo dengan nilai 2,43 atau berada pada kategori interdependen.

Beberapa bentuk keterlibatan warga secara sosial di sepuluh desa di Kabupaten Kebumen dalam pengukuran Indeks Kemandirian Desa 2015 adalah forum rutin bernuansa keagamaan seperti kegiatan yasinan, senenan (pengajian tiap hari senin), manisan (kegiatan pengajian setiap hari pasaran Legi) dan pengajian. Keterlibatan lainnya yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sosial di desa adalah dalam kegiatan takziah, arisan, kerja bakti, menengok orang sakit, serta memberikan santunan pada anak yatim. Di beberapa desa mempunyai tradisi yang khas sebagai ruang solidaritas sosial seperti sumbang surung (memberikan sumbangan bagi warga yang terkena musibah), sambatan (gotong-royong dalam memperbaiki

rumah warga). Dalam tradisi sambatan, bukan hanya kaum laki-laki yang bergotong-royong menyumbangkan tenaga namun kaum perempuan pun turut bergabung membuat masakan untuk dimakan bersama-sama.

2. Indikator Keterlibatan Politik Warga

Indikator keterlibatan politik warga berkisar pada nilai 1,71 hingga 2,66, lebih rendah dibanding dengan kisaran nilai pada indikator keterlibatan sosial warga. Nilai yang paling tinggi terdapat pada Desa Seling dengan nilai 2,66 dan berikutnya adalah Desa Srati dengan nilai 2,50. Keduanya berada pada kategori interdependen. Sedangkan nilai untuk indikator keterlibatan politik warga yang terendah adalah Desa Pesuruhan dengan nilai 1,71 dan Desa Sidomulyo dengan nilai 2,10. Keduanya berada pada kategori independen.

Beberapa bentuk keterlibatan politik warga sepuluh desa dalam pengukuran Indeks Kemandirian Desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah adalah terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan mulai dari tingkat dusun, RT hingga desa (Musrenbang Dusun dan Musrenbang Desa); dan menyampaikan usul sesuai kepentingan lembaga masing-masing serta mempertanyakan kebijakan pemerintah desa dalam forum musrenbang; menyampaikan usul, masukan dalam forum internal di lembaganya masing-masing.

3. Indikator Keanekaragaman Lembaga Sosial

Indikator keanekaragaman lembaga sosial berkisar pada nilai 2,13 hingga 3,00 yang mana kesembilan desa berada pada kategori interdependen dengan skor antara 2,50 hingga 3,00. Sementara satu desa berada pada kategori independen yaitu Desa Pesuruhan (2,13) atau yang dapat diartikan bahwa lembaga sosial yang ada di desa cukup beragam atau setidaknya ada 3 macam lembaga sosial di desa. Nilai tertinggi pada indikator keanekaragaman lembaga sosial adalah Desa Sidomulyo dengan nilai 3,00 dan berikutnya adalah Desa Srati dengan nilai 2,94, yang dapat diartikan bahwa terdapat lebih dari tiga ragam lembaga sosial di desa. Sedangkan desa yang memperoleh nilai terendah setelah Desa Pesuruhan adalah Desa Jembangan dengan nilai 2,50.

Beberapa bentuk lembaga sosial yang menjadi ruang keterlibatan sosial warga di desa cukup beragam mulai dari PKK, Posyandu serta PAUD kemudian organisasi seperti Muslimat NU, Majelis Ta'lim, Karang Taruna, Forum Anak, Forum Lansia, dan kelompok sepak bola. Di beberapa juga terdapat kelompok-kelompok anak muda sebagai perluasan karang taruna seperti kelompok pemuda perantau, kelompok sinoman (perkumpulan pemuda-pemudi yang membantu menyajikan makanan saat acara pernikahan, kemudian di Desa Pajengkolan terdapat organisasi GIMAP atau generasi muda Pajengkolan. Terdapat pula beragam kelompok seni budaya seperti kelompok Kesenian kuda lumping, kelompok kesenian rebana serta kelompok kesenian angklung.

4. Indikator Keterlibatan dalam Bidang Sosial

Indikator keterlibatan dalam bidang sosial berkisar pada nilai 2,47 hingga 2,90, yang dapat diartikan bahwa sepuluh desa tersebut berada pada kategori interdependen. Nilai tertinggi adalah Desa Seling dengan nilai 2,90 dan berikutnya adalah Desa Srati dengan nilai 2,88. Sedangkan desa dengan nilai indikator paling rendah adalah Desa Pesuruhan dengan nilai 2,47 dan berikutnya adalah Desa Jembangan dengan nilai 2,55. Situasi dengan kategori interdependen dapat diartikan bahwa lembaga sosial yang ada di desa telah aktif terlibat dalam kegiatan sosial baik tidak saja untuk kepentingan anggotanya saja namun juga untuk kepentingan warga secara umum dan lingkungannya.

5. Indikator Keterlibatan dalam Bidang Politik

Indikator keterlibatan dalam bidang politik berkisar antara nilai 2,00 hingga 3,00. Dari kesepuluh desa, terdapat dua desa yang berada pada kategori independen yaitu Desa Sidomulyo dengan nilai 2,00 serta Desa Pajengkolan dengan nilai 2,18. Situasi ini dapat diartikan bahwa lembaga sosial yang ada di desa aktif terlibat dalam forum pengambilan keputusan dengan membawa kepentingan isu sektoral lembaganya.

Nilai tertinggi pada indikator keterlibatan dalam bidang politik adalah Desa Srati dengan nilai 3,00 dan berikutnya adalah Desa Pasir dengan nilai 2,88. Kedua desa tersebut berada pada kategori interdependen yang dapat diartikan bahwa lembaga sosial yang ada di desa aktif terlibat dalam forum pengambilan keputusan tidak hanya membawa kepentingan isu sektoral lembaganya saja, namun juga kepentingan warga desa atau kepentingan bersama di tingkat desa.

6. Indikator Aksi Kolektif Lembaga

Indikator aksi kolektif lembaga berkisar pada nilai 2,00 hingga 2,97, yang berarti berada pada kategori independen hingga interdependen. Desa dengan nilai indikator tertinggi adalah Desa Sidomulyo dengan nilai 2,97 dan berikutnya adalah Desa Srati dengan nilai 2,65 dimana kedua desa berada pada kategori independen. Yang dapat diartikan bahwa lembaga sosial yang ada di desa telah mampu membangun kerja sama dengan lembaga lainnya dalam isu sektoral yang sama untuk tujuan menyelesaikan permasalahan yang dianggap penting di tingkat desa.

Nilai indikator aksi kolektif lembaga yang paling rendah adalah di Desa Jembangan dengan nilai 2,00 dan berikutnya adalah Desa Pesuruhan dengan nilai 2,26. Kedua desa ini berada pada kategori independen yang dapat diartikan bahwa lembaga sosial yang ada di desa telah mampu membangun kerja sama dengan lembaga lainnya bukan hanya karena adanya kesamaan isu sektoral namun lintas isu sektoral yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah desa secara berkesinambungan.

4.4.2 Sub-Dimensi Tingkat Organisasi

Subdimensi Tingkat Organisasi mengukur pengembangan organisasi, kompleksitas, dengan melihat relasi antara aktor lembaga sosial, yang hasil pengukurannya berkisar dari nilai 1,87 hingga 2,67, yang berarti berada pada kategori independen hingga interdependen. Pada tabel 2.5 diperlihatkan bahwa status kemandirian dari Dimensi Kelembagaan Sosial pada

Subdimensi Tingkat Organisasi di tujuh desa berada pada kategori independen sedangkan tiga desa lainnya yaitu pertama Desa Pasir (2,67), Desa Seling (2,65) dan Desa Sрати (2,39) berada pada kategori interdependen. Dimana urutan paling Desa yang status kemandiriannya berada di urutan paling bawah adalah Desa Sidomulyo dengan nilai 1,87 dan berikutnya adalah Desa Pajengkolan dengan nilai 2,01.

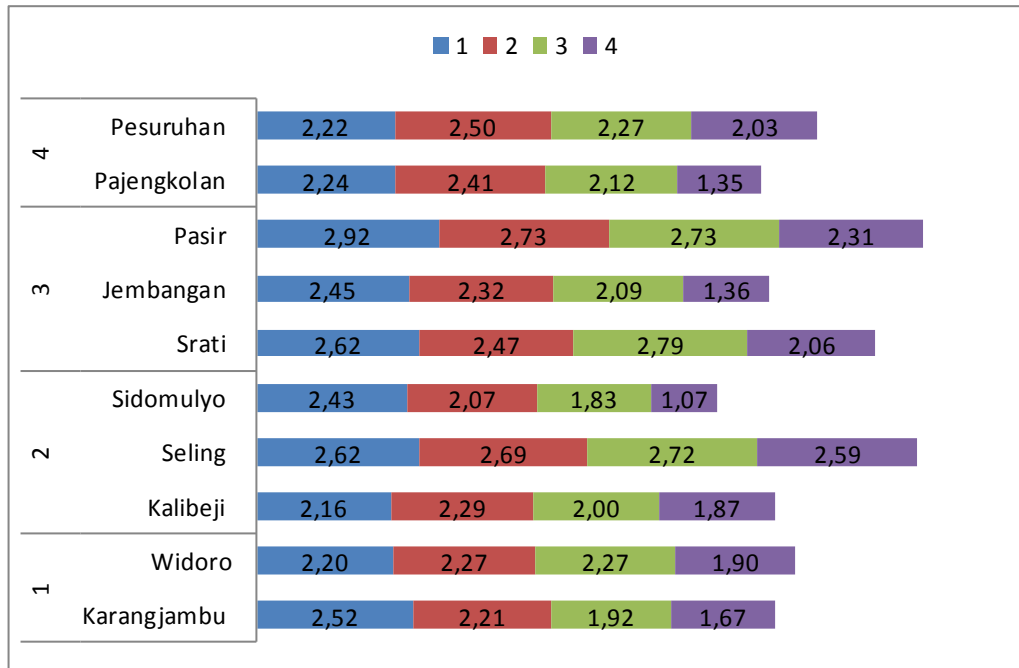
Tabel 4.4
Peringkat Status Kemandirian Desa pada Subdimensi Tingkat Organisasi

Desa	Tipologi Desa	Skor	Kategori	Peringkat Dimensi Kelembagaan Sosial
Karangjambu	1. Desa Perdagangan dan Jasa	2.06	Independen	7
Widoro		2.23	Independen	5
Kalibeji	2. Desa UMKM/ Usaha Menengah Kecil Masyarakat	2.10	Independen	6
Seling		2.65	Interdependen	2
Sidomulyo		1,87	Independen	10
Sрати	3. Desa Wisata	2.39	Interdependen	3
Jembangan		2.05	Independen	8
Pasir		2.67	Interdependen	1
Pajengkolan	4. Desa Pertanian	2.01	Independen	9
Pesuruhan		2.28	Independen	4

Sumber: Data Peneliti, 2015

Subsimensi Tingkat Organisasi terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, praktek evaluasi internal, kerja sama dan kecukupan sumber daya. Sebaran nilai untuk keempat indikator dalam Subdimensi Tingkat Organisasi dapat dilihat dalam tabel 2.6.

Grafik 4.14
Empat Indikator Subdimensi Tingkat Organisasi



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Indikator Komunikasi

Hasil penilaian pada indikator komunikasi pada Subdimensi Tingkat Organisasi di sepuluh desa di Kabupaten Kebumen berkisar antara nilai 2,16 hingga 2,92 dimana empat desa berada pada kategori independen yang dapat diartikan bahwa komunikasi rutin dan pertukaran informasi telah terjadi antar lembaga di tingkat desa mengenai isu yang sama; sedangkan enam desa lainnya berada pada kategori interdependen atau yang dapat diartikan bahwa komunikasi antar lembaga tersebut terjadi hingga ke lingkup luar desa dan mengenai isu yang beragam.

Berdasarkan pada hasil pengukuran IKD tahun 2015 pada Dimensi Kelembagaan Sosial, desa yang memiliki nilai tertinggi untuk indikator komunikasi adalah Desa Pasir dengan nilai 2,92 dan berikutnya adalah Desa Srati dan Desa Seling dengan nilai yang sama yaitu 2,62. Kedua desa tersebut berada pada kategori interdependen. Sedangkan desa dengan nilai indikator komunikasi yang terendah adalah Desa Kalibeji dengan nilai 2,16 dan berikutnya adalah Desa Pesuruhan dengan nilai 2,22, atau berada pada kategori independen.

2. Indikator Praktek Evaluasi Internal

Praktek evaluasi internal pada organisasi lembaga sosial di sepuluh desa di Kabupaten Kebumen pada pengukuran IKD tahun 2015 menunjukkan hasil yang cukupimbang, yaitu lima desa berada pada kategori independen dan lima desa lainnya berada pada kategori interdependen. Atau dapat diartikan bahwa sepuluh desa tersebut telah memiliki mekanisme evaluasi internal terhadap kerja-kerja lembaga. Kelima desa yang termasuk dalam kategori interdependen bahkan telah menjadikan hasil evaluasi internal tersebut sebagai dasar

perencanaan kerja berikutnya, serta proses evaluasi yang dipraktekkan bersifat partisipatif atau melibatkan penerima manfaat dan para pemangku kepentingan dalam organisasi tersebut.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa desa yang memiliki nilai tertinggi untuk indikator praktek evaluasi internal adalah Desa Pasir dengan nilai 2,73 dan berikutnya adalah Desa Seling dengan nilai 2,69. Kedua desa tersebut berada pada kategori interdependen. Sedangkan desa yang memiliki nilai terendah adalah Desa Sidomulyo dengan nilai 2,07 dan berikutnya adalah Desa Karangjambu dengan nilai 2,21 dimana kedua desa tersebut berada pada kategori independen.

3. Indikator Kerja sama

Hasil Indeks Kemandirian Desa tahun 2015 menunjukkan bahwa ada tujuh desa yang berada pada kategori independen atau mempunyai nilai yang berkisar antara 1,83 hingga 2,27 dan tiga desa lainnya berada pada kategori interdependen atau mempunyai nilai yang berkisar antara 2,72 hingga 2,79.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa desa yang memiliki nilai tertinggi untuk indikator kerja sama adalah desa Srati dengan nilai 2,79 dan berikutnya adalah Desa Pasir dengan nilai 2,73. Kedua desa tersebut berada pada kategori interdependen atau dapat diartikan sebagai situasi kerja sama atau jaringan kerja yang dibentuk oleh lembaga-lembaga sosial bertujuan untuk merespon isu yang dianggap penting di tingkat desa dan menyelesaikan kasus atau masalah yang dianggap penting, dan lingkungannya sudah mencakup hingga luar desa.

Sedangkan desa yang memiliki nilai terendah untuk indikator kerja sama adalah Desa Sidomulyo dengan nilai 1,83 dan berikutnya adalah Desa Karangjambu dengan nilai 1,92. Kedua desa tersebut berada pada kategori independen atau yang dapat diartikan bahwa sudah ada kerja sama atau jaringan kerja antar lembaga sosial di lingkup desa, yang bertujuan untuk merespon isu yang dianggap penting atau menyelesaikan kasus di tingkat desa.

4. Indikator Kecukupan Sumber Daya

Hasil penilaian pada indikator kecukupan sumber daya pada Subdimensi Tingkat Organisasi berkisar antara nilai 1,07 hingga 2,59. Dibandingkan dengan ketiga indikator lainnya maka kisaran nilai indikator kecukupan sumber daya adalah paling rendah. Situasi ini dapat dimaknai bahwa lembaga-lembaga sosial yang ada di kesepuluh desa di Kabupaten Kebumen dalam IKD tahun 2015 ini telah mampu melakukan interaksi dan kerja sama dalam melakukan fungsinya di tingkat desa (bahkan hingga lingkup luar desa) namun dari sisi sumber daya baik sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi masih tergantung pada pihak lain. Hal ini diperlihatkan dengan masih adanya empat desa yang mempunyai nilai berkisar antara 1,07 hingga 1,67 atau berada pada kategori dependen. Sedangkan lima desa lainnya mempunyai nilai yang berkisar antara 1,87 hingga 2,31 atau berada pada kategori independen. Atau dapat diartikan bahwa lembaga sosial di desa telah memiliki kecukupan sumber daya manusia, keuangan serta akses terhadap teknologi seperti telepon, komputer dan internet.

Nilai tertinggi untuk indikator kecukupan sumber daya adalah Desa Seling dengan nilai 2,59 atau berada pada kategori interdependen, dimana desa tidak saja mempunyai kecukupan terhadap sumber daya baik manusia, keuangan maupun teknologi namun sudah mampu mengelolanya dengan stabil dan memikirkan strategi keberlanjutan berbagai sumber daya yang dimilikinya tersebut. Berikutnya adalah Desa Pasir dengan nilai 2,31 atau berada pada kategori independen.

Sedangkan nilai terendah untuk indikator kecukupan sumber daya adalah Desa Sidomulyo dengan nilai 1,07 dan berikutnya adalah Desa Pajengkolan dengan nilai 1,35. Kedua desa tersebut berada pada kategori dependen.

4.4.3 Sub-Dimensi Nilai-Nilai

Subdimensi Nilai-nilai mengukur praktek dan promosi terhadap prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh warga desa. Nilai-nilai yang dimaksud dalam subdimensi ini adalah nilai-nilai yang diterima secara universal seperti gotong royong, anti kekerasan, toleransi, saling percaya, keadilan gender, keberlanjutan lingkungan, transparansi, akuntabilitas, pengentasan kemiskinan serta kearifan lokal yang positif atau nilai adat lainnya yang berkembang di desa. Hasil pengukuran pada Subdimensi Nilai-nilai berkisar dari nilai 2,00 hingga 2,73. Pada tabel 2.7 terlibat bahwa tujuh desa berada pada kategori independen sedangkan tiga desa lainnya berada pada kategori interdependen. Situasi ini dapat diartikan bahwa sepuluh desa dalam pengukuran IKD tahun 2015 telah mempraktekkan nilai dan prinsip yang dianggap penting serta secara pro aktif telah mulai berjejaring untuk mempromosikan nilai serta prinsip tersebut.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada Subdimensi Nilai-nilai adalah Desa Pasir dengan nilai 2,73 dan berikutnya adalah Desa Seling dengan nilai 2,71. Kedua desa tersebut berada pada kategori interdependen. Sedangkan nilai terendah untuk Subdimensi Nilai-nilai adalah pada Desa Jembangan dengan nilai 2,00 serta berikutnya adalah Desa Sidomulyo dengan nilai 2,08. Kedua desa tersebut berada pada kategori independen.

Tabel 4.5
Peringkat Status Kemandirian Desa pada Subdimensi Nilai-nilai

Desa	Tipologi Desa	Skor	Kategori	Peringkat Dimensi Kelembagaan Sosial
Karangjambu	1. Desa Perdagangan dan Jasa	2.15	Independen	7
Widoro		2.40	Interdependen	3
Kalibeji	2. Desa UMKM/ Usaha Menengah Kecil Masyarakat	2.16	Independen	5
Seling		2.71	Interdependen	2
Sidomulyo		2.08	Independen	9
Srati	3. Desa Wisata	2.19	Independen	4
Jembangan		2.00	Independen	10

Pasir		2.73	Interdependen	1
Pajengkolan	4. Desa Pertanian	2.16	Independen	6
Pesuruhan		2.11	Independen	8

Sumber: Data Peneliti, 2015

Subdimensi Nilai-nilai terdiri dari dua indikator yaitu praktek nilai oleh lembaga sosial serta jaringan praktek dan promosi nilai. Sebaran nilai untuk kedua indikator dalam Subdimensi Nilai-nilai dapat dilihat pada tabel 2.8.

Grafik 4.15
Indikator Subdimensi Nilai-nilai
(belum dibuat tabelnya)

2.00	2.52	2.16	2.62	1.93	2.03	2.00	2.65	1.94	2.38
2.30	2.29	2.16	2.79	2.23	2.35	2.00	2.81	2.38	1.84

Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Indikator Praktek Nilai oleh Lembaga Sosial

Hasil penilaian pada indikator praktek nilai oleh lembaga sosial pada Subdimensi Nilai-nilai di sepuluh desa di Kabupaten Kebumen berkisar antara 1,93 hingga 2,65. Pada tabel 2.8 diperlihatkan bahwa enam desa berada pada kisaran nilai 1,93 hingga 2,16 atau berada pada kategori independen. Atau dapat diartikan bahwa aktor dan lembaga sosial di desa telah mempraktekkan nilai secara konsisten, seperti nilai gotong royong, toleransi, anti kekerasan, keberlanjutan lingkungan dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan empat desa lainnya berada pada kisaran nilai 2,38 hingga 2,65 atau berada pada kategori interdependen. Atau dapat diartikan bahwa nilai yang dianut di desa tidak hanya dipraktekkan dan dipromosikan oleh aktor dan lembaga sosial namun juga oleh aktor atau lembaga di luar lembaga sosial, baik di lingkup desa atau lingkup luar desa.

Berdasarkan hasil pengukuran IKD tahun 2015, nilai tertinggi untuk indikator praktek nilai oleh lembaga sosial adalah Desa Pasir dengan nilai 2,65 dan berikutnya adalah Desa Seling dengan nilai 2,62. Kedua desa tersebut berada pada kategori interdependen. Sedangkan nilai terendah untuk indikator praktek nilai oleh lembaga sosial adalah Desa Sidomulyo dengan nilai 1,93 dan berikutnya adalah Desa Pajengkolan dengan nilai 1,94. Keduanya berada pada kategori independen.

2. Indikator Jaringan Praktek dan Promosi Nilai

Praktek jaringan praktek dan promosi nilai pada organisasi lembaga sosial di sepuluh desa di Kabupaten Kebumen pada pengukuran IKD tahun 2015 menunjukkan bahwa enam desa berada pada kategori independen atau mempunyai nilai yang berkisar antara 1,84 hingga 2,30. Atau dapat diartikan bahwa lembaga sosial telah mampu mengembangkan jaringan praktek nilai dengan lembaga sosial lainnya. Sedangkan empat desa lainnya berada pada kategori interdependen dengan nilai yang berkisar antara 2,35 hingga 2,81. Atau dapat diartikan bahwa upaya lembaga sosial dalam mengembangkan jaringan praktek nilai telah

melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan warga desa secara umum, bahkan meluas hingga lingkup luar desa.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa nilai tertinggi untuk indikator jaringan praktek dan promosi nilai adalah Desa Pasir dengan nilai 2,81 dan berikutnya adalah Desa Seling dengan nilai 2,79. Kedua desa tersebut berada pada kategori interdependen. Sedangkan nilai terendah adalah pada Desa Pesuruhan dengan nilai 1,84 dan berikutnya adalah Desa Jembangan dengan nilai 2,00. Kedua desa tersebut masuk dalam kategori independen.

4.4.4 Sub-Dimensi Dampak

Subdimensi Dampak mengukur dampak keberadaan atau hasil kerja lembaga-lembaga sosial terhadap kehidupan warga desa secara keseluruhan. Subdimensi ini tidak hanya melihat pada hasil akhir (misalnya besarnya dampak lembaga sosial pada area khusus), tetapi juga pada upaya pelibatan warga desa untuk aktif dalam area tersebut.

Hasil pengukuran terhadap Subdimensi Dampak berkisar antara nilai 1,82 hingga 2,68. Pada tabel 2.9 diperlihatkan bahwa delapan desa berada pada kategori independen atau dapat diartikan bahwa lembaga sosial dinilai telah mampu menyelesaikan permasalahan sosial di tingkat desa, mampu mempengaruhi kebijakan publik serta aktif membangun modal sosial di tingkat desa. Dan dua desa lainnya berada pada kategori interdependen, atau dapat diartikan bahwa lembaga sosial dinilai mampu menyelesaikan permasalahan sosial di tingkat desa, mampu mempengaruhi kebijakan publik tidak saja di lingkup desa namun hingga lintas desa, serta sudah ada keterlibatan aktif warga desa dalam kegiatan lembaga sosial.

Nilai Subdimensi Dampak yang tertinggi adalah pada Desa Pasir dengan nilai 2,68 dan berikutnya adalah Desa Seling dengan nilai 2,60. Kedua desa tersebut berada pada kategori interdependen. Sedangkan nilai terendah untuk Subdimensi Dampak adalah pada Desa Sidomulyo dengan nilai 1,82 dan berikutnya adalah Desa Jembangan dengan nilai 1,85. Keduanya berada pada kategori independen.

Tabel 4.6
Peringkat Status Kemandirian Desa pada Subdimensi Dampak

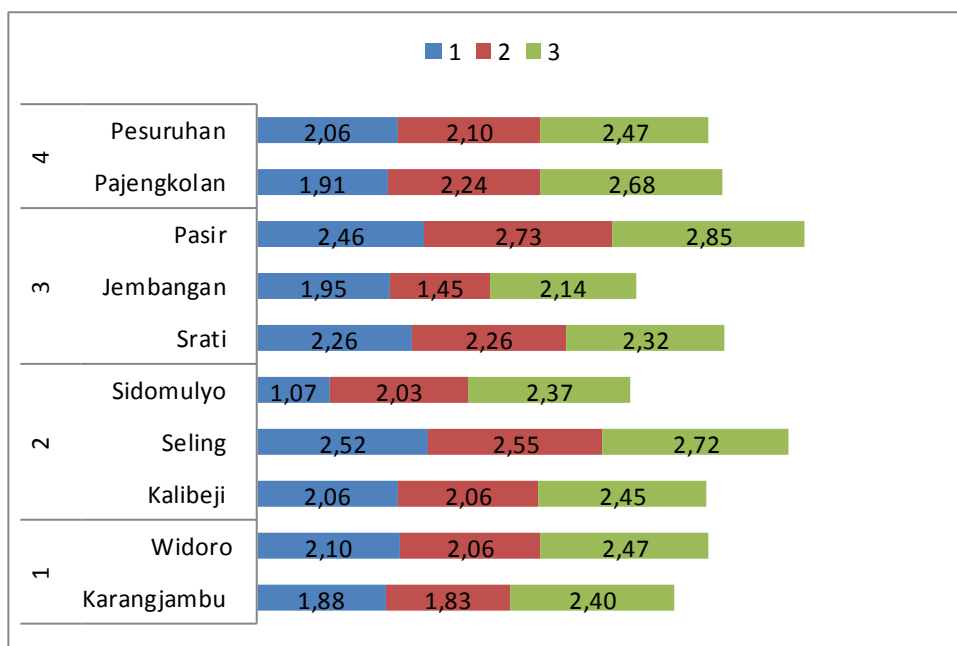
Desa	Tipologi Desa	Skor	Kategori	Peringkat Dimensi Kelembagaan Sosial
Karangjambu	1. Desa Perdagangan dan Jasa	2.04	Independen	8
Widoro		2.21	Independen	5
Kalibeji	2. Desa UMKM/ Usaha Menengah Kecil Masyarakat	2.19	Independen	7
Seling		2.60	Interdependen	2
Sidomulyo		1.82	Independen	10
Srati	3. Desa Wisata	2.28	Independen	3
Jembangan		1.85	Independen	9

Pasir		2.68	Interdependen	1
Pajengkolan	4. Desa Pertanian	2.27	Independen	4
Pesuruhan		2.21	Independen	6

Sumber: Data Peneliti, 2015

Subdimensi Dampak terdiri dari tiga indikator yaitu indikator dampak sosial, dampak kebijakan serta kepercayaan publik. Sebaran nilai untuk ketiga indikator dalam Subdimensi Dampak diperlihatkan pada Tabel 2.10.

Tabel 4.16
Indikator Subdimensi Dampak



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Indikator Dampak Sosial

Hasil penilaian pada indikator dampak sosial dalam Subdimensi Dampak di pengukuran Indeks Kemandirian Desa tahun 2015 berkisar antara 1,07 hingga 2,52. Pada tabel 2.10 terlihat bahwa sebagian besar dari kesepuluh desa, yaitu tujuh desa berada pada kategori independen, dengan nilai berkisar antara 1,88 hingga 2,10. Dua desa berada pada kategori interdependen dengan nilai yang berkisar antara 2,46 hingga 2,52. Serta satu desa berada pada tingkat terbawah yaitu kategori dependen.

Nilai tertinggi untuk indikator dampak sosial adalah Desa Seling dengan nilai 2,52 dan berikutnya adalah Desa Pasir dengan nilai 2,46. Kedua desa tersebut berada pada kategori interdependen, atau dapat diartikan sebagai situasi dimana lembaga sosial yang ada di desa dinilai telah mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul hingga pada lingkup lintas desa. Hal lainnya adalah bahwa para aktor lembaga sosial dinilai berkontribusi untuk membangun modal sosial hingga lingkup luar desa.

Sedangkan nilai terendah untuk indikator dampak sosial adalah Desa Sidomulyo dengan nilai 1,07 atau berada berada pada kategori dependen. Situasi ini dapat dimaknai sebagai situasi dimana lembaga sosial di desa dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan membangun modal sosial di lingkup internal desanya. Desa lainnya yang memiliki skor terendah berikutnya adalah Desa Karangjambu yang berada pada kategori independen (1,88) atau dapat dikatakan bahwa lembaga sosial di desa dinilai telah mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan membangun modal sosial di lingkup internal desanya.

2. Indikator Dampak Kebijakan

Hasil penilaian terhadap indikator dampak kebijakan dalam Subdimensi Dampak di pengukuran Indeks Kemandirian Desa tahun 2015 berkisar antara 1,45 hingga 2,73. Sebanyak delapan desa berada pada kategori independen dengan nilai yang berkisar antara 1,45 hingga 2,26. Sedangkan dua desa lainnya berada pada kategori interdependen dengan nilai 2,55 dan 2,73.

Nilai tertinggi untuk indikator dampak kebijakan adalah Desa Jembangan dengan nilai 1,45 dan berikutnya adalah Desa Karangjambu dengan nilai 1,83. Kedua desa tersebut berada pada kategori independen, yang dapat diartikan bahwa lembaga sosial di desa dinilai telah mampu mempengaruhi kebijakan publik bukan saja pada lingkup desa namun hingga lingkup luar desa.

Sedangkan nilai terendah untuk indikator dampak kebijakan adalah Desa Jembangan dengan nilai 1,45 dan berikutnya adalah Desa Karangjambu dengan nilai 1,83. Kedua desa tersebut berada pada kategori independen, atau dapat diartikan bahwa lembaga sosial yang ada di desa dinilai telah mampu mempengaruhi kebijakan publik di lingkup desa.

3. Indikator Kepercayaan publik

Indikator kepercayaan publik ingin menilai seberapa besar tingkat kepercayaan warga desa terhadap aktor atau lembaga sosial di tingkat desa. Hasil penilaian terhadap indikator kepercayaan publik dalam Subdimensi Dampak berkisar antara nilai 2,14 hingga 2,85. Pada tabel 2.10 terlihat bahwa delapan dari sepuluh desa berada pada kategori interdependen dengan kisaran nilai antara 2,37 hingga 2,85. Situasi ini dapat diartikan bahwa warga desa merespon positif keberadaan lembaga sosial dengan, misalnya, menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga sosial, menyampaikan persolan-persolan sosial yang dihadapi pada aktor atau lembaga sosial. Sedangkan dua desa lainnya berada pada kategori independen dengan nilai yang berkisar antara 2,14 hingga 2,32. Situasi ini dapat diartikan mulai munculnya keterlibatan warga desa secara lebih substantif, misalnya terlibat aktif dalam forum refleksi atau evaluasi lembaga sosial, memberikan sumbangan berupa uang, barang atau meminjamkan tempat untuk aktivitas lembaga sosial.

Nilai tertinggi untuk indikator kepercayaan publik adalah Desa Pasir dengan nilai 2,85 dan berikutnya adalah Desa Seling dengan nilai 2,72. Kedua desa tersebut berada pada kategori interdependen. Sedangkan desa yang memiliki nilai indikator kepercayaan publik terendah

adalah Desa Jembangan dengan nilai 2,14 dan berikutnya adalah Desa Sрати dengan nilai 2,32.

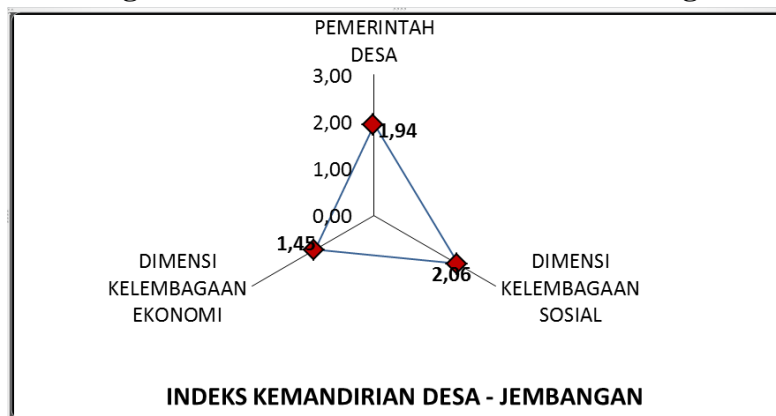
4.7 Analisis Indeks Kemandirian di Masing-Masing Desa

Sub bab ini akan menjelaskan mengenai indeks kemandirian di masing-masing desa.

4.7.1 Analisis Indeks Kemandirian Desa Jembangan

Desa Jembangan, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen terletak di sebelah timur utara kabupaten Kebumen yang terletak pada dataran tinggi, dengan jarak kurang lebih 20 km dari kota Kebumen. Desa ini terletak pada dataran tinggi, dan dikenal sebagai desa wisata dengan andalannya berupa Telaga hijau yang bersisian dengan hutan yang masih alami, Waduk Pejengkolan yang merupakan bagian dari sistem irigasi Waduk Wadaslintang. dan Jembatan Gantung.

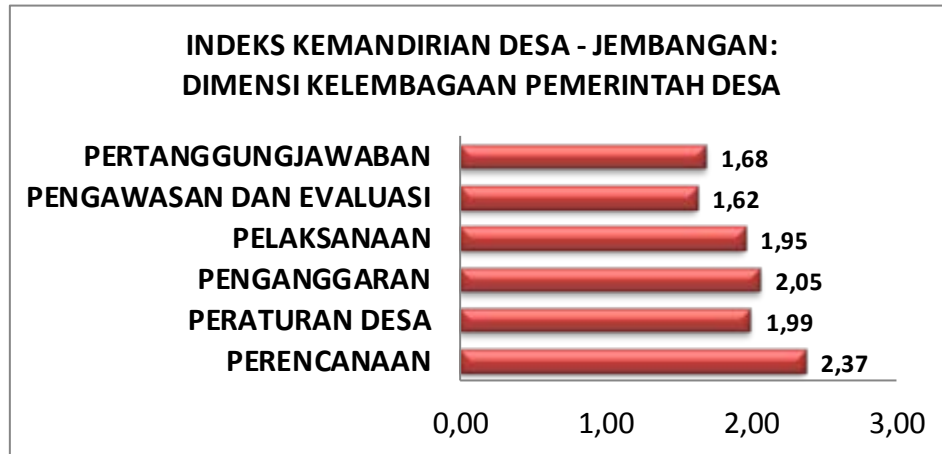
Gambar 4.1
Infografis Indeks Kemandirian Desa Jembangan



Sumber: Data Peneliti, 2015

Indeks Kemandirian Desa Jembangan, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 bahwa nilai tertinggi adalah pada dimensi kelembagaan sosial dengan skor 2,06 atau berada pada kategori independen. Disusul berikutnya oleh nilai dimensi kelembagaan pemerintahan desa yang ditunjukkan skor 1,94 atau berada pada kategori yang sama yaitu independen. Sedangkan nilai dimensi kelembagaan ekonomi masih terendah dibandingkan dua dimensi lainnya, yang ditunjukkan oleh skor 1,45 atau masih berada pada kategori dependen.

1. Dimensi Kelembagaan Pemerintah Desa



Sumber: Data Peneliti, 2015

Dimensi kelembagaan pemerintah desa menyroti enam subdimensi yaitu:

1.1. Subdimensi Perencanaan

Nilai dalam dimensi kelembagaan pemerintah desa yang memperlihatkan berada pada kategori independen disumbang oleh enam subdimensinya. Subdimensi pertama adalah perencanaan yang memiliki nilai tertinggi dalam dimensi ini, yaitu 2,37 atau berada pada kategori interdependen. Tingginya nilai pada subdimensi perencanaan paling banyak disumbang oleh indikator perencanaan pembangunan lintas desa dan bentuk keterlibatannya yang memiliki skor tertinggi yaitu 2,68 atau berada pada kategori interdependen. Indikator lainnya yang berkontribusi signifikan adalah indikator penggunaan kajian pendahuluan terhadap kondisi objektif dan dokumen perencanaan dalam proses pembuatan RPJM dan RKP Desa (2,50) yang berada pada kategori interdependen. Tantangan pada subdimensi perencanaan adalah pada indikator keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pembahasan RPJM dan RKP Desa serta bentuk forumnya (2,09) yang memperoleh skor terendah dalam subdimensi perencanaan, diperlihatkan berada pada kategori independen.

1.2. Subdimensi Peraturan Desa

Subdimensi kedua adalah subdimensi peraturan desa yang berada pada kategori independen dengan hasil skor 1,99. Situasi pada subdimensi ini disumbang oleh nilai pada indikator pemenuhan (pengakomodasian) peraturan desa terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan dasar, infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi yang memperoleh skor tertinggi yaitu 2,45 atau berada pada kategori interdependen. Sedangkan indikator lain yang juga mempunyai pengaruh signifikan adalah kepemilikan peraturan desa di luar peraturan desa mengatur mengenai RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa dan pihak yang menyusunnya, yang diperlihatkan dengan skor 2,41 atau dapat dikatakan berada pada kategori interdependen. Skor terendah pada subdimensi ini adalah pemenuhan (pengakomodasian) kebutuhan masyarakat dalam peraturan bersama kepala desa, dengan skor sebesar 1,32 atau masih berada pada kategori dependen.

1.3. Subdimensi Penganggaran

Subdimensi ketiga adalah subdimensi penganggaran yang ditunjukkan dengan skor 2,05 atau berada pada kategori independen. Nilai yang diperoleh subdimensi ini dikontribusi dari nilai indikator kepemilikan APB Desa dan pihak yang membuatnya, diperlihatkan oleh skor sebesar 2,27 yang menunjukkan kategori independen. Indikator lainnya yang juga memberikan kontribusi signifikan adalah indikator keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAB Desa, dengan skor sebesar 2,18 atau berada pada kategori independen. Indikator dalam subdimensi ini yang memiliki skor terendah adalah penganggaran dan pelaksanaan kegiatan lintas desa dengan skor 1,59 atau berada pada kategori dependen.

1.4. Subdimensi Pelaksanaan

Subdimensi berikutnya atau yang keempat adalah subdimensi pelaksanaan yang memiliki skor 1,95 atau berada pada kategori independen. Situasi pada subdimensi ini disumbang paling besar oleh indikator transparansi penyelenggaraan pelayanan dasar (2,59) serta indikator keberfungsian pemdes dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana dasar (2,59) dimana kedua indikator tersebut berada pada kategori interdependen. Tantangan pada subdimensi ini ditunjukkan oleh nilai indikator transparansi penyelenggaraan ekonomi lokal yang memiliki skor terendah yaitu 1,36 atau berada pada kategori dependen.

1.5. Subdimensi Pengawasan dan Evaluasi

Subdimensi kelima adalah subdimensi pengawasan dan evaluasi yang memiliki nilai terendah dalam dimensi kelembagaan pemerintah desa, ditunjukkan dengan skor 1,62 atau berada pada kategori dependen. Rendahnya nilai pada subdimensi ini dikontribusi paling besar oleh indikator pemerintah desa melakukan pemantauan dan evaluasi serta intensitasnya (1,91) yang berada pada kategori independen. Disusul oleh indikator ketersediaan ruang untuk melakukan pengaduan (1,68) yang juga berada pada kategori independen. Sumbangan paling kecil diberikan oleh indikator BPD melakukan evaluasi dan pemantauan serta intensitasnya yang ditunjukkan oleh skor 1,27 atau masih berada pada kondisi dependen.

1.6. Subdimensi Pertanggungjawaban

Subdimensi terakhir adalah subdimensi pertanggungjawaban yang memiliki skor 1,68 atau yang menunjukkan telah berada pada kategori independen. Situasi pada subdimensi pertanggungjawaban ini dikontribusi secara setara oleh indikator kepemilikan laporan pertanggungjawaban dan proses penyampaian (1,77) serta indikator publikasi laporan pertanggungjawaban (1,77) yang sama berada pada kategori independen. Kontribusi paling kecil diberikan oleh indikator aksesibilitas masyarakat terhadap informasi laporan pertanggungjawaban yang memiliki skor 1,50 atau berada pada kategori dependen.

2. Dimensi Kelembagaan Sosial



Sumber: Data Peneliti, 2015

Dimensi kelembagaan sosial di Desa Jembangan menunjukkan kategori independen dengan skor 2,06 yang merupakan nilai tertinggi dibanding dua dimensi lainnya dalam Indeks Kemandirian Desa. Tingginya skor pada dimensi ini disumbang nilai dari empat subdimensi yaitu subdimensi keaktifan warga, tingkat organisasi, nilai-nilai dan subdimensi dampak.

Dimensi Kelembagaan Sosial menyoroti empat subdimensi yaitu:

2.1. Subdimensi Keaktifan Warga

Subdimensi keaktifan warga memiliki skor paling tinggi dibandingkan skor pada subdimensi lainnya, yaitu 2,36 atau menunjukkan berada pada kategori interdependen. Indikator yang paling berpengaruh pada tingginya nilai pada subdimensi ini adalah indikator keterlibatan sosial warga dengan skor 2,64 atau berada pada kategori interdependen. Indikator lainnya yang juga mempunyai pengaruh besar adalah indikator keterlibatan (lembaga sosial) dalam bidang sosial dengan skor 2,55 yang juga menunjukkan kategori interdependen. Sedangkan indikator yang masih menjadi tantangan dalam subdimensi ini adalah aksi kolektif warga yang memiliki skor terendah yaitu 2,00 meskipun sudah menunjukkan kategori independen.

2.2. Subdimensi Tingkat Organisasi

Subdimensi kedua dalam dimensi kelembagaan sosial adalah subdimensi tingkat organisasi yang ditunjukkan oleh skor 2,05 atau berada pada kategori independen. Situasi pada subdimensi ini dikontribusi oleh indikator komunikasi dengan skor 2,45 atau menunjukkan kategori interdependen. Disusul oleh kontribusi yang disumbang oleh indikator praktek evaluasi internal dengan skor 2,32 atau berada pada kategori independen. Tantangan diperlihatkan oleh indikator kecukupan sumber daya yang memiliki skor terendah yaitu 1,36 atau berada pada kategori dependen.

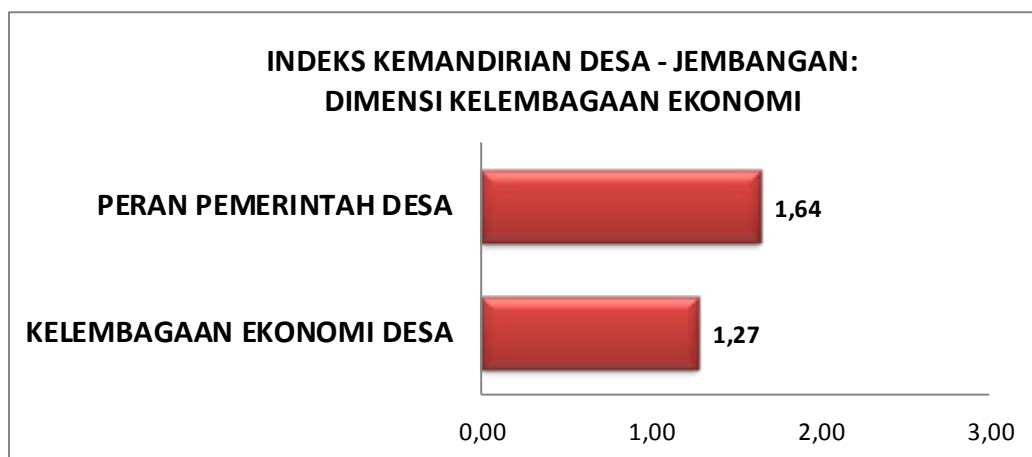
2.3. Subdimensi Nilai-nilai

Subdimensi ketiga yaitu nilai-nilai ditunjukkan oleh skor 2,00 atau berada pada kategori independen. Kedua indikator dalam subdimensi ini yaitu praktik nilai oleh lembaga sosial serta indikator jaringan praktik dan promosi nilai yang sama memiliki skor 2,00 atau berada pada kategori independen.

2.4. Subdimensi Dampak

Subdimensi terakhir adalah dampak yang memiliki skor terendah dalam dimensi kelembagaan sosial, yaitu 1,85 atau berada pada kategori independen. Rendahnya skor pada subdimensi ini disumbang oleh tingginya nilai pada indikator kepercayaan publik dengan skor 2,14 atau menunjukkan kategori independen. Disusul kemudian oleh indikator dampak sosial dengan skor 1,95 atau berada pada kategori independen. Sedangkan kontribusi paling rendah diberikan oleh indikator dampak kebijakan yang memiliki skor 1,45 atau masih berada pada kategori dependen.

3. Kelembagaan Ekonomi



Sumber: Data Peneliti, 2015

Pada indeks kemandirian desa Jembangan ditunjukkan bahwa dimensi kelembagaan ekonomi mempunyai skor terendah dibanding dua dimensi lainnya, yaitu 1,45. Rendahnya skor pada dimensi ini dikontribusi oleh skor dua subdimensi yaitu subdimensi kelembagaan ekonomi desa dan subdimensi peran pemerintah desa.

Dimensi Kelembagaan Ekonomi Desa menyoroti dua subdimensi yaitu:

3.1 Subdimensi Kelembagaan Ekonomi Desa

Nilai pada subdimensi kelembagaan ekonomi desa ditunjukkan oleh skor 1,27 yang menunjukkan kategori dependen. Masih rendahnya nilai pada subdimensi ini dikontribusi oleh nilai pada indikator manajemen/pengelolaan kelembagaan ekonomi yang merupakan nilai tertinggi pada subdimensi ini yaitu 1,41 serta atau masih berada

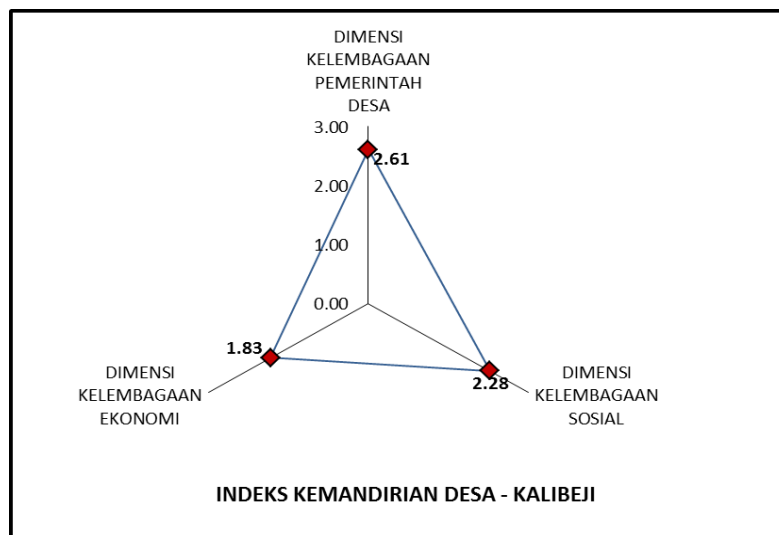
pada kategori dependen. Indikator lain yang mempunyai pengaruh cukup signifikan adalah indikator peran kelembagaan ekonomi desa dengan skor 1,27 yang juga berada pada kategori yang masih dependen. Skor terendah, atau yang berarti masih menjadi tantangan pada subdimensi ini ditunjukkan oleh indikator akumulasi modal (ukuran untuk melihat proses usaha, tidak hanya diukur dalam peningkatan skala usaha atau kesejahteraan pelaku usaha), dengan skor 1,18 yang sama menunjukkan kategori dependen.

3.2 Subdimensi Peran Pemerintah Desa

Sedangkan subdimensi peran pemerintah desa dengan indikator tunggal peran pemerintah desa dalam mendukung kelembagaan ekonomi desa ditunjukkan dengan skor 1,64 atau berada pada kategori dependen.

4.7.2 Analisis Indeks Kemandirian Desa Kalibeji

Gambar 4.2
Infografis Indeks Kemandirian Desa Kalibeji



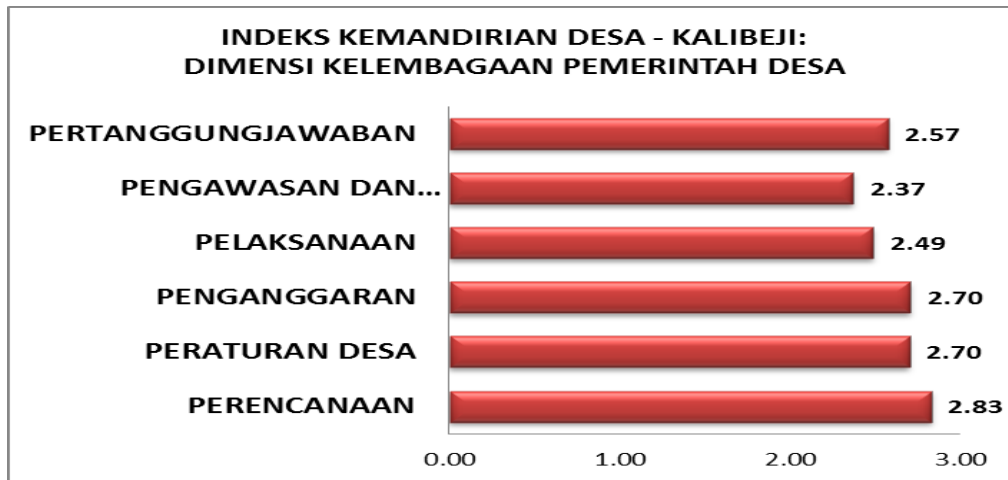
Sumber : Data Peneliti, 2015

Dari infografis di atas, skor Indeks Kemandirian Desa (IKD) Desa Kalibeji Kecamatan Sempor paling besar terdapat pada dimensi kelembagaan pemerintah desa, yaitu 2.61. Selanjutnya adalah dimensi kelembagaan sosial dengan skor 2.28 dan kelembagaan ekonomi dengan skor 1.83.

Jika dikonsultasikan dengan tabel rentang IKD pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, skor untuk kelembagaan pemerintahan desa berada dalam status interdependen. Sedangkan untuk dimensi kelembagaan sosial dan ekonomi berada dalam status independen.

1. Kelembagaan Pemerintah Desa

Jika di analisis secara lebih dalam perdimensi, dapat diketahui dari diagram batang mengenai skor antar sub dimensi dalam kelembagaan pemerintah desa di bawah ini



Sumber : Data Peneliti, 2015

Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa sub dimensi perencanaan mempunyai kontribusi yang paling besar dengan skor 2.83, di susul oleh sub dimensi peraturan desa dan penganggaran yang mempunyai kontribusi sama dengan skor 2.70. Selanjutnya adalah dimensi pertanggung jawaban dengan skor 2.57, lalu pelaksanaan dengan skor 2.49 dan pengawasan dengan skor 2.37. Jika mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan, dapat disimpulkan bahwa semua skor dalam sub dimensi kelembagaan pemerintahan desa ini berada dalam status interdependen.

1.1 Sub-dimensi Perencanaan

Sub-dimensi perencanaan terdiri dari lima indikator. Dari lima indikator tersebut, indikator yang mempunyai kontribusi paling besar adalah indikator pengakomodasian kepentingan masyarakat dengan skor 2.97 dan perencanaan pembangunan lintas desa dengan skor 2.94 dan keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunannya dengan skor 2.74

1.2 Sub-dimensi Peraturan Desa

Sub-dimensi peraturan desa terdiri dari lima indikator. Dari lima indikator tersebut, indikator mengenai kepemilikan peraturan desa di luar peraturan desa mengenai perencanaan dan penganggaran mempunyai skor paling tinggi dengan nilai 2.90, lalu keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan rancangan perdes dengan skor 2.74 dan pengakomodasian kebutuhan masyarakat dalam peraturan desa tersebut dengan skor 2.65.

1.3 Sub-dimensi Penganggaran

Sub dimensi penganggaran desa terdiri dari lima indikator. Dari lima indikator tersebut, indikator pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam APBDesa berkontribusi lebih besar di banding indikator lainnya dengan skor 2.87, lalu indikator penganggaran dan pelaksanaan kegiatan lintas desa dengan skor 2.81

1.4 Sub-dimensi Pelaksanaan

Sub dimensi pelaksanaan terdiri dari 25 indikator. Dari indikator tersebut, indikator yang mempunyai kontribusi paling besar adalah indikator transparansi penyelenggaraan sarana dan prasarana dasar dengan skor 3.00 serta keberfungsian pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan dasar untuk warganya dengan skor 2.82. Sementara itu, indikator yang mempunyai kontribusi paling kecil adalah indikator sumber keuangan ekonomi lokal dengan skor 1.65 lalu di susul oleh indikator sumber keuangan untuk pemberdayaan masyarakat dengan skor 1.97

1.5 Sub-dimensi Pengawasan dan Evaluasi

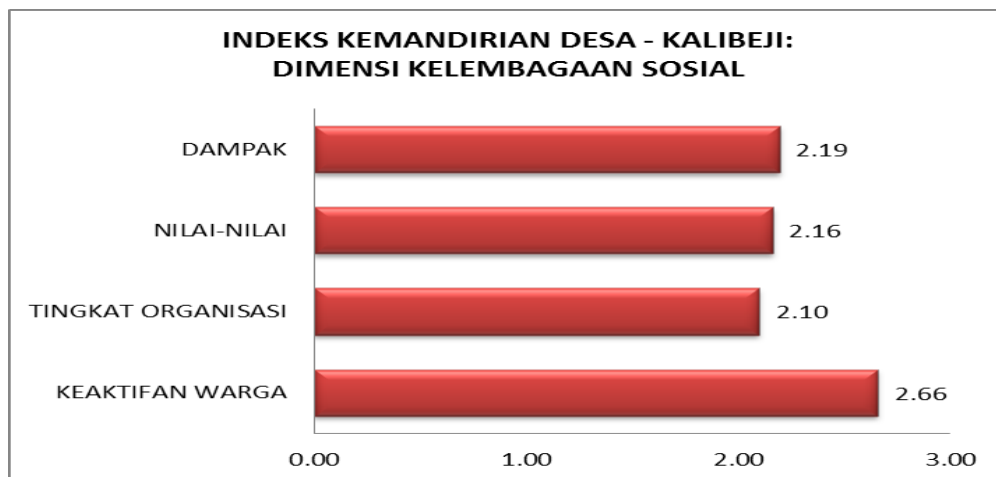
Subdimensi pengawasan terdiri dari tiga indikator. Dari tiga indikator tersebut, indikator ketersediaan ruang untuk melakukan pengaduan berkontribusi lebih besar dibanding indikator evaluasi oleh BPD atau pemerintah desanya itu sendiri dengan skor 2.52

1.6 Sub-dimensi Pertanggungjawaban

Sub-dimensi pertanggung jawaban terdiri tiga indikator. Dari tiga indikator tersebut, indikator kepemilikan laporan pertanggung jawaban mempunyai kontribusi yang lebih besar dibanding dua indikator lainnya dengan skor 2.81 lalu indikator publikasi laporan pertanggungjawaban dengan skor 2.35 dan akseiviliyas masyarakat terhadap informasi laporan pertanggungjawaban tersebut.

2. Kelembagaan Sosial

Setelah dimensi kelembagaan pemerintah desa selanjutnya adalah dimensi mengenai kelembagaan sosial yang dapat dilihat dalam grafik di bawah ini



Sumber : Data Peneliti, 2015

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa dimensi kelembagaan sosial terdiri dari empat sub dimensi. Dari empat sub dimensi tersebut, sub dimensi keaktifan warga berkontribusi lebih besar di banding sub dimensi lainnya dengan skor 2.66. Selanjutnya adalah sub dimensi dampak dengan skor 2.19, lalu nilai-nilai dengan skor 2.16 dan tingkat organisasi dengan skor 2.10

Mengacu pada rentang skor yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa sub dimensi keaktifan warga berada dalam status interdependen. Sementara itu, sub dimensi dampak, nilai-nilai dan tingkat organisasi berada dalam status independen.

2.1 Sub-dimensi keaktifan warga

Sub-dimensi keaktifan warga terdiri dari enam indikator. Dari enam indikator tersebut indikator keterlibatan sosial warga dengan skor 2.90 dan keanekaragaman lembaga sosial dengan 2.90 warga berkontribusi lebih besar di banding indikator lainnya, lalu di susul oleh indikator keterlibatan kelembagaan sosial tersebut dalam bidang kegiatan sosial dengan skor 2.84 lalu keterlibatan dalam bidang politik dengan skor 2.35 dan aksi kolektif lembaga dengan skor 2.29.

2.2 Sub-dimensi Tingkat Organisasi

Sub dimensi tingkat organisasi terdiri dari empat indikator. Dari empat indikator tersebut indikator praktek evaluasi internal berkontribusi lebih besar di banding indikator lainnya dengan skor 2.29. Selanjutnya, dari empat indikator tersebut, indikator kecukupan sumber daya memberikan kontribusi lebih kecil di banding tiga indikator lainnya dengan skor 1.87

2.3 Sub-dimensi Nilai-Nilai

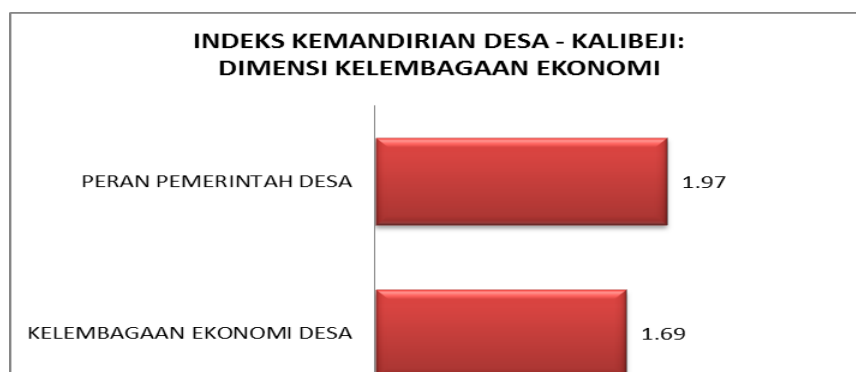
Sub dimensi nilai-nilai terdiri dari dua indikator, yaitu 1) praktik nilai oleh lembaga sosial; 2) jaringan praktik dan promosi nilai. Dua indikator tersebut memiliki skor yang sama yakni 2,16 (independen).

2.4 Sub-dimensi Dampak

Sub dimensi dampak terdiri dari tiga indikator. Dari tiga indikator tersebut, indikator kepercayaan publik dengan skor 2.45 berkontribusi lebih besar di banding indikator dampak kebijakan dan dampak sosial yang mempunyai skor masing-masing 2.06.

3. Kelembagaan Ekonomi

Setelah dimensi kelembagaan pemerintah desa dan sosial selanjutnya adalah dimensi kelembagaan ekonomi. Di bawah ini disajikan grafik mengenai sub dimensi dalam dimensi kelembagaan ekonomi.



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa dimensi kelembagaan ekonomi terdiri dari dua sub dimensi. Dari dua sub dimensi tersebut, sub-dimensi peran pemerintah desa dengan skor 1.97

Sumber : Data Peneliti, 2015

memberikan kontribusi yang lebih besar di banding di banding kelembagaan ekonomi desa yang mempunyai skor 1.69. Mengacu pada rentang skor pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kedua sub dimensi tersebut dalam status independen.

3.1 Sub-dimensi Kelembagaan ekonomi

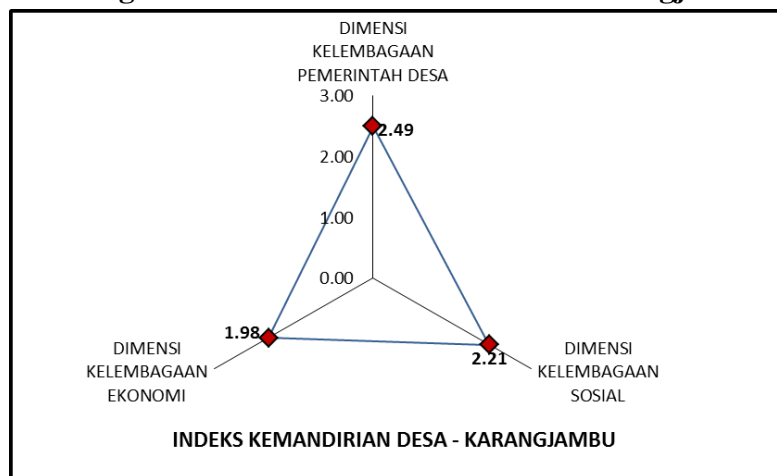
Sub dimensi kelembagaan ekonomi desa terdiri dari empat indikator. Dari empat indikator tersebut, indikator kelembagaan ekonomi desa dengan skor 1.39 mempunyai kontribusi yang lebih besar dibanding indikator lainnya. Dari empat indikator tersebut, indikator peran kelembagaan ekonomi desa merupakan indikator dengan kontribusi yang paling kecil dengan skor 1.39.

3.2 Sub-dimensi Peran Pemerintah Desa

Sub-dimensi peran pemerintah desa terdiri dari satu indikator yaitu mengenai peran pemerintah desa dalam mendukung kelembagaan ekonomi desa yang memberikan kontribusi dengan skor 1.97.

4.7.3 Analisis Indeks Kemandirian Desa Karangjambu

Gambar 4.3
Infografis Indeks Kemandirian Desa Karangjambu



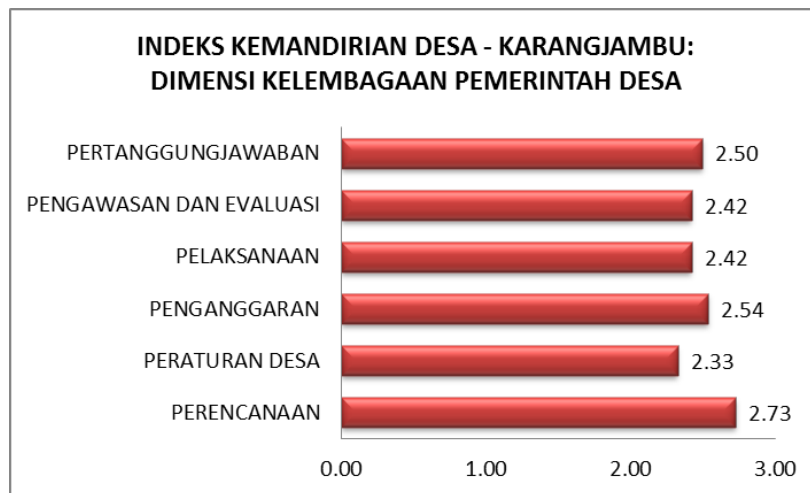
Sumber : Data Peneliti, 2015

Dari diagram di atas, skor Indeks Kemandirian Desa (IKD) Desa Karang Jambu Kecamatan Sruweng paling besar terdapat pada dimensi kelembagaan pemerintah desa, yaitu 2.49. Selanjutnya adalah dimensi kelembagaan sosial dengan skor 2.21 dan kelembagaan ekonomi dengan skor 1.98.

Jika dikonsultasikan dengan tabel rentang IKD pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, skor untuk kelembagaan pemerintahan desa berada dalam status interdependen. Sedangkan untuk dimensi kelembagaan sosial dan ekonomi berada dalam status independen.

1. Kelembagaan Pemerintah Desa

Jika di analisis secara lebih dalam perdimensi, dapat diketahui dari diagram batang mengenai skor antar sub dimensi dalam kelembagaan pemerintah desa di bawah ini



Sumber : Data Peneliti, 2015

Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa sub dimensi perencanaan mempunyai kontribusi yang paling besar dengan skor 2.73, di susul oleh sub dimensi penganggaran skor 2.54. Selanjutnya adalah dimensi pertanggung jawaban dengan skor 2.50, lalu pelaksanaan dengan dan pengawasan dengan skor 2.42 dan sub dimensi peraturan desa dengan skor 2.33. Jika mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan, dapat disimpulkan bahwa skor lima sub dimensi berapada pada status interdependen, kecuali sub dimensi mengenai peraturan desa yang berada pada posisi independen.

1.1 Sub-dimensi Perencanaan

Sub dimensi perencanaan terdiri dari lima indikator. Dari lima indikator tersebut, indikator keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pembahasan RPJMDesa dan RKPDesa dengan skor 2.88 menjadi indikator yang berkontribusi lebih besar di banding empat indikator lainnya.

1.2 Sub-dimensi Peraturan Desa

Sub dimensi peraturan desa ini terdiri dari lima indikator. Dari lima indikator tersebut, indikator yang mempunyai kontribusi lebih besar di banding indikator lainnya adalah indikator pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam peraturan desa bersama dengan skor 2.67. Mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan dapat disimpulkan bahwa skor tersebut berada pada status interdependen. Selain itu, dari lima indikator tersebut indikator yang paling sedikit berkontribusi adalah indikator kepemilikan peraturan desa di luar peraturan desa mengenai dokumen perencanaan dan penganggaran dan indikator kepemilikan bersama peraturan desa dengan skor 1.96. Mengacu pada rentang skor yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa rentang skor tersebut berada pada status independen.

1.3 Sub-dimensi Penganggaran

Jika di lihat lebih dalam sub dimensi penganggaran ini terdiri dari lima indikator. Dari lima indikator tersebut, indikator pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam APBDesa mempunyai kontribusi yang lebih besar di banding indikator lainnya dengan skor 2.79. Sementara itu, indikator penganggaran dan pelaksanaan kegiatan lintas desa menjadi indikator yang mempunyai kontribusi paling kecil dengan skor 2.08. Mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan, kontribusi indikator penganggaran dan pelaksanaan kegiatan lintas desa berada pada staus independen.

1.4 Sub-dimensi Pelaksanaan

Sub dimensi pelaksanaan ini terdiri dari 25 indikator. Dari 25 indikator tersebut, indikator yang berkontribusi paling besar adalah keberfungsian pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dasar dengan skor 2.92, lalu indikator transparansi penyelenggaraan sarana dan pra sarana dasar dengan skor 2.94. Mengacu pada tabel rentang skor pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut berada dalam status interdependen.

Selain itu, dari 25 indikator tersebut, indikator yang memberikan kontribusi paling kecil adalah indikator sumber keuangan pemberdayaan masyarakat dengan skor 1.84 dan sumber keuangan pengembangan ekonomi lokal dengan skor 1.88. Mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan maka disimpulkan bahwa dua indikator tersebut berada pada status independen.

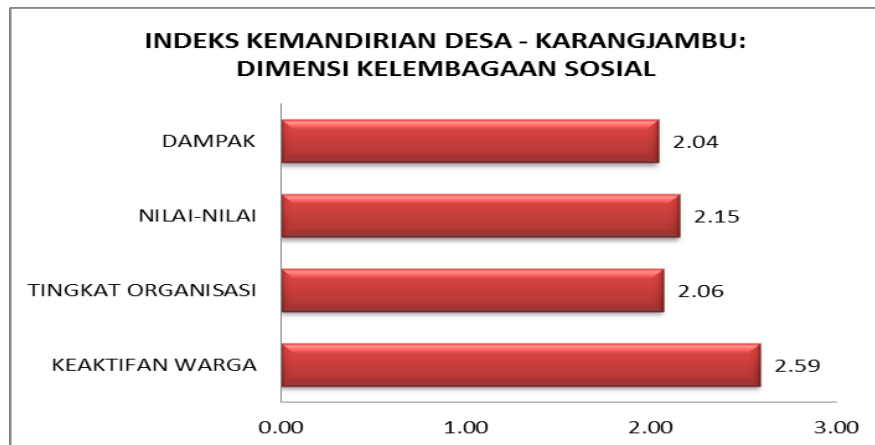
1.5 Sub-dimensi Pengawasan dan Evaluasi

Sub dimensi pengawasan ini terdiri dari tiga indikator. Dari tiga indikator tersebut, indikator evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh BPD berkontribusi paling besar dengan skor 2.52. Mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan dapat disimpulkan bahwa indikator ini berada dalam status interdepenen. Lalu indikator evaluasi oleh pemerintah desa serta ketersediaan ruang untuk melakukan pengaduan dengan skor masing-masing 2.40 dan 2.35. Mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan dapat disimpulkan bahwa kedua skor interdependen.

1.6 Sub-dimensi Pertanggungjawaban

Dalam sub dimensi pertanggung jawaban ini terdapat tiga indikator. Dari tiga indikator tersebut, indikator kepemilikan laporan pertanggung jawaban memiliki kontribusi yang lebih besar di banding dua indikator lainnya dengan skor 2.68. Selanjutnya, dari tiga indikator tersebut, indikator publikasi dan laporan pertanggung jawaban merupakan indikator dengan kontribusi yang paling kecil dengan skor 2.29. Mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan disimpulkan bahwa indikator tersebut berada pada status indepeden.

2 Kelembagaan Sosial



Sumber : Data Peneliti, 2015

Dimensi kelembagaan sosial terdiri dari empat sub dimensi. Dari empat subdimensi tersebut, sub dimensi keaktifan warga berkontribusi lebih besar di banding sub dimensi lainnya dengan skor 2.59 mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan dapat disimpulkan bahwa skor tersebut berada dalam status interdependen. Sementara itu, sub dimensi lainnya adalah sub dimensia nilai-nilai dengan skor 2.15, sub dimensi tingkat organisasi dengan skor 2.06 serta sub dimensi dampak dengan skor 2.04 berada dalam status independen.

2.1 Sub-dimensi Keaktifan Warga

Sub-dimensi keaktifan warga terdiri dari enam indikator. Dari enam indikator tersebut, indikator dengan kontribusi paling besar adalah indikator keterlibatan dalam bidang sosial dan keterlibatan dalam bidang politik dengan masing-masing skor 2.76. Mengacu pada rentang skor yang sudah di susu, dapat disimpulkan bahwa kelima indikator tersebut berada pada status interdependen.

2.2 Sub-dimensi Tingkat Organisasi

Sub dimensi tingkat organisasi ini terdiri dari empat indikator. Dari empat indikator tersebut, indikator yang berkontribusi lebih besar dari pada indikator lainnya adalah indikator komunikasi dengan skor 2.52. Mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut berada pada status interdependen. Selanjutnya adalah indikator praktek evaluasi internal dengan skor 2.21 disimpulkan berada pada status independen. Selanjutnya adalah indikator kerja sama dan kecukupan sumber daya dengan masing-masing skor 1.92 dan 1.67. Mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan, kedua indikator tersebut berada dalam kondisi independen.

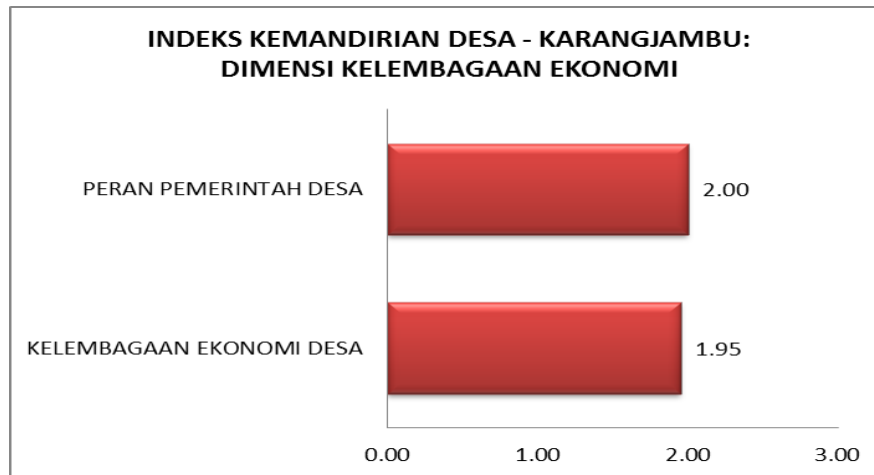
2.3 Sub-dimensi Nilai-Nilai

Indikator dalam sub dimensi nilai-nilai terdiri dari dua indikator. Dari dua indikator tersebut, indikator jaringan dan praktik nilai mempunyai kontribusi yang lebih besar dengan skor 2.30 lalu praktik nilai oleh lembaga sosial dengan skor 2.00. Mengacu pada rentang tabel skor yang telah di susun kedua skor tersebut dapat disimpulkan berada pada status independen.

2.4 Sub-dimensi Dampak

Sub-dimensi dampak terdiri dari tiga indikator. Dari tiga indikator, kepercayaan publik adalah indikator yang memiliki skor tertinggi yakni 2,40 (interdependen). Dua indikator lainnya yakni dampak sosial dan kebijakan memiliki skor yang sama yakni 1,84

3 Dimensi Kelembagaan Ekonomi



Sumber : Data Peneliti, 2015

Mengacu pada diagram di atas, dimensi kelembagaan ekonomi terdiri dari dua sub dimensi, yaitu subdimensi kelembagaan ekonomi desa dan peran pemerintah desa. Dari dua sub dimensi tersebut, sub dimensi peran pemerintah desa dengan skor 2.00 mempunyai kontribusi yang lebih besar dibanding sub dimensi kelembagaan ekonomi dengan skor 1.95. Mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan, kedua sub dimensi tersebut berada dalam status independen.

3.1 Sub-dimensi Kelembagaan Ekonomi Desa

Sub-dimensi kelembagaan ekonomi terdiri dari empat indikator. Dari empat indikator tersebut, indikator manajemen kelembagaan ekonomi mempunyai kontribusi yang lebih besar dengan skor 2.16. Selanjutnya adalah indikator peran kelembagaan ekonomi desa dengan skor 2.08 dan kelembagaan ekonomi desa dengan skor 1.92. Mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan, kedua skor tersebut dapat disimpulkan berapada pada status independen. Selanjutnya, indikator dengan kontribusi paling kecil adalah indikator akumulasi modal dengan skor 1.65. Mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan dapat disimpulkan skor tersebut berada pada status independen.

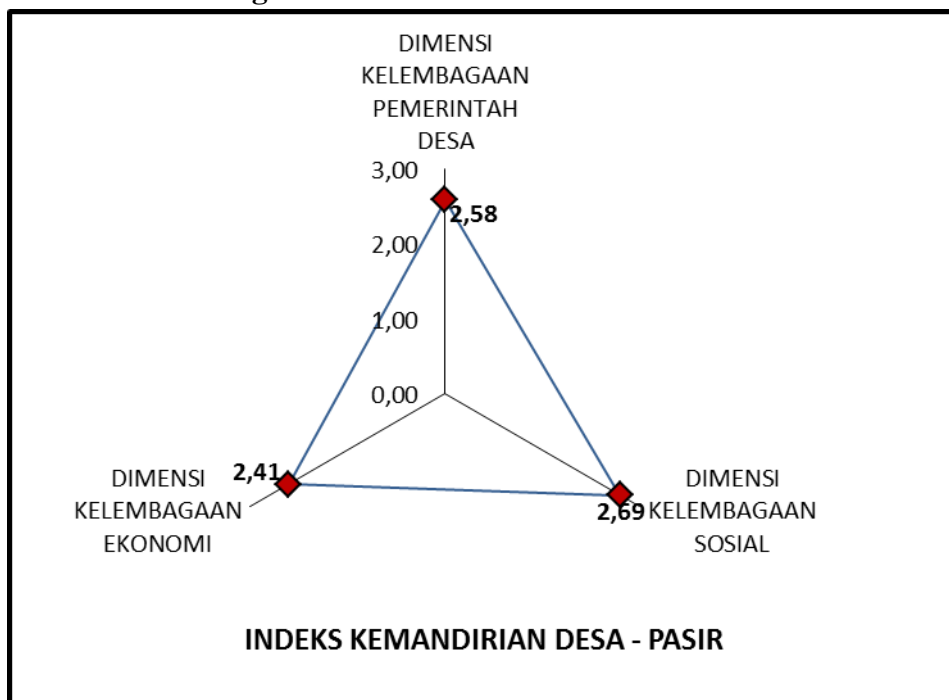
3.2 Sub-dimensi Peran Pemerintah Desa

Sub-dimensi peran pemerintah desa terdiri dari satu indikator dengan skor 2.00. Mengacu pada rentang skor yang telah di tetapkan dapat disimpulkan bahwa skor tersebut berada dalam status independen.

4.7.4 Analisis Indeks Kemandirian Desa Pasir

Pengukuran Indeks Kemandirian Desa Pasir, Kecamatan Ayah pada tahun 2015 menunjukkan bahwa ketiga dimensi kelembagaan di desa ini berada pada taraf Interdependen. Skor tertinggi diperoleh dimensi kelembagaan sosial, yang mencapai skor 2,69. Kemudian diikuti oleh dimensi kelembagaan pemerintah desa, dengan skor 2,58. Sementara itu skor terendah diperlihatkan oleh dimensi kelembagaan ekonomi dengan skor 2,41. Gambaran mengenai tingkat Kemandirian Desa Pasir ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 4.4
Infografis Indeks Kemandirian Desa Pasir



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Dimensi Kelembagaan Sosial

Kekuatan pendorong tingkat kemandirian di Desa Pasir berada pada dimensi kelembagaan sosial, yang memperoleh skor tertinggi yaitu 2,69. Kondisi ini ditopang oleh subdimensi nilai-nilai, yang memiliki skor tertinggi, yaitu 2,73, kemudian disusul oleh subdimensi keaktifan warga, dengan skor 2,69. Sedangkan skor terendah adalah subdimensi tingkat organisasi, yang mendapat skor 2,67. Hasil pengukuran dimensi kelembagaan sosial di Desa Pasir dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Sumber: Data Peneliti, 2015

Dimensi kelembagaan sosial desa ini menyoroti empat sub-dimensi, yaitu sub-dimensi, yaitu:

1.1 Sub-dimensi Keaktifan Warga

Subdimensi keaktifan warga desa ini menunjukkan taraf interdependen, dengan skor 2,69. Kondisi tersebut ditopang oleh enam indikator yang berada pada taraf interdependen. Dua indikator yang paling berpengaruh terhadap subdimensi keaktifan warga ini adalah munculnya keanekaragaman lembaga sosial di desa, dengan skor 2,92 dan keterlibatan dalam bidang politik, dengan skor 2,88.

1.2 Sub-dimensi Tingkat Organisasi

Subdimensi tingkat organisasi desa ini menunjukkan taraf interdependen, dengan skor 2,67. Indikator yang paling berpengaruh dalam subdimensi ini adalah komunikasi yang mencapai skor 2,92. Indikator lain yang berpengaruh adalah praktek evaluasi internal dan kerjasama. Kedua indikator tersebut memiliki skor 2,73. Pada subdimensi ini pun terdapat indikator yang bertaraf independen, yaitu kecukupan sumber daya, yang mendapat skor 2,31.

1.3 Sub-dimensi Nilai-Nilai

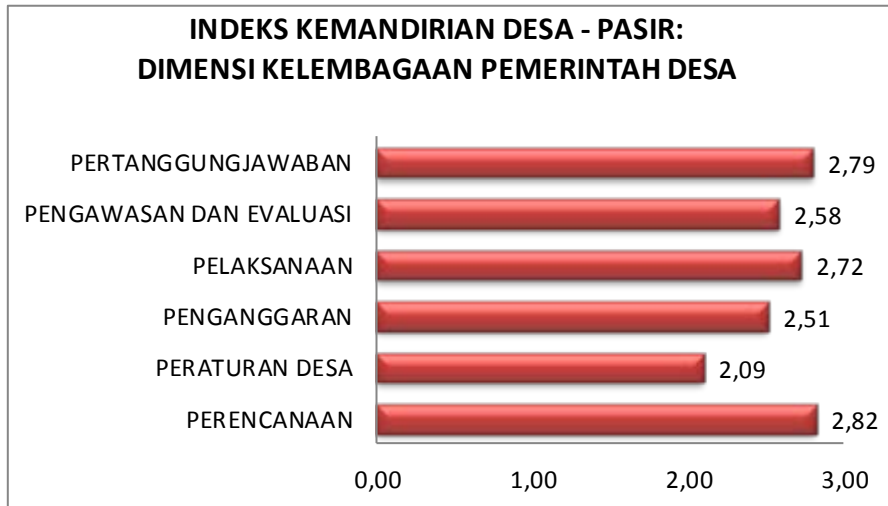
Pada subdimensi Nilai-nilai di Desa Pasir berada pada tataran interdependen, dengan skor 2,73. Indikator yang berpengaruh pada subdimensi ini ada dua hal dan keduanya berada pada taraf interdependen. Kedua indikator tersebut adalah jaringan praktik dan promosi nilai, memiliki skor 2,81, dan indikator praktik nilai oleh lembaga sosial, yang memiliki skor 2,65.

1.4 Sub-dimensi Dampak

Subdimensi lain yang menjadi penopang dimensi kelembagaan sosial adalah subdimensi dampak. Berdasarkan pengukuran di Desa Pasir, subdimensi ini berada pada posisi interdependen, dengan skor 2,68. Pencapaian subdimensi tersebut dipengaruhi oleh tiga indikator. Pengukuran masyarakat menunjukkan bahwa indikator yang paling berpengaruh adalah tingkat kepercayaan publik terhadap dimensi kelembagaan sosial, dengan skor yang diperoleh adalah 2,85. Kemudian diikuti oleh indikator dampak kebijakan yang mendapat skor 2,73.

2. Dimensi Kelembagaan Pemerintah Desa

Pengukuran dimensi kelembagaan pemerintah desa berada pada tataran interdependen, dengan skor 2,58. Pencapaian kondisi dimensi yang interdependen tersebut dipengaruhi oleh beberapa subdimensi. Urutan subdimensi kelembagaan pemerintah desa berdasarkan tingginya pengaruh yang diberikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Sumber: Data Peneliti, 2015

Dimensi kelembagaan pemerintah ini menyoroti enam sub-dimensi, yaitu:

2.1 Sub-dimensi Perencanaan

Subdimensi perencanaan di desa ini menunjukkan taraf interdependen, dengan skor 2,79. Pencapaian kondisi interdependen tersebut dipengaruhi oleh tujuh indikator. Berdasarkan pengukuran pada masyarakat desa, indikator yang paling adalah tingkat pemenuhan (pengakomodasian) kebutuhan program serta Perencanaan Pembangunan Lintas Desa dan Bentuk Keterlibatannya. Kedua indikator tersebut mendapat skor 2,92. Indikator lain yang berpengaruh terhadap pencapaian kondisi subdimensi ini adalah Keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pembahasan RPJM Desa dan RKP Desa serta bentuk forumnya, dengan skor 2.81.

2.2 Sub-dimensi Peraturan desa

Proses pembangunan di desa pun tidak terlepas dari subdimensi Peraturan desa. Hasil pengukuran subdimensi ini menunjukkan taraf independen, dengan skor 2,09. Namun demikian, indikator-indikator yang berpengaruh terhadap pencapaian taraf subdimensi peraturan desa tersebut memiliki variasi antara interdependen dan independen. Pengaruh terbesar diberikan oleh indikator yang mencapai taraf interdependen, yaitu Keterlibatan BPD dan Masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan desa, yang mencapai skor 2,92. Kemudian diikuti oleh indikator Kepemilikan Peraturan Desa Diluar Peraturan Desa mengatur mengenai RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa dan Pihak yang menyusunnya, dengan skor 2,85. Sementara itu, pengukuran menunjukkan bahwa

pengaruh terendah muncul pada indikator-indikator yang mencapai taraf independen, yaitu indikator yang berkaitan dengan kepemilikan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Sumber Inisiatifnya serta indikator Pemenuhan (Pengakomodasian) Kebutuhan Masyarakat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa. Kedua indikator tersebut mendapat skor 1,00.

2.3 Sub-dimensi Penganggaran

Pada subdimensi penganggaran, desa ini menunjukkan pada tahap interdependen. Skor yang diperoleh adalah 2,51. Berdasarkan lima indikator yang dilihat pada subdimensi ini terdapat variasi taraf kemandiriannya, empat indikator masuk pada taraf dan sisanya adalah independen. Indikator yang masuk ke dalam taraf interdependen dapat dianggap yang memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian subdimensi tersebut. dua indikator yang memberikan pengaruh terbesar adalah Pemenuhan (Pengakomodasian) Kebutuhan Masyarakat dalam APB Desa, dengan skor 2.77 dan Keterlibatan BPD dan Elemen Masyarakat dalam Pembahasan RAPBD, yang mendapat 2.69.

Sementara itu, pengaruh terendah ditunjukkan oleh indikator Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan lintas Desa. Indikator ini berada pada taraf independen, dengan skor 2,33.

2.4 Sub-dimensi Pelaksanaan

Subdimensi Pelaksanaan dalam dimensi pemerintah desa berada pada taraf interdependen, dengan skor 2,72. Indikator yang berpengaruh terbesar dalam pencapaian taraf tersebut adalah Keberfungsian Pemdes dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dan indikato Keberterimaan dan keberfungsian penyelenggaraan pelayanan dasar yang mendapat skor 2.92, kemudian diikuti oleh indikator Transparansi penyelenggaraan sarana dan prasarana dasar dan indikator Keberterimaan dan keberfungsian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan skor 2.96.

2.5 Sub-dimensi Pengawasan dan evaluasi

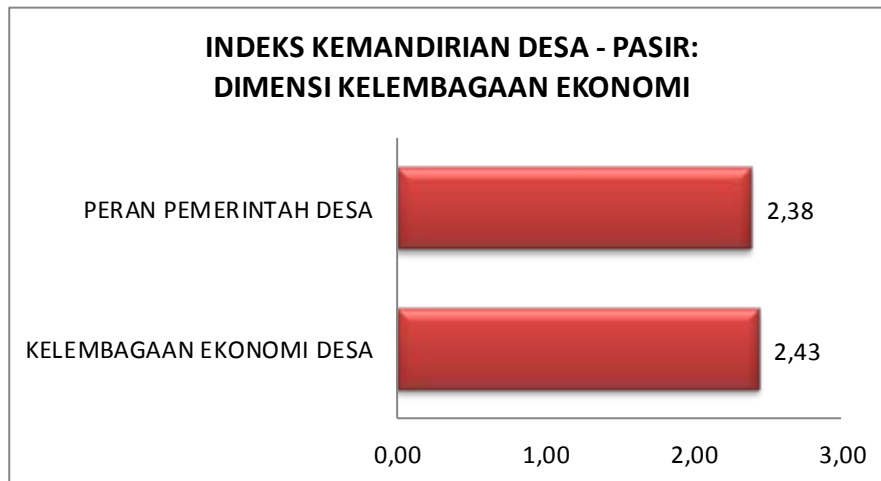
Subdimensi pengawasan dan evaluasi di Desa Pasir berada pada kondisi interdependen dengan skor 2,58. Pencapaian kondisi ini didukung oleh indikator-indikatoryang berada pada kondisi interdependen pula. Pengaruh terbesar diberikan oleh indikator BPD melakukan evaluasi dan pemantauan serta intensitasnya, dengan skor 2.62. pengaruh terbesar lainnya diberikan oleh indikator Pemerintah Desa dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi serta intensitasnya, dengan skor 2.65.

2.6 Sub-dimensi Pertanggungjawaban.

Sementara itu, pada subdimensi Pertanggungjawaban, kondisi di Desa Pasir sudah mencapai taraf interdependen, dengan skor 2,79. Indikator terbesar dalam pencapaian taraf tersebut adalah Kepemilikan Laporan Pertanggungjawaban dan Proses Penyampaian, dengan skor 2.88 dan indikator Publikasi Laporan Pertanggungjawaban, dengan skor 2.77.

3. Dimensi Kelembagaan Ekonomi

Berdasarkan pengukuran kemandirian desa, dimensi kelembagaan ekonomi di Desa Pasir menunjukkan kondisi terendah dibanding dengan dimensi-dimensi pendukung lainnya. Namun demikian, dimensi kelembagaan ini sebenarnya sudah mencapai taraf interdependen, dengan skor 2,41. Pencapaian taraf dimensi kelembagaan ekonomi ini ditopang oleh dua subdimensi, yang juga berada pada taraf interdependen. Pengaruh terbesar diberikan oleh subdimensi kelembagaan ekonomi di desa, dengan skor 2,43. Sementara indikator lainnya, yaitu Peran Pemerintah Desa, dengan skor 2,38, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.



Sumber: Data Peneliti, 2015

3.1 Subdimensi Kelembagaan Ekonomi Desa

Subdimensi Kelembagaan Ekonomi Desa Pasir berada pada taraf interdependen, dengan skor 2,43. Pencapaian taraf ini didukung oleh empat indikator. Berdasarkan pengukuran tingkat kemandiriannya, tiga indikator masuk ke dalam taraf interdependen dan satu masuk dalam taraf independen. Pengaruh terbesar pencapaian taraf subdimensi ini berada pada indikator Ketersediaan Kelembagaan ekonomi desa, dengan skor 2,58, dan diikuti oleh indikator Akumulasi Modal, dengan skor 2,50. Sementara itu, indikator lain yang masuk dalam kategori independen adalah Management/Pengelolaan Kelembagaan Ekonomi, dengan skor 2,27.

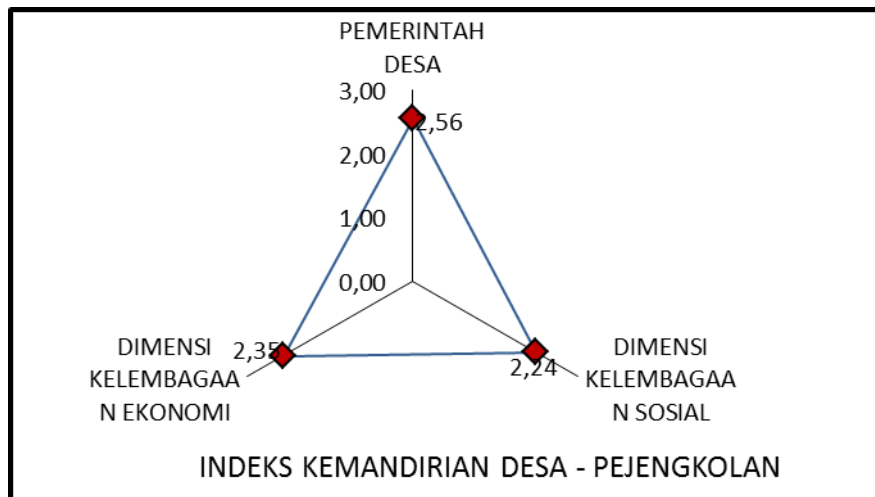
3.2 Subdimensi Peran Pemerintah Desa

Subdimensi lain yang menopang Dimensi Kelembagaan Ekonomi adalah Peran Pemerintah Desa dalam mendukung kelembagaan ekonomi desa. Pengukuran menunjukkan bahwa subdimensi yang terdiri dari satu indikator ini berada pada taraf interdependen dengan skor 2,38.

4.7.5 Analisis Indeks Kemandirian Desa Pajengkolan

Pengukuran Indeks kemandirian Desa Pajengkolan, Kecamatan Padureso pada tahun 2015 menunjukkan bahwa ketiga kelembagaan berada pada tingkat interdependen. Kelembagaan Pemerintah Desa adalah kelembagaan yang memiliki skor tertinggi yakni 2,56. Skor ini diikuti oleh dimensi kelembagaan ekonomi (2,35) dan dimensi kelembagaan sosial (2,24). Berikut infografis yang menggambarkan tingkat kemandirian desa dalam tiga kelembagaan.

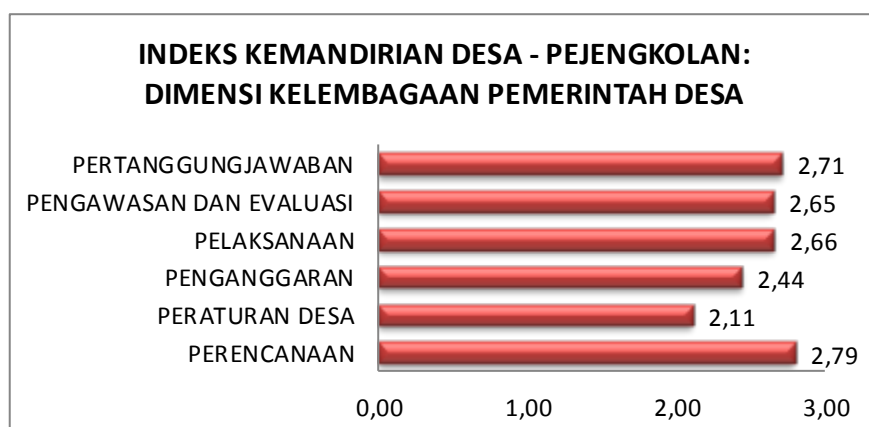
Gambar 4.5
Infografis Indeks Kemandirian Desa Pajengkolan



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Dimensi Kelembagaan Pemerintah Desa

Pencapaian tingkat kemandirian Desa Pajengkolan dalam dimensi kelembagaan pemerintah desa didorong kuat oleh skor sub dimensi perencanaan yang memiliki skor 2,79 (interdependen). Selain memiliki skor perencanaan yang tinggi, Desa Pajengkolan juga memiliki skor yang tergolong dalam kategori interdependen dalam sub dimensi penganggaran (2,44), pelaksanaan (2,66), pengawasan dan evaluasi (2,65), serta pertanggungjawaban (2,71). Kendati demikian, sub dimensi peraturan desa hanya tergolong dalam tingkat independen dengan skor 2,11. Grafik 1.1 menggambarkan hasil pengukuran kemandirian desa dalam kelembagaan Pemerintahan Desa Pajengkolan.



Sumber: Data Peneliti, 2015

1.1 Sub-Dimensi Perencanaan

Sub dimensi perencanaan memiliki skor tertinggi karena memiliki indikator-indikator yang tergolong dalam kategori interdependen. Berdasarkan hasil pengukuran, indikator yang paling mempengaruhi adalah kemampuan rencana dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat (2,94).

1.2 Sub Dimensi Peraturan Desa

Untuk sub dimensi peraturan desa, penopang utama sub dimensi ini adalah indikator keterlibatan BPD dan masyarakat dalam pembagasan rancangan peraturan desa dengan skor 2,71 (interdepeden). Sementara itu, skor sub dimensi peraturan desa diperlemah oleh indikator Pemenuhan (Pengakomodasian) Kebutuhan Masyarakat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa (1,53) dan Kepemilikan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Sumber Inisiatifnya (1,74)

1.3 Sub-dimensi Penganggaran

Dalam sub dimensi penganggaran, indikator yang paling mendorong adalah Keterlibatan BPD dan Elemen Masyarakat dalam Pembahasan RAPBD dan Pemenuhan (Pengakomodasian) Kebutuhan Masyarakat dalam APB Desa dengan skor 2,85 (interdependen). Kendati demikian indikator penganggaran dan pelaksanaan lintas desa serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAB masih tergolong dalam kategori independen dengan skor berturut-turut 1, 82 dan 1,88.

1.4 Sub-dimensi Pelaksanaan

Sub-dimensi pelaksanaan memiliki tingkat kemandirian dalam kategori interdependen karena didukung oleh kemampuan pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pengembangan ekonomi lokal (2,88), transparansi (2,85) dan kemampuan dicontoh dan melayani desa lain dalam penyelenggaraan bidang sarana dan prasarana dasar (2,85) . Di sisi lain, skor sub dimensi pelaksanaan diperlemah dengan indikator keberterimaan dan keberfungsian terhadap pengembangan ekonomi local yang berada dalam kategori independen dengan skor 1,85.

1.5 Sub-dimensi Pengawasan dan Evaluasi

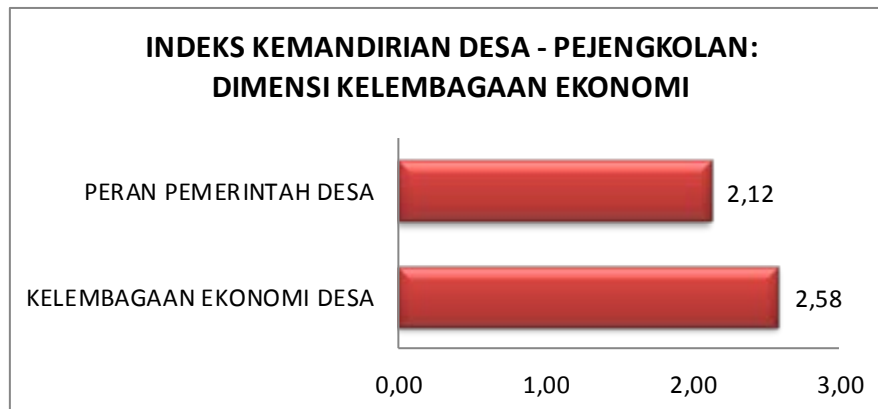
Sub-dimensi pengawasan dan evaluasi memiliki kategori interdependen karena didorong oleh tingginya skor ketiga indikator, utamanya indikator ketersediaan ruang untuk melakukan pengaduan sebesar 2,79.

1.6 Sub-dimensi Pertanggungjawaban

Dalam sub-dimensi pertanggungjawaban, indikator aksesibilitas masyarakat terhadap informasi laporan pertanggungjawaban adalah indikator yang memiliki skor tertinggi yakni 2,82 (interdependen). Sub-dimensi ini juga didukung oleh dua indikator lainnya yang tergolong dalam kategori interdependen.

2 Dimensi Kelembagaan Ekonomi

Selain kelembagaan pemerintahan desa, dimensi kelembagaan ekonomi juga berperan penting dalam mewujudkan kemandirian Desa pajekolan. Berikut grafik yang menggambarkan kelembagaan ekonomi Desa Pajengkolan di masing-masing sub dimensi.



Sumber: Data Peneliti, 2015

2.1 Subdimensi Kelembagaan Ekonomi Desa

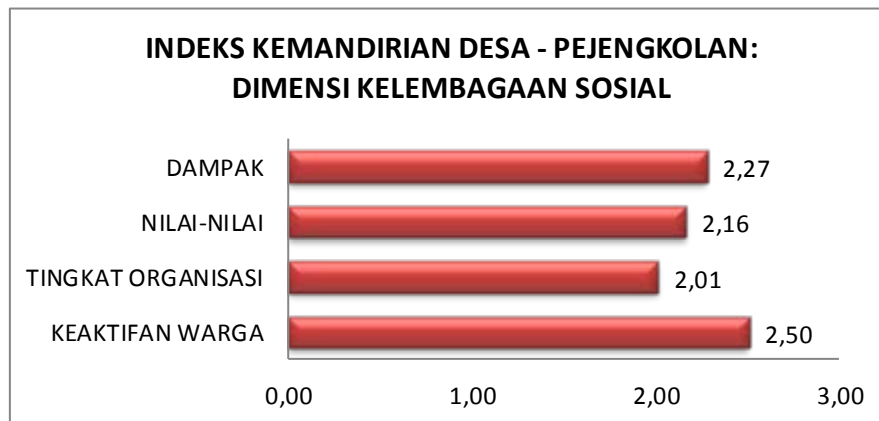
Berdasarkan grafik 1.2, kemandirian kelembagaan ekonomi Desa Pajengkolan didorong oleh kondisi kelembagaan ekonomi yang tergolong dalam kategori interdependen (2,58). Skor tersebut ditopang ditopang kuat oleh indikator kelembagaan ekonomi desa (2,79) dan peran kelembagaan ekonomi desa (2,73).

2.2 Subdimensi Peran Pemerintah Desa

Subdimensi lain yang menopang Dimensi Kelembagaan Ekonomi adalah Peran Pemerintah Desa dalam mendukung kelembagaan ekonomi desa. Pengukuran menunjukkan bahwa subdimensi yang terdiri dari satu indikator ini berada pada taraf interdependen dengan skor 2,58.

3 Dimensi Kelembagaan Sosial

Kelembagaan Sosial Desa Pajengkolan juga berperan penting dalam mendukung kemandirian desanya. Berdasarkan sub dimensi dalam kelembagaan sosial, sub dimensi keaktifan warga adalah sub dimensi yang memiliki skor tertinggi (2,50 dengan kategori interdependen). Kendati demikian, tiga sub dimensi lainnya yakni sub dimensi dampak, nilai-nilai, dan tingkat organisasi berada dalam kategori independen. Berikut grafik yang menggambarkan skor masing-masing sub dimensi dalam kelembagaan sosial.



Sumber: Data Peneliti, 2015.

3.1 Sub-dimensi Keaktifan Warga

Sub-dimensi keaktifan warga mencapai kategori interdependen karena didukung oleh indikator keanekaragaman lembaga sosial (2,91) dan keterlibatan sosial warga (2,76). Kendati demikian, sub dimensi ini diperlemah oleh indikator keterlibatan politik warga (2,12-independen) dan keterlibatannya dalam bidang politik (2,18-independen).

3.3 Sub-dimensi Tingkat Organisasi

Kelembagaan sosial juga dipengaruhi oleh sub dimensi tingkat organisasi dan nilai-nilai. Sub dimensi tingkat organisasi paling didorong oleh praktek evaluasi internal yang berada dalam kategori interdependen (2,41). Dua indikator lainnya berada dalam kategori independen dan ditutup dengan skor indikator kecukupan sumber daya yang tergolong dalam kategori dependen (1,35).

3.3 Sub-dimensi Nilai-Nilai

Untuk sub dimensi nilai-nilai, indikator jaringan praktik dan promosi nilai (2,38) adalah indikator utama yang menopang skor sub dimensi nilai-nilai. Indikator ini tergolong dalam kategori interdependen. Kendati demikian, indikator praktik nilai oleh lembaga sosial berada dalam kategori independen (1,94) sehingga memperkecil skor sub dimensi nilai-nilai.

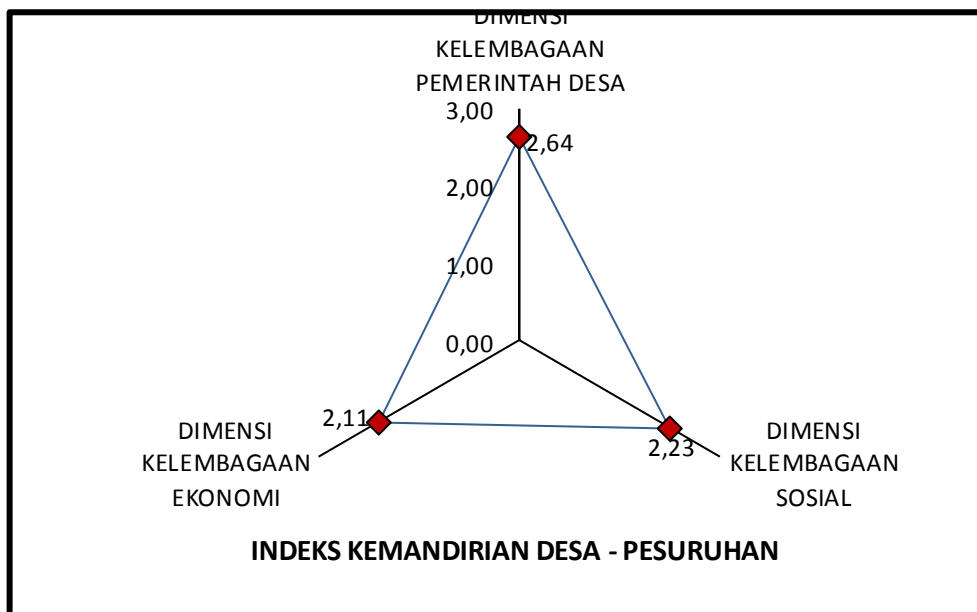
3.4 Sub-dimensi Dampak

Sub-dimensi dampak mempunyai pengaruh besar dalam kelembagaan sosial karena tingginya tingkat kepercayaan publik. Hal ini dilihat dari skor indikator kepercayaan publik yakni 2,68 (interdependen). Sementara itu, sub dimensi ini diperlemah oleh indikator dampak sosial yang memiliki skor 1,91 (independen).

4.7.6 Analisis Indeks Kemandirian Desa Pesuruhan

Hasil pengukuran indeks kemandirian desa Pesuruhan dari tiga dimensi kelembagaan yaitu pemerintah desa, sosial dan ekonomi telah menunjukkan kelembagaan pemerintah desa berada pada skor paling tinggi yaitu 2,64, yaitu memiliki status interdependen dari dua kelembagaan lainnya, dimana kelembagaan sosial memiliki skor 2,23 dan kelembagaan ekonomi memiliki skor 2,11 artinya kedua kelembagaan ini memiliki status independen. Gambaran dimensi kelembagaan di desa Pesuruhan sebagaimana infografis di bawah

Gambar 4.6
Infografis Indeks Kemandirian Desa Pesuruhan

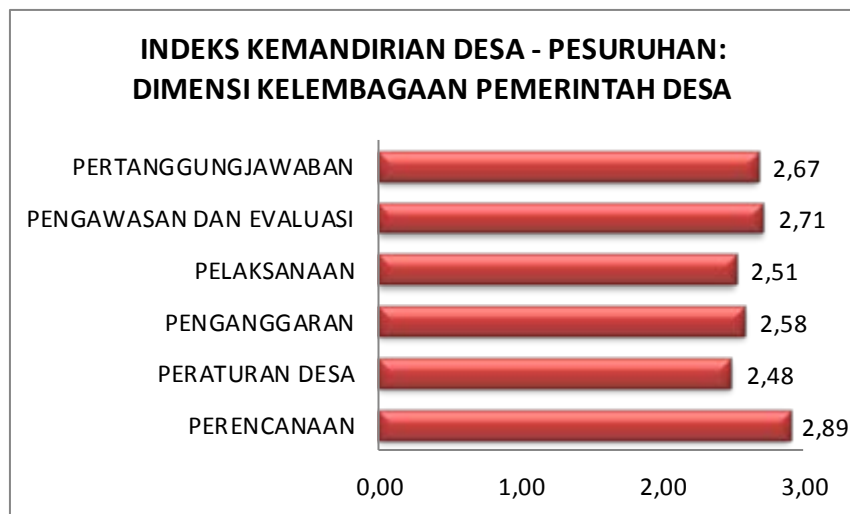


Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Dimensi Kelembagaan Pemerintah Desa

Skor yang dimiliki dimensi kelembagaan pemerintah desa disumbang oleh sub dimensi yang ada didalamnya, dimana sub dimensi perencanaan memiliki skor tertinggi dari sub dimensi lainnya yaitu sebesar 2,89, kemudian disusul sub dimensi pertanggungjawaban dengan skor 2,71 dan sub dimensi pertanggungjawaban 2,67. Pada sub dimensi penganggaran dan pelaksanaan desa Pesuruhan memiliki skor yaitu 2,58 untuk dimensi penganggaran dan 2,51 untuk dimensi pelaksanaan, jika mengacu dengan rentang skor yang telah ditetapkan maka sub dimensi perencanaan dapat disimpulkan bahwa sub dimensi perencanaan memiliki status interdependen. Sementara pada sub dimensi peraturan desa memiliki skor 2,48 yang merupakan skor terendah dari dimensi

perencanaan. Secara umum grafik yang menunjukkan skor tersebut sebagaimana gambar dibawah.



Sumber: Data Peneliti, 2015

Dimensi kelembagaan pemerintah desa, memiliki enam sub dimensi, yaitu:

1.1. Sub-dimensi Perencanaan

Pada sub dimensi perencanaan, semua indikator dalam sub dimensi ini menunjukkan status interdependen, skor yang dimiliki oleh 5 indikator yang ada menunjukkan rentang nilai di atas 2,35-3, dimana indikator kepemilikan memiliki skor yaitu 2,40 dan empat indikator lainnya memiliki skor yang sama yaitu 3,00 artinya dari indikator sub dimensi ini menunjukkan status interdependen.

1.2. Sub-dimensi Peraturan Desa

Pemerintah Desa Pesuruhan pada sub dimensi peraturan desa memiliki status independen, kondisi ini disumbang oleh beberapa indikator kepemilikan, keterlibatan dan pengakomodasian usulan dalam peraturan desa, status tiga indikator ini menunjukkan skor 3.00 atau memiliki status interdependen, sementara pada indikator kepemilikan peraturan bersama kepala desa menunjukkan skor 2.00 atau memiliki status independen dan pada indikator pengakomodasian menunjukkan skor 1,50 atau memiliki status dependen.

1.3. Sub-dimensi Penganggaran

Pada sub dimensi penganggaran, indikator pada sub dimensi ini menunjukkan status interdependen dengan skor yang dimiliki 2,94 dan 2,97, kecuali pada indikator keterlibatan masyarakat dalam pembahasan RAB memiliki skor 1.06 atau memiliki status dependen

1.4. Sub-dimensi Pelaksanaan

Pada bagian sub dimensi pelaksanaan, desa Pesuruhan memiliki skor 2,51 dengan status interdependen, jika melihat indikator-indikator yang ada sub dimensi penganggaran memiliki indikator yang menunjukkan tiga status kemandirian, dimana dari 25 indikator yang ada dalam sub dimensi pelaksanaan, 20 indikator menunjukkan status interdependen, 2 indikator menunjukkan status independen dan 3 indikator menunjukkan dependen. Status dependen dimiliki oleh indikator evaluasi penyelenggaraan ekonomi lokal dengan skor 1,09 dan indikator Keberterimaan dan keberfungsian terhadap pengembangan ekonomi lokal dengan skor 1,03 sedangkan indikator Keberterimaan dan keberfungsian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan skor 1,10.

1.5. Sub-dimensi Pengawasan dan Evaluasi

Skor pada sub dimensi ini menunjukkan angka 2,71 atau memiliki status interdependen, kondisi ini di sumbang oleh tiga indikator didalamnya yang memiliki rentang skor yang menunjukkan status interdependen, yaitu skor tertinggi dimiliki oleh indikator ketersediaan ruang untuk melakukan pengaduan dengan 2.94, disusul indikator pemerintah desa melakukan pemantauan dan evaluasi dengan skor 2,72 dan kemudian skor 2,47 dimiliki indikator BPD melakukan evaluasi dan pemantauan.

1.6. Sub-dimensi Pertanggungjawaban

Sub dimensi pertanggungjawaban menunjukkan nilai 2,67 atau masuk dalam rentang status interdependen. Skor tersebut di sumbang oleh tiga indikator pendukungnya, skor tertinggi dari indikator sub dimensi pertanggungjawaban dimiliki oleh indikator kepemilikan laporan pertanggungjawaban dan proses penyampaian dengan skor 2,84, disusul indikator publikasi laporan pertanggungjawaban 2,63, kemudian disumbang oleh indikator aksesibilitas masyarakat terhadap informasi laporan pertanggungjawaban dengan skor 2.53.

2. Dimensi Kelembagaan Sosial

Dimensi ini secara keseluruhan menunjukkan skor 2,23, artinya jika merujuk ke rentang nilai yang sudah ditetapkan maka dimensi kelembagaan sosial berada pada status independen. Kondisi ini disumbang oleh sub dimensi kelembagaan sosial yang memiliki empat sub dimensi, dimana sub dimensi yang mendapatkan skor tertinggi adalah 2,34, kemudian disusul oleh sub dimensi tingkat organisasi dengan skor 2,28 dan indikator dampak dengan skor 2,21 dan skor terendah 2,11 dimiliki oleh sub dimensi nilai-nilai. Secara umum grafik yang menunjukkan skor tersebut sebagaimana gambar dibawah.



Sumber: Data Peneliti, 2015

2.1. Keaktifan Warga

Sub dimensi keaktifan warga memiliki enam indikator yang masuk dalam pengukuran. Indikator yang tertinggi memiliki skor 2,78 yaitu indikator keterlibatan sosial warga, disusul indikator keterlibatan politik dengan skor 2,69 dan indikator 2,47 dari ketiga indikator ini skor yang dimiliki masuk dalam status interdependen. Sementara indikator aksi kolektif lembaga memiliki skor 2,26, disusul indikator keanekaragaman lembaga sosial dengan skor 2,13 dan kemudian skor paling rendah 1,71 dimiliki indikator keterlibatan politik warga, tiga indikator terakhir ini, memiliki skor dengan rentang status independen.

2.2. Tingkat Organisasi

Sub dimensi tingkat organisasi memiliki empat indikator yang menyumbang terhadap skor rata-rata pada sub dimensi ini. Indikator yang paling tertinggi disumbang skor 2,50 oleh indikator praktek evaluasi internal, indikator ini masuk dalam status interdependen. Kemudian disusul oleh indikator kerjasama dengan skor 2,27 dan indikator komunikasi organisasi dengan skor 2,22 dan yang terendah disumbang oleh indikator kecukupan sumber daya dengan skor 2,03, tiga indikator terakhir masuk dalam status independen.

2.3. Nilai-nilai

Sub dimensi nilai-nilai organisasi memiliki skor 2,11 masuk dalam status independen, kondisi ini disumbang oleh dua indikator. Dimana indikator yang tertinggi disumbang oleh praktek nilai oleh lembaga sosial dengan skor 2,38 jika di mengacu pada rentang status maka masuk dalam status interdependen. Kemudian disusul skor terendah yaitu 1,84 yang dimiliki oleh indikator jaringan praktik dan promosi nilai.

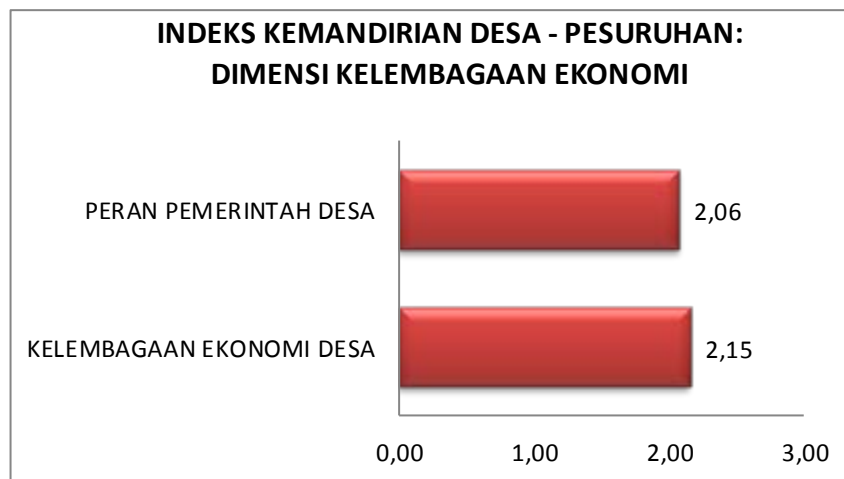
2.4. Dampak

Gambaran hasil dari sub dimensi ini, menunjukkan status independen dengan skor 2,21 yang disumbang oleh tiga indikator di dalamnya. Skor tertinggi dimiliki oleh indikator kepercayaan publik dengan skor 2,47 yang artinya masuk dalam status interdependen, kemudian disusul skor 2,10 yang dimiliki oleh indikator dampak kebijakan dan skor

2,06 yang dimiliki oleh indikator dampak sosial, kedua indikator terakhir ini masuk dalam rentang status independen.

3. Dimensi Kelembagaan Ekonomi

Dimensi kelembagaan ekonomi desa pesuruhan masuk dalam kategori status independen dengan skor rata-rata yang dimiliki 2,11, kondisi ini merupakan kontribusi dari dua sub dimensi yang ada. Sub dimensi yang tertinggi memiliki skor 2.65 yaitu sub dimensi kelembagaan ekonomi desa dan skor terendah dimiliki oleh sub dimensi peran pemerintah desa dengan skor 2,06. Secara umum grafik yang menunjukkan skor tersebut sebagaimana gambar dibawah.



Sumber: Data Peneliti, 2015

3.1. Kelembagaan Ekonomi

Sub dimensi kelembagaan ekonomi desa memiliki empat indikator yang menjadi penilaian dan menyumbang pada sub dimensi ini. Indikator tertinggi dimiliki oleh indikator akumulasi modal dengan skor 2,22, disusul kemudian oleh indikator manajemen/pengelolaan kelembagaan ekonomi dengan skor 2,19 dan kemudian indikator kelembagaan ekonomi desa dan peran kelembagaan ekonomi desa dengan skor yang sama yaitu 2,09. Skor dari indikator ini menunjukkan status independen.

3.2. Peran Pemerintah Desa

Pada sub dimensi peran pemerintahan desa memiliki satu indikator yang menentukan nilai dalam sub dimensi ini, indikator yang dimaksud adalah peran pemerintah desa dalam mendukung kelembagaan ekonomi desa memiliki skor 2,06, jika melihat rentang status masuk dalam status independen.

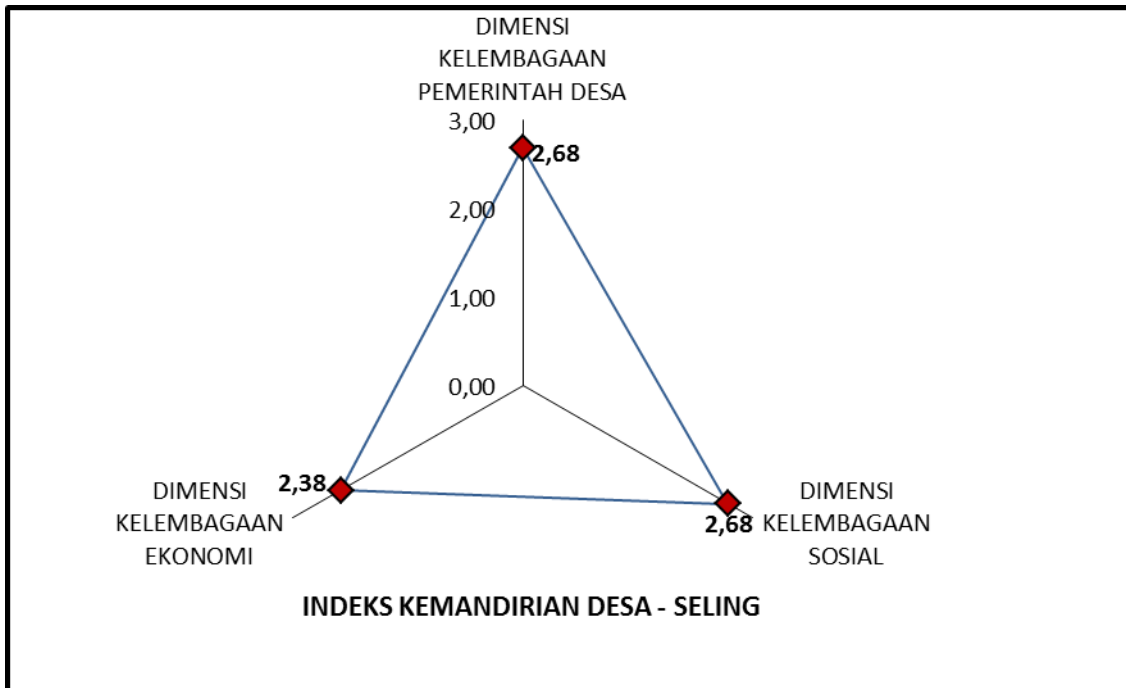
4.7.7 Analisis Indeks Kemandirian Desa Seling

Pengukuran Indeks Kemandirian Desa Seling, Kecamatan Karangsembung pada tahun 2015 menunjukkan bahwa ketiga dimensi kelembagaan di desa ini berada pada taraf Interdependen. Skor tertinggi diperoleh dua dimensi, kelembagaan pemerintah desa dan

kelembagaan sosial, yang mencapai skor 2,68. Sementara itu, dimensi terendah adalah kelembagaan ekonomi, dengan skor 2,38. Gambaran mengenai tingkat kemandirian desa Seling ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 4.7

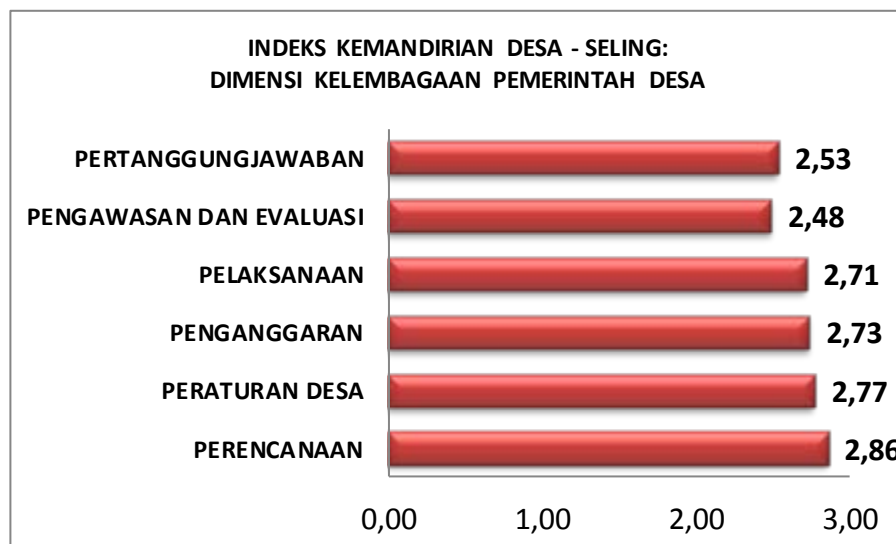
Infografis Indeks Kemandirian Desa Seling



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Dimensi Kelembagaan Pemerintah Desa

Pengukuran dimensi kelembagaan pemerintah desa berada pada tataran interdependen, dengan skor 2,68. Pencapaian kondisi dimensi yang interdependen tersebut dipengaruhi oleh beberapa subdimensi. Urutan subdimensi kelembagaan pemerintah desa berdasarkan tingginya pengaruh yang diberikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Sumber: Data Peneliti, 2015

Dimensi kelembagaan pemerintah ini menyoroti enam sub-dimensi, yaitu:

1.1 Sub-dimensi Perencanaan

Subdimensi perencanaan di desa ini menunjukkan taraf interdependen, dengan skor 2,68. Pencapaian kondisi interdependen tersebut dipengaruhi oleh tujuh indikator. Berdasarkan pengukuran pada masyarakat desa, indikator yang paling adalah tingkat Kepemilikan RPJM dan RKP Desa serta pihak yang menyusunnya, dengan skor 2,97. Kemudian diikuti oleh indikator Keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pembahasan RPJM Desa dan RKP Desa serta bentuk forumnya, dengan skor 2,93.

1.2 Sub-dimensi Peraturan desa

Hasil pengukuran indikator Peraturan desa menunjukkan pada taraf independen, dengan skor 2,77. Pencapaian taraf tersebut ditopang oleh lima indikator yang seluruhnya berada pada tingkatan interdependen pula. Pengaruh terbesar yang mendukung pencapaian tingkatan subdimensi ini berada pada indikator Keterlibatan BPD dan Masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan desa dan indikator Kepemilikan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Sumber Inisiatifnya. Keduanya memiliki skor 2.83. Indikator berikutnya yang berpengaruh besar adalah Pemenuhan (Pengakomodasian) Peraturan Desa terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan dasar, infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi, dengan skor 2.79.

1.3 Sub-dimensi Penganggaran

Pada subdimensi penganggaran, desa ini menunjukkan pada tahap interdependen. Skor yang diperoleh adalah 2,73. Pencapaian taraf tersebut didukung pula oleh lima indikator yang berada pada taraf interdependen pula. Pengaruh terbesar dari kelima indikator dalam subdimensi penganggaran diberikan oleh Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAB Desa, dengan skor 2.86. pengaruh terbesar kedua diberikan oleh indikator Keterlibatan BPD dan Elemen Masyarakat dalam Pembahasan RAPB Desa, dengan skor 2.76.

1.4 Sub-dimensi Pelaksanaan

Subdimensi Pelaksanaan dalam dimensi pemerintah desa berada pada taraf interdependen, dengan skor 2,71. Berdasarkan 25 indikator yang dilihat dalam subdimensi ini, terdapat variasi kondisi yang telah tercapai, yaitu antar independen dan interdependen.

Pada taraf interdependen, pencapaian subdimensi pelaksanaan iniditopang oleh indikator Keberfungsian Pemdes dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana dasar, dengan skor 2.90. Indikator yang memberikan pengaruh terbesar kedua adalah tentang Ketersediaan (prakarsa) pembangunan sarana dan prasarana dasar dan indikator Sumber keuangan sarana dan prasarana desa. Masing-masing indikator ini memiliki skor 2.86. Di sisi lain, subdimensi ini masih memiliki indikator-indikator yang berada pada taraf independen. Indikator yang memberikan pengaruh terendah adalah Keberterimaan dan keberfungsian

terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan skor 2,14. kemudian indikator terendah berikutnya adalah Keberterimaan dan keberfungsian terhadap pengembangan ekonomi lokal, skor dengan 2,24.

1.5 Sub-dimensi Pengawasan dan evaluasi

Subdimensi pengawasan dan evaluasi di Desa Seling berada pada kondisi interdependen dengan skor 2,48. Pencapaian kondisi ini didukung oleh indikator-indikator yang bervariasi antara independen dan interdependen. Pengaruh terbesar diberikan oleh indikator Pemerintah Desa Melakukan Pemantauan dan Evaluasi serta intensitasnya, dengan skor 2,76. diikuti oleh indikator lain, yaitu Ketersediaan Ruang untuk Melakukan Pengaduan 2,38. Sementara itu, satu dari ketiga indikator yang menopang Subdimensi Pengawasan Dan Evaluasi ini berada pada taraf independen, yaitu indikator BPD melakukan evaluasi dan pemantauan serta intensitasnya, dengan skor 2,31.

1.6 Sub-dimensi Pertanggungjawaban.

Sementara itu, pada subdimensi Pertanggungjawaban, kondisi di desa ini sudah mencapai taraf interdependen, dengan skor 2,53. Dukungan tiga indikator dalam subdimensi ini pun bervariasi antara yang dependen dan interdependen. Dukungan terbesar dalam ketiga indikator ini ditunjukkan oleh indikator Aksesibilitas Masyarakat terhadap Informasi Laporan Pertanggungjawaban, dengan skor 2,66 dan diikuti oleh indikator Kepemilikan Laporan Pertanggungjawaban dan Proses Penyampaian, dengan skor 2,59. Sementara itu, indikator lainnya yang berpengaruh terkecil masuk dalam taraf dependen, yaitu Publikasi Laporan Pertanggungjawaban, dengan skor 2,34.

2. Dimensi Kelembagaan Sosial

Kekuatan pendorong tingkat kemandirian di Desa Seling lainnya adalah dimensi kelembagaan sosial. Dimensi ini berada pada taraf interdependen, dengan skor 2,68. Pengukuran dimensi kelembagaan social ini ditopang oleh empat subdimensi, yaitu subdimensi keaktifan warga, subdimensi tingkat organisasi, subdimensi nilai-nilai, dan subdimensi dampak. Hasil pengukuran masing-masing subdimensi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Sumber: Data Peneliti, 2015

Hasil pengukuran dari masing-masing sub-dimensi dapat dilihat sebagai berikut:

2.1 Sub-dimensi Keaktifan Warga

Subdimensi keaktifan warga desa ini menunjukkan taraf interdependen, dengan skor 2,78. Kondisi tersebut ditopang oleh enam indikator yang berada pada taraf interdependen. Dua indikator yang paling berpengaruh terhadap subdimensi keaktifan warga ini adalah indikator keaktifan sosial warga dan indikator Keterlibatan Warga Dalam bidang social. masing-masing mendapatskor 2,90. Kemudian indikator yang berpengaruh besar adalah indikator Keterlibatan dalam bidang politik, dengan skor 2,86.

2.2 Sub-dimensi Tingkat Organisasi

Subdimensi tingkat organisasi desa ini menunjukkan taraf interdependen, dengan skor 2,65. Indikator-indikator yang menopang subdimensi ini pun berada dalam taraf interdependen. Indikator yang memberikan pengaruh terbesar adalah indikator Kerja sama dengan skor 2, 72. Diikuti oleh indikator Praktek evaluasi internal dengan skor 2,69.

2.3 Sub-dimensi Nilai-Nilai

Subdimensi Nilai-nilai di Desa Seling berada pada tataran interdependen, dengan skor 2,71. Indikator yang berpengaruh pada subdimensi ini ada dua hal dan keduanya berada pada taraf interdependen. Kedua indicator tersebut adalah jaringan praktik dan promosi nilai, memiliki skor 2,79, dan indicator praktik nilai oleh lembaga social, yang memiliki skor 2,62.

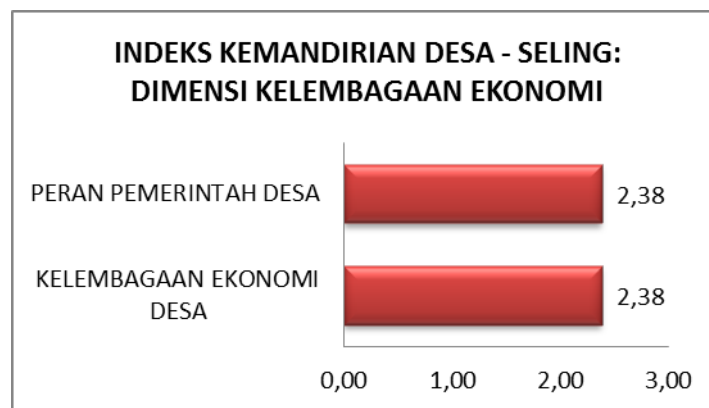
2.4 Sub-dimensi Dampak

Subdimensi lain yang menjadi penopang dimensi kelembagaan sosial adalah subdimensi dampak. Berdasarkan pengukuran di Desa Seling, subdimensi ini berada pada posisi interdependen, dengan skor 2,60. Pencapaian subdimensi tersebut dipengaruhi oleh tiga indikator, yang masuk dalam taraf interdependen pula.

Pengukuran masyarakat menunjukkan bahwa indikator yang paling berpengaruh adalah tingkat kepercayaan publik terhadap dimensi kelembagaan social, dengan skor yang diperoleh adalah 2,72. Kemudian diikuti oleh indikator dampak kebijakan yang mendapat skor 2,55. Terakhir adalah indikator Dampak sosial, dengan skor 2,52.

3. Dimensi Kelembagaan Ekonomi

Berdasarkan pengukuran kemandirian desa, dimensi kelembagaan ekonomi di Desa Seling menunjukkan kondisi terendah dibanding dengan dimensi-dimensi pendukung kemandirian desa lainnya. Namun demikian, dimensi kelembagaan ini sebenarnya sudah mencapai taraf interdependen, dengan skor 2,38. Pencapaian taraf dimensi kelembagaan ekonomi ini ditopang oleh dua subdimensi, yaitu subdimensi kelembagaan ekonomi desa dan subdimensi Peran Pemerintah Desa. Masing-masing subdimensi tersebut memiliki skor 2,38. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Sumber: Data Peneliti, 2015

3.1 Subdimensi Kelembagaan Ekonomi Desa

Subdimensi Kelembagaan Ekonomi Desa Seling berada pada taraf interdependen, dengan skor 2,38. Pencapaian taraf ini didukung oleh empat indikator. Berdasarkan empat indikator pengukuran tingkat kemandiriannya, dua indikator masuk ke dalam taraf interdependen dan dua indikator lainnya masuk dalam taraf independen. Pengaruh terbesar pencapaian taraf subdimensi ini berada pada indikator Management/Pengelolaan Kelembagaan Ekonomi, dengan skor 2,52. Diikuti dengan indikator Ketersediaan Kelembagaan ekonomi desa, dengan skor 2,48. Sementara itu, pengaruh terendah diberikan oleh indikator Akumulasi Modal, dengan skor 2,21. Diiukti dengan indikator Peran Kelembagaan Ekonomi Desa, dengan skor 2,31.

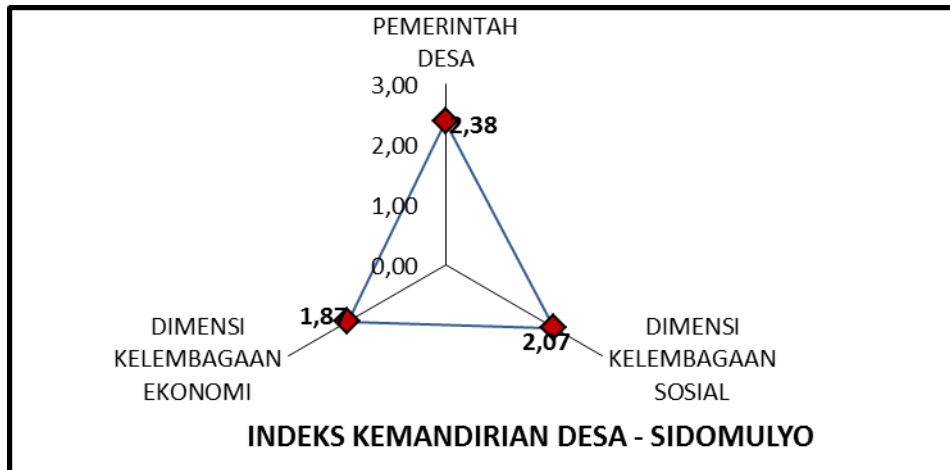
4.7.8 Analisis Indeks Kemandirian Desa Sidomulyo

Pengukuran Indeks Kemandirian Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kelembagaan pemerintah desa berada dalam kategori interdependen

(2,38), sedangkan kelembagaan sosial (2,07) dan ekonomi (1,87) berada dalam kondisi *independen*. Gambaran mengenai tingkat kemandirian Desa Sidomulyo ini dapat dilihat dalam infografis berikut .

Gambar 4.8

Infografis Indeks Kemandirian Desa Sidomulyo

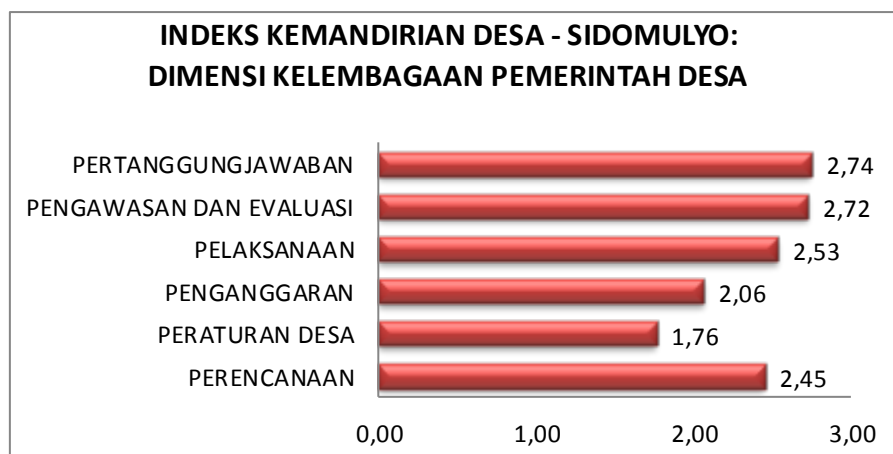


Sumber: Data Peneliti, 2015

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, skor tertinggi terletak pada kelembagaan pemerintah desa, sedangkan skor terendah terletak pada kelembagaan ekonomi.

1. Dimensi Kelembagaan Pemerintah Desa

Pencapaian tingkat kemandirian Desa Sidomulyo dalam kelembagaan pemerintah desa dipengaruhi oleh enam sub dimensi. Dari enam sub dimensi tersebut, pertanggungjawaban adalah sub dimensi yang memiliki skor tertinggi yakni 2,74 (*interdependen*). Skor ini diikuti oleh sub dimensi pengawasan dan evaluasi yang hanya memiliki selisih 0,02 (2,72). Dua sub dimensi lainnya yakni pelaksanaan dan perencanaan berada dalam kategori *interdependen* dengan skor berturut-turut 2,53 dan 2,45. Sementara itu, sub dimensi penganggaran (2,06) dan peraturan desa (1,76) berada dalam kategori *independen*. Berikut grafik yang menggambarkan skor masing-masing sub dimensi dalam kelembagaan pemerintah Desa Sidomulyo.



Sumber: Data Peneliti. 2015

1.1 Sub-Dimensi Perencanaan

Sub-dimensi perencanaan merupakan salah satu sub dimensi yang mendukung dimensi kelembagaan pemerintahan desa untuk mencapai kategori interdependen. Berdasarkan lima indikator dalam sub dimensi perencanaan, indikator pemenuhan (pengakomodasian) kebutuhan program masyarakat dalam perencanaan desa adalah indikator yang paling berpengaruh terhadap sub dimensi perencanaan. Indikator ini terletak dalam kategori interdependen dengan skor 2,90. Kendati demikian, terdapat dua indikator yakni kepemilikan RPJM dan RKP Desa serta pihak yang menyusunnya (2,03) serta keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pembahasan RPJM dan RKP Desa serta bentuk forumnya (2,27) yang tergolong dalam kategori independen.

1.2 Sub-Dimensi Peraturan Desa

Sub-dimensi peraturan desa adalah sub-dimensi yang memiliki skor terendah dibandingkan dengan sub dimensi lainnya. Hal ini disebabkan oleh tiga indikatornya tergolong dalam kategori independen dan dua indikator lainnya tergolong dalam kategori dependen. Indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah Kepemilikan Peraturan Desa Diluar Peraturan Desa mengatur mengenai RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa dan Pihak yang menyusunnya (2,27), sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah Kepemilikan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Sumber Inisiatifnya (1,03).

1.3 Sub-Dimensi Penganggaran

Sub-dimensi penganggaran adalah sub dimensi yang memiliki empat indikator yang tergolong dalam *independen* dan satu indikator yang tergolong dependen. Indikator paling berpengaruh adalah indikator Pemenuhan (Pengakomodasian) Kebutuhan Masyarakat dalam APB Desa (2,50) dan Keterlibatan BPD dan Elemen Masyarakat dalam Pembahasan RAPBD (2,47). Kendati demikian, tingginya skor dua indikator tersebut diperlemah dengan skor indikator Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAB Desa yang hanya mencapai 1,23.

1.4 Sub-Dimensi Pelaksanaan

Sub-dimensi pelaksanaan adalah salah satu sub dimensi yang memperkuat kemandirian kelembagaan pemerintahan Desa Sidomulyo. Secara umum, dari 25 indikator 16 indikator tergolong dalam interdependen, sedangkan delapan indikator yang tergolong dalam independen dan satu indikator tergolong dalam dependen. Dalam sub dimensi pelaksanaan, indikator yang memperkuat adalah keberfungsian pemerintah desa dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana dasar serta ketersediaan (prakarsa) pembangunan sarana dan prasarana dasar. Dua indikator tersebut tergolong dalam kategori interdependen dengan skor 3,00. Kendati demikian, skor sub dimensi pelaksanaan diperlemah oleh indikator sumber keuangan kegiatan pengembangan ekonomi lokal. Indikator ini berada dalam kategori dependen dengan skor 1,67.

1.5 Sub-Dimensi Pengawasan dan Evaluasi

Sub-dimensi pengawasan dan evaluasi memiliki skor tertinggi kedua karena pemerintah desa mampu melakukan pemantauan dan evaluasi. Pada indikator tersebut, Desa Sidomulyo memiliki skor 2,97 (interdependen). Dalam indikator ini, pemerintah desa tidak hanya dilihat mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi, tetapi

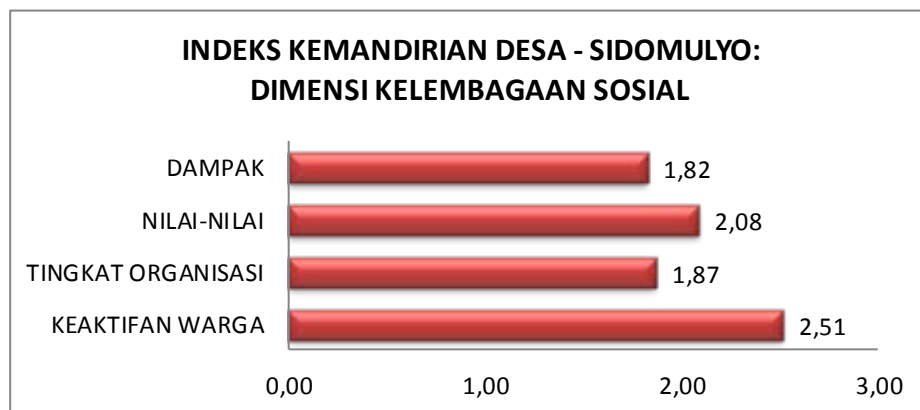
juga intensitasnya. Dua indikator lainnya, yakni ketersediaan ruang untuk melakukan pengaduan (2,70) dan kemampuan BPD dalam melakukan evaluasi dan pemantauan serta intensitasnya (2,50) juga berada dalam kategori interdependen.

1.6 Sub-Dimensi Pertanggungjawaban

Sub-dimensi pertanggungjawaban memiliki skor tertinggi dibandingkan dengan sub dimensi lainnya karena didukung oleh indikator kemampuan pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban dan proses menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada *stakeholders*. Hal ini dilihat dari skor indikator ini yang mencapai 3,0 (interdependen). Sub dimensi ini juga diperkuat oleh indikator aksesibilitas masyarakat terhadap informasi laporan pertanggungjawaban (2,93). Kendati demikian, sub dimensi ini diperlemah oleh indikator publikasi Laporan Pertanggungjawaban. Indikator ini berada dalam kategori independen dengan skor 2,30.

2. Dimensi Kelembagaan Sosial

Selain pemerintahan desa, dimensi kelembagaan sosial juga mempengaruhi kemandirian Desa Sidomulyo. Kelembagaan sosial Desa Sidomulyo memiliki empat subdimensi yang tergolong dalam kategori independen. Berikut grafik yang menggambarkan skor masing-masing sub dimensi dalam kelembagaan sosial.



Sumber: Data Peneliti, 2015

Berdasarkan grafik di atas, sub dimensi keaktifan warga adalah sub dimensi yang memiliki skor tertinggi yakni 2,51 sehingga digolongkan dalam kategori interdependen. Tiga sub dimensi lainnya yakni sub dimensi nilai-nilai, tingkat organisasi, dan dampak juga tergolong dalam kategori independen dengan skor berturut-turut 2,08; 1,87; dan 1,82.

2.1 Sub-dimensi Keaktifan Warga

Skor tertinggi dalam sub-dimensi keaktifan warga dicapai karena kontribusi besar dari indikator keanekaragaman lembaga sosial (3,00) dan aksi kolektif lembaga (2,97). Kendati demikian, dua indikator lainnya yakni keterlibatan dalam bidang politik (2,00) dan keterlibatan politik warga (2,10) berada dalam kategori independen.

2.2 Sub-dimensi Tingkat Organisasi

Sub-dimensi kedua yang mempengaruhi skor dimensi kelembagaan sosial adalah tingkat organisasi. Dari empat indikator, komunikasi adalah indikator yang memiliki skor tertinggi yakni 2,43 (interdependen), sedangkan kecukupan sumber daya memiliki skor terendah yakni 1,07 (dependen). Dua indikator lainnya yakni praktek evaluasi internal dan kerjasama tergolong dalam kategori independen dengan skor berturut-turut sebesar 2,07 dan 1,83.

2.3 Sub-dimensi Nilai-Nilai

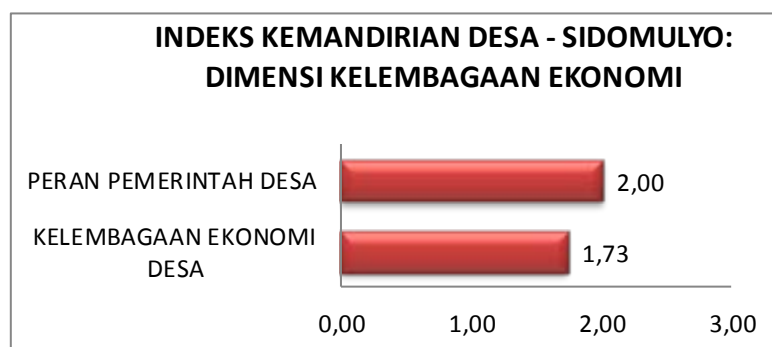
Sub-dimensi nilai-nilai juga mendukung tercapainya skor kelembagaan sosial Desa Sidomulyo. Indikator yang paling mendukung sub dimensi ini adalah jaringan praktik dan promosi nilai. Indikator ini memiliki skor 2,23 sehingga tergolong dalam kategori independen. Kendati demikian, indikator praktik nilai oleh lembaga sosial hanya memiliki skor 1,93 (independen). Hal ini menyebabkan skor keseluruhan sub-dimensi nilai mengalami penurunan.

2.4 Sub-dimensi Dampak

Sub-dimensi kelembagaan sosial yang memiliki skor terendah adalah sub dimensi dampak. Dari tiga indikator sub dimensi dampak, kepercayaan publik adalah indikator yang memiliki skor tertinggi yakni 2,37 (interdependen). Kendati demikian, dua indikator lainnya memiliki kategori yang berbeda sehingga menyebabkan penurunan pada skor keseluruhan. Hal ini dapat dilihat bahwa indikator dampak sosial yang memiliki skor 1,07 (dependen) dan indikator dampak kebijakan yang memiliki skor 2,03 (independen).

3. Dimensi Kelembagaan Ekonomi

Kemandirian Desa Sidomulyo juga dipengaruhi oleh kemandirian kelembagaan ekonomi. Kemandirian kelembagaan ekonomi Desa Sidomulyo didukung oleh sub dimensi kelembagaan ekonomi dan peran pemerintah desa. Berikut grafik 1.3 yang menggambarkan skor masing-masing sub dimensi dalam kelembagaan ekonomi Desa Sidomulyo.



Sumber: Data Peneliti, 2015

3.1 Subdimensi Kelembagaan Ekonomi Desa

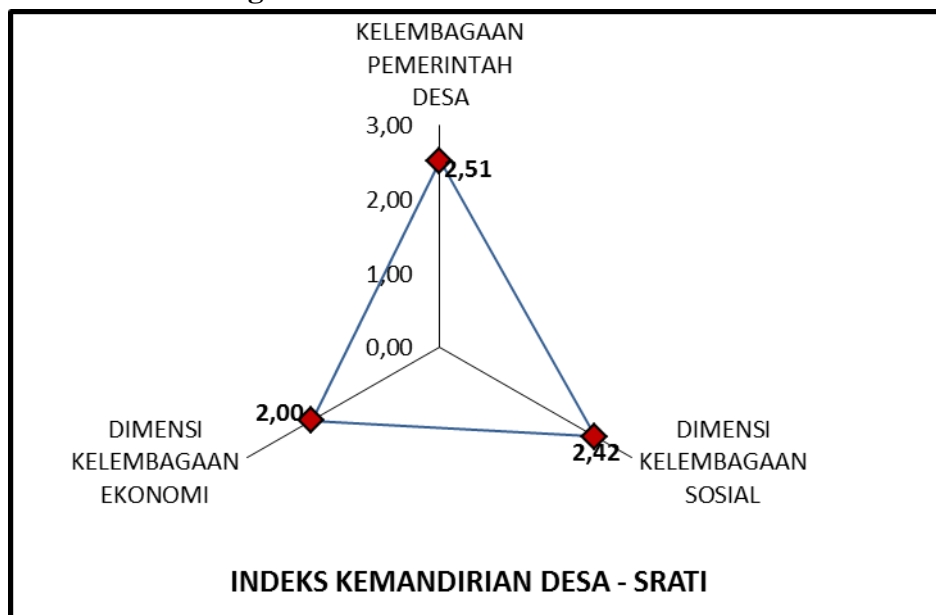
Kemandirian kelembagaan ekonomi dipengaruhi oleh sub dimensi kelembagaan ekonomi desa yang memiliki skor 1,73 (independen). Sub dimensi ini ditopang dengan dua indikator yang tergolong dalam kategori independen yakni peran kelembagaan ekonomi desa (2,07) dan pengelolaan kelembagaan ekonomi (1,97). Sementara itu, sub dimensi akumulasi modal (1,23) dan kelembagaan ekonomi desa (1,67) tergolong dalam kategori dependen.

3.2 Subdimensi Peran Pemerintah Desa

Subdimensi lain yang menopang Dimensi Kelembagaan Ekonomi adalah Peran Pemerintah Desa dalam mendukung kelembagaan ekonomi desa. Pengukuran menunjukkan bahwa subdimensi yang terdiri dari satu indikator yaitu peran pemerintah desa dalam mendukung kelembagaan ekonomi desa. Indikator ini berada pada taraf independen dengan skor 2,00.

4.7.9 Analisis Indeks Kemandirian Desa Sрати

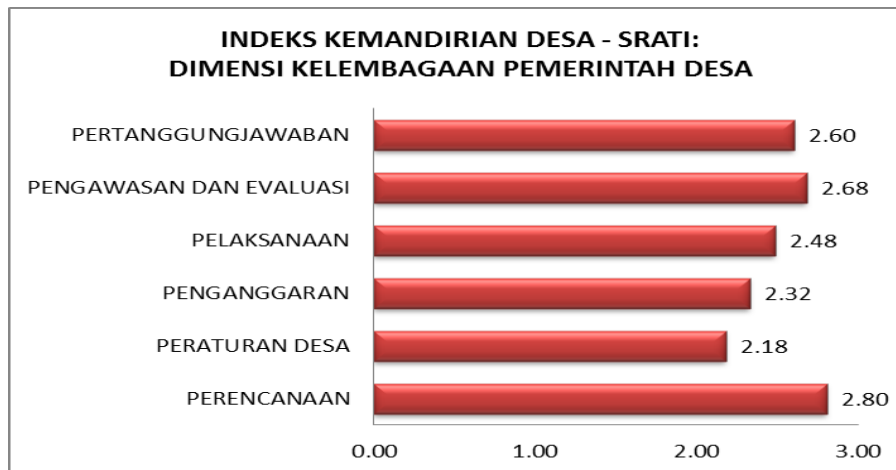
Gambar 4.9
Infografis Indeks Kemandirian Desa Sрати



Sumber: Data Peneliti, 2015

Indeks Kemandirian Desa Sрати, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa nilai tertinggi adalah pada dimensi kelembagaan pemerintah desa dengan skor 2,51 disusul kemudian oleh dimensi kelembagaan sosial yang memperoleh skor 2,42 dimana keduanya berada pada kategori interdependen. Sedangkan nilai terendah diperlihatkan oleh dimensi kelembagaan ekonomi dengan skor 2,00 atau dapat dikatakan bahwa kemandirian desa dilihat dari dimensi kelembagaan ekonomi berada dalam kategori mandiri atau independen.

1. Dimensi Kelembagaan Pemerintah Desa



Sumber: Data Peneliti, 2015

Dimensi kelembagaan pemerintah desa terdiri dari enam subdimensi seperti tertera pada gambar dimensi kelembagaan sosial, yaitu:

1.1. Subdimensi Perencanaan

Subdimensi perencanaan mempunyai nilai tertinggi dengan skor 2,80 atau berada pada kategori interdependen. Tingginya nilai subdimensi ini disumbang oleh indikator kepemilikan RPJM dan RKP serta pihak yang menyusunnya (2,91) serta indikator penggunaan kajian pendahuluan terhadap kondisi objektif dan dokumen perencanaan dalam proses pembuatan RPJM dan RKP Desa (2,91) berada pada kategori interdependen. Sedangkan indikator pemenuhan (pengakomodasian) kebutuhan program masyarakat dalam perencanaan desa (1,59) yang berada dalam status dependen masih menjadi tantangan pada subdimensi perencanaan.

1.2. Subdimensi Peraturan Desa

Berikutnya adalah subdimensi peraturan desa dengan skor 2,18 yang menunjukkan berada pada kategori independen. Nilai pada subdimensi ini disumbang oleh nilai dari indikator keterlibatan BPD dan masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan desa (2,82) serta indikator kepemilikan peraturan desa diluar peraturan desa yang mengatur mengenai RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa dan pihak yang menyusunnya (2,53) berada pada kategori interdependen. Tantangan pada subdimensi peraturan desa adalah nilai indikator pemenuhan (pengakomodasian) kebutuhan masyarakat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa yang mempunyai skor terendah meskipun berada pada kategori independen.

1.3. Subdimensi Penganggaran

Subdimensi ketiga dalam dimensi pemerintah desa, yaitu penganggaran, berada pada kategori independen yang ditunjukkan oleh skor 2,32. Kategori independen ini disumbang paling besar oleh indikator keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAB

Desa (2,62) serta keterlibatan BPD dan masyarakat dalam pembahasan RAPB Desa (2,59) yang menunjukkan kategori interdependen. Nilai indikator penganggaran dan pelaksanaan kegiatan lintas desa masih menjadi tantangan karena memiliki nilai terendah yaitu 1,76 meskipun telah berada pada kategori independen.

1.4. Subdimensi Pelaksanaan

Seterusnya adalah subdimensi pelaksanaan yang mempunyai skor 2,48 atau berada pada kategori interdependen. Terdapat tiga indikator yang mempunyai pengaruh sangat signifikan terhadap subdimensi ini yaitu keberfungsian Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelayanan dasar (2,97), ketersediaan (prakarsa) pembangunan sarana dan prasarana dasar (2,97) serta transparansi penyelenggaraan sarana dan prasarana dasar (2,97) dimana ketiga indikator tersebut berada pada kategori interdependen. Tantangan pada subdimensi ini adalah indikator keberterimaan dan keberfungsian terhadap pengembangan ekonomi lokal (1,67) yang merupakan nilai terendah dan masih berada pada kategori dependen.

1.5. Subdimensi Pengawasan dan Evaluasi

Subdimensi kelima adalah subdimensi pengawasan dan evaluasi yang berada pada kategori interdependen dengan skor 2,68. Tingginya nilai subdimensi ini paling disumbang oleh indikator pemerintah desa melakukan pemantauan dan evaluasi serta intensitasnya yang memiliki nilai tertinggi yaitu 2,71 atau berada pada kategori interdependen. Terpaut tipis adalah sumbangan dari indikator ketersediaan ruang untuk melakukan pengaduan dengan skor 2,68. Sedangkan skor terendah pada subdimensi pengawasan dan evaluasi adalah pada indikator BPD melakukan evaluasi dan pengawasan serta intensitasnya yang ditunjukkan oleh skor 2,65 meskipun tetap pada kategori interdependen.

1.6. Subdimensi Pertanggungjawaban

Subdimensi terakhir dari dimensi pemerintah desa adalah pertanggungjawaban yang ditunjukkan dengan skor 2,60 atau berada pada kategori interdependen. Kontribusi paling signifikan yang menyumbang tingginya nilai subdimensi pertanggungjawaban adalah indikator publikasi laporan pertanggungjawaban (2,68) yang menunjukkan kategori interdependen. Sumbangan positif juga diperlihatkan melalui skor indikator kepemilikan LPJ dan proses penyampaian (2,62) yang masih tetap berada pada kategori interdependen. Indikator lainnya yaitu aksesibilitas masyarakat terhadap informasi LPJ (2,50) memiliki skor terendah meskipun berada pada kategori interdependen.

2. Dimensi Kelembagaan Sosial



Sumber: Data Peneliti, 2015

Dimensi kelembagaan sosial menyoroti empat subdimensi yaitu:

2.1. Subdimensi Keaktifan Warga

Nilai pada dimensi kelembagaan sosial ditunjukkan dengan skor 2,42 atau dalam kategori interdependen, artinya sudah mulai muncul inisiatif-inisiatif untuk berelasi atau bekerjasama dengan warga di lingkup luar desanya. Subdimensi keaktifan warga mempunyai nilai tertinggi yaitu 2,82 atau berada pada kategori interdependen. Indikator yang menyumbang tingginya nilai subdimensi ini adalah keterlibatan (lembaga sosial) dalam bidang politik atau ruang-ruang pengambilan keputusan yang memiliki skor tertinggi yaitu 3,00 atau berada pada kategori interdependen. Indikator lain yang memberi sumbangan secara signifikan adalah indikator keterlibatan sosial warga dengan skor 2,97 yang juga berada pada kategori interdependen. Meskipun masih dalam kategori yang sama, indikator keterlibatan warga (individu) dalam politik atau ruang-ruang pengambilan keputusan (2,50) menjadi tantangan pada dimensi ini karena memiliki skor terendah.

2.2. Subdimensi Tingkat Organisasi

Subdimensi kedua adalah tingkat organisasi yang ditunjukkan dengan skor 2,39 atau berada pada kategori interdependen. Indikator yang menyumbang tingginya nilai subdimensi ini adalah indikator kerja sama (2,79) dan indikator komunikasi (2,62) dimana keduanya berada pada kategori interdependen. Tantangan pada subdimensi ini adalah pada indikator kecukupan sumber daya yang memiliki nilai terendah yaitu 2,06 meskipun sudah berada pada kategori independen.

2.3. Subdimensi Nilai-nilai

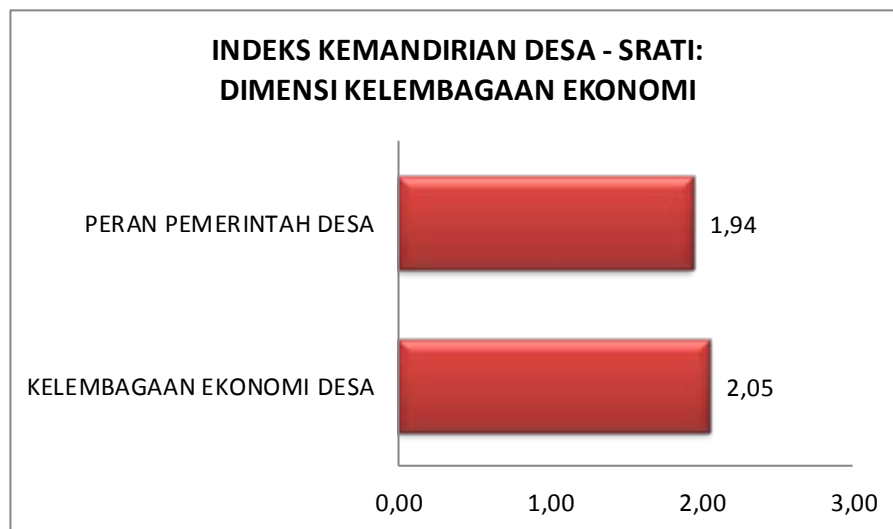
Subdimensi ketiga adalah nilai-nilai yang mempunyai skor terendah dibandingkan subdimensi lainnya yaitu 2,19 atau berada pada kategori independen. Situasi demikian pada subdimensi nilai-nilai paling banyak disumbang oleh dua indikator pada

subdimensi ini yaitu jaringan praktik dan promosi nilai (2,35) yang berada pada kategori interdependen serta indikator praktik nilai oleh lembaga sosial, dengan skor yang lebih rendah yaitu 2,03 yang berada pada kategori independen.

2.4. Subdimensi Dampak

Subdimensi terakhir pada dimensi kelembagaan sosial adalah subdimensi dampak yang memotret hasil dari kerja yang dilakukan oleh aktor-aktor lembaga sosial, yang ditunjukkan dengan skor 2,28 atau berada pada kategori independen. Nilai yang ditunjukkan pada dimensi dampak disumbang oleh tiga indikator yaitu kepercayaan publik (2,32) serta, dengan skor yang sedikit lebih rendah, indikator dampak sosial dan indikator dampak kebijakan masing-masing dengan skor 2,26. Ketiga indikator tersebut berada pada kategori independen.

3. Kelembagaan Ekonomi



Sumber: Data Peneliti, 2015

Nilai dimensi kelembagaan ekonomi desa ditunjukkan dengan skor 2,00 atau berada pada kategori independen. Dibandingkan dengan nilai dimensi kelembagaan pemerintah desa dan dimensi kelembagaan sosial, maka dimensi ini memiliki skor terendah. Situasi ini dikontribusi oleh nilai dari dua subdimensi didalamnya yaitu subdimensi kelembagaan ekonomi desa dan subdimensi peran pemerintah desa yang juga berada pada kategori independen.

Dimensi kelembagaan ekonomi menyoroti dua subdimensi yaitu:

3.1 Subdimensi Kelembagaan Ekonomi

Nilai subdimensi kelembagaan ekonomi paling besar disumbang oleh indikator kelembagaan ekonomi desa yang ditunjukkan dengan skor 2,41 atau berada pada kategori interdependen. Indikator lain yang juga mempunyai kontribusi signifikan terhadap subdimensi ini adalah indikator peran kelembagaan ekonomi desa dengan skor 2,18 atau berada pada kategori independen. Sedangkan indikator yang masih menjadi tantangan

adalah indikator akumulasi modal (ukuran untuk melihat proses usaha, tidak hanya diukur dalam peningkatan skala usaha atau kesejahteraan pelaku usaha) yang memiliki skor terendah dalam subdimensi ini yaitu 1,53 atau masih berada pada kategori dependen.

3.2 Subdimensi Peran Pemerintah Desa

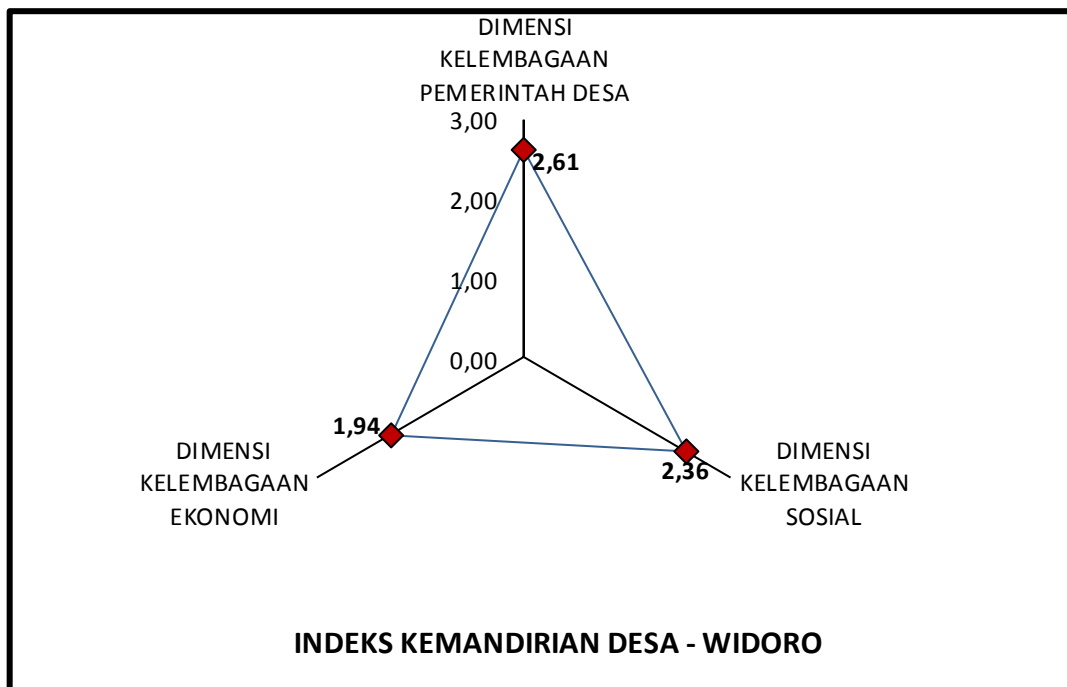
Subdimensi lain yang menopang Dimensi Kelembagaan Ekonomi adalah Peran Pemerintah Desa dalam mendukung kelembagaan ekonomi desa. Pengukuran menunjukkan bahwa subdimensi yang terdiri dari satu indikator ini berada pada kategori independen dengan skor 1,94.

4.10 Analisis Indeks Kemandirian Desa Widoro

Hasil pengukuran indeks kemandirian desa di desa Widoro dari tiga dimensi kelembagaan yaitu pemerintah desa, sosial dan ekonomi telah menunjukkan kelembagaan pemerintah desa berada pada skor paling tinggi yaitu 2,61 melihat skor tersebut kelembagaan pemerintah desa Widoro masuk dalam status interdependen, demikian halnya dengan kelembagaan sosial yang memiliki skor 2,36 masuk dalam status interdependen. Sementara untuk kelembagaan ekonomi memiliki skor 1,94 yang berarti status independen. Gambaran dimensi kelembagaan di desa Pesuruhan sebagaimana infografis dibawah

Gambar 4.10

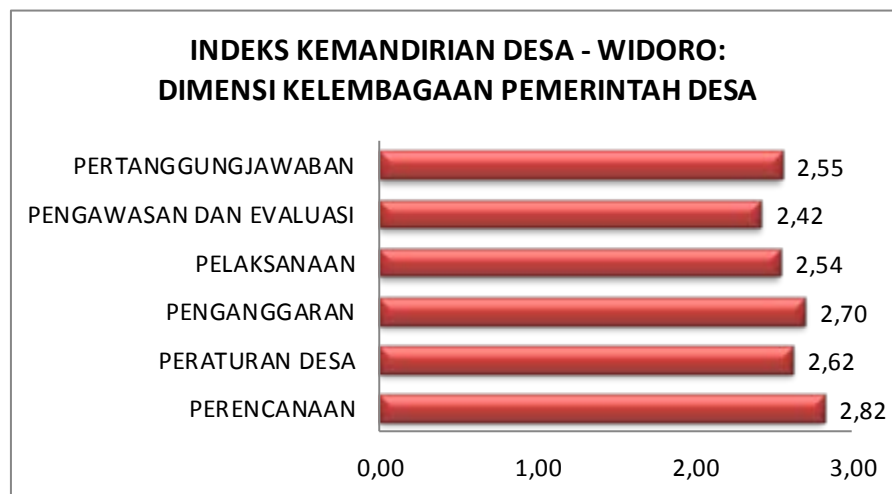
Infografis Dimensi Kelembagaan Desa Widoro



Sumber: Data Peneliti, 2015

1. Dimensi Kelembagaan Pemerintah Desa

Skor yang dimiliki dimensi kelembagaan pemerintah desa disumbang oleh sub dimensi yang ada didalamnya, dimana sub dimensi perencanaan memiliki skor tertinggi dari sub dimensi lainnya yaitu sebesar 2,82, kemudian disusul sub dimensi penganggaran dengan skor 2,70 dan sub dimensi peraturan desa 2,62 sementara sub dimensi pertanggungjawaban memiliki skor 2,55, disusul sub dimensi pelaksanaan dengan skor 2,54 dan skor terendah adalah sub dimensi pengawasan dan evaluasi dengan skor 2,42. Dari keseluruhan skor yang dimiliki sub dimensi pada pemerintahan desa berdasarkan rentang status yang ditetapkan masuk dalam status interdependen. Secara umum grafik yang menunjukkan skor tersebut sebagaimana gambar dibawah.



Sumber: Data Peneliti, 2015

Dimensi pemerintah desa memiliki enam sub dimensi yang menjadi alat ukur dari kemandirian desa

1.1. Sub-dimensi Perencanaan

Pada subdimensi perencanaan desa Widoro memiliki skor 2,82 atau masuk status interdependen, hal ini merupakan kontribusi dari lima indikator yang ada didalamnya. Skor tertinggi dimiliki oleh Keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pembahasan RPJM dan RKP Desa serta bentuk forumnya dengan skor 2,94, disusul dengan indikator perencanaan pembangunan lintas desa dengan skor 2,90 dan indikator Pemenuhan (pengakomodasian) kebutuhan program masyarakat dalam perencanaan desa dengan skor 2,84. kemudian indikator Kepemilikan RPJM dan RKP Desa serta pihak yang menyusunnya dengan skor 2,77, dan yang terendah adalah indikator 2,65. Dari total skor yang dimiliki oleh masing-masing indikator sub dimensi perencanaan telah menunjukkan perencanaan desa Widoro berstatus interdependen.

1.2. Sub-dimensi Peraturan Desa

Sub dimensi pada peraturan desa memiliki skor 2,62 dengan status interdependen, kondisi ini disumbang oleh lima indikator, yang tertinggi indikator Keterlibatan BPD dan Masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan desa dengan skor 2,84 dan disusul indikator Pemenuhan (Pengakomodasian) Peraturan Desa terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan dasar, infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi dan indikator Pemenuhan (Pengakomodasian) Kebutuhan Masyarakat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dengan masing-masing skor 2,65. Kemudian disusul oleh indikator Kepemilikan Peraturan Desa Diluar Peraturan Desa mengatur mengenai RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa dan Pihak yang menyusunnya dengan skor 2,61 dan yang terendah indikator Kepemilikan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Sumber Inisiatifnya dengan skor yang dimiliki 2,35. Dari skor indikator yang ada, telah berkontribusi pada sub dimensi peraturan desa pada status interdependen

1.3. Sub-dimensi Penganggaran

Pada sub dimensi penganggaran memiliki skor 2,70 artinya memiliki status interdependen. Kondisi tersebut disumbang oleh beberapa 5 indikator yang telah ditetapkan. Indikator yang memiliki skor tertinggi adalah kepemilikan APB Desa dan pihak yang membuatnya dan pemenuhan (pengakomodasian) kebutuhan masyarakat dalam APB Desa, keduanya memiliki skor yang sama yaitu 2,81. Selanjutnya disusul oleh indikator penganggaran dan pelaksanaan lintas desa dengan skor 2,74, kemudian indikator keterlibatan BPD dan elemen masyarakat dalam pembahasan RAPDB dengan skor 2,71 dan yang terendah adalah indikator keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAPB Desa dengan skor 2,42. dari masing-masing skor indikator ini, seluruhnya masuk dalam status interdependen.

1.4. Sub-dimensi Pelaksanaan

Pada bagian sub dimensi pelaksanaan, desa Widoro memiliki skor 2,54 dengan status interdependen, jika melihat indikator-indikator yang ada sub dimensi penganggaran memiliki indikator yang menunjukkan tiga status kemandirian, dimana dari 25 indikator yang ada dalam sub dimensi pelaksanaan 21 indikator menunjukkan status interdependen dengan indikator tertingginya adalah Keberfungsian Pemdes dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan skor 3,00, 4 indikator menunjukkan status independen. Status dependen dimiliki oleh indikator Keberterimaan dan keberfungsian sarana dan prasarana dasar dan indikator evaluasi penyelenggaraan pengembangan ekonomi lokal dengan skor yang sama yaitu 2,29 sementara indikator Keberterimaan dan keberfungsian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki skor 2,23 dan terendah Sumber keuangan pemberdayaan masyarakat dengan skor 2,10.

1.5. Sub-dimensi Pengawasan dan Evaluasi

Skor pada sub dimensi ini menunjukkan angka 2,42 atau memiliki status interdependen, kondisi ini disumbang oleh tiga indikator didalamnya yang memiliki rentang skor yang menunjukkan status interdependen, yaitu skor tertinggi dimiliki oleh indikator BPD melakukan evaluasi dan pemantauan serta intensitasnya dengan skor 2,71, disusul oleh indikator 2,58. Dua indikator tersebut masuk dalam status interdependen dan indikator

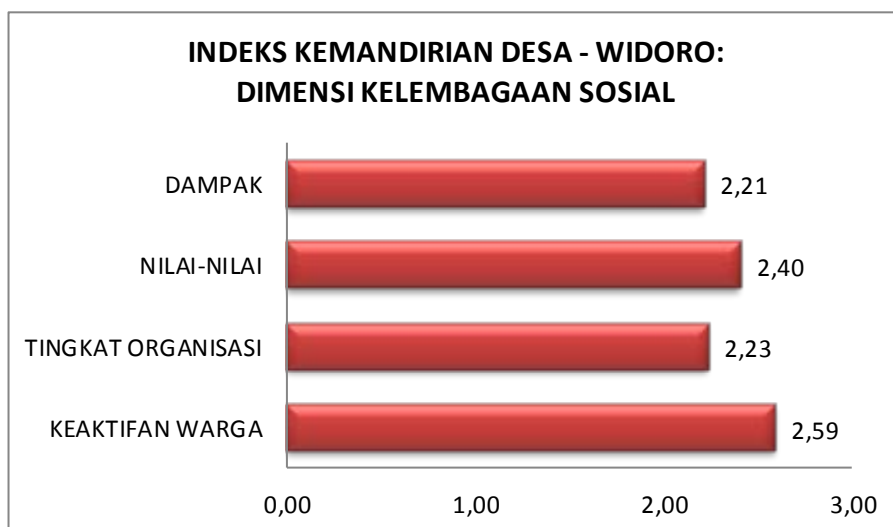
yang memiliki skor rendah yaitu ketersediaan ruang untuk melakukan pengaduan dengan 1.97 artinya memiliki status independen.

1.6. Sub-dimensi Pertanggungjawaban

Sub dimensi ini memiliki skor 2,55, skor tersebut merupakan kontribusi dari tiga indikator yang ada. Skor tertinggi disumbang oleh indikator kepemilikan laporan pertanggungjawaban dan proses penyampaian 2,68 , disusul indikator publikasi laporan pertanggungjawaban 2,52 dan terendah disumbang oleh indikator aksesibilitas masyarakat terhadap informasi laporan dengan skor 2,45.

2. Dimensi Kelembagaan Sosial

Dimensi ini secara keseluruhan menunjukkan skor 2,36, artinya jika merujuk ke rentang nilai yang sudah ditetapkan maka dimensi kelembagaan sosial berada pada status interdependen. Kondisi ini disumbang oleh sub dimensi kelembagaan sosial yang memiliki empat sub dimensi, dimana sub dimensi yang mendapatkan skor tertinggi adalah keaktifan warga dengan skor 2,59, kemudian disusul oleh sub dimensi nilai-nilai dengan skor 2,40, dua sub dimensi ini masuk dalam status interdependen sementara sub dimensi tingkat organisasi dengan skor 2,23 dan skor terendah 2,21 dimiliki oleh sub dimensi dampak, dua dimensi ini masuk dalam independen. Secara umum grafik yang menunjukkan skor tersebut sebagaimana gambar dibawah.



Sumber: Data Peneliti, 2015

2.1. Sub-dimensi Keaktifan Warga

Sub dimensi ini memiliki skor 2,59, skor ini masuk dalam status interdependen. Indikator yang memberikan kontribusi pada sub dimensi yang memiliki skor tertinggi adalah indikator keanekaragaman lembaga sosial dengan skor 2,77, kemudian disusul oleh indikator keterlibatan sosial warga dan keterlibatan dalam bidang sosial dengan skor yang sama yaitu 2,68. Disusul oleh indikator keterlibatan dalam bidang polutik dengan skor 2,53 dan indikator aksi kolektif dengan skor 2,43 dan indikator

keterlibatan politik warga dengan skor 2,42. Dari seluruh skor indikator pada dimensi ini telah mengantar pada status interdependen.

2.2. Sub-dimensi Tingkat Organisasi

Sub dimensi tingkat organisasi memiliki empat indikator yang menyumbang terhadap skor rata-rata pada sub dimensi ini. Indikator yang paling tertinggi oleh indikator praktek evaluasi internal dan indikator kerjasama dengan masing-masing skor 2,27, kemudian disusul oleh indikator komunikasi dengan skor 2,20 dan terendah indikator kecukupan sumber daya dengan skor 1,90. Skor dalam indikator ini masuk dalam status independen.

2.3. Sub-dimensi Nilai-nilai

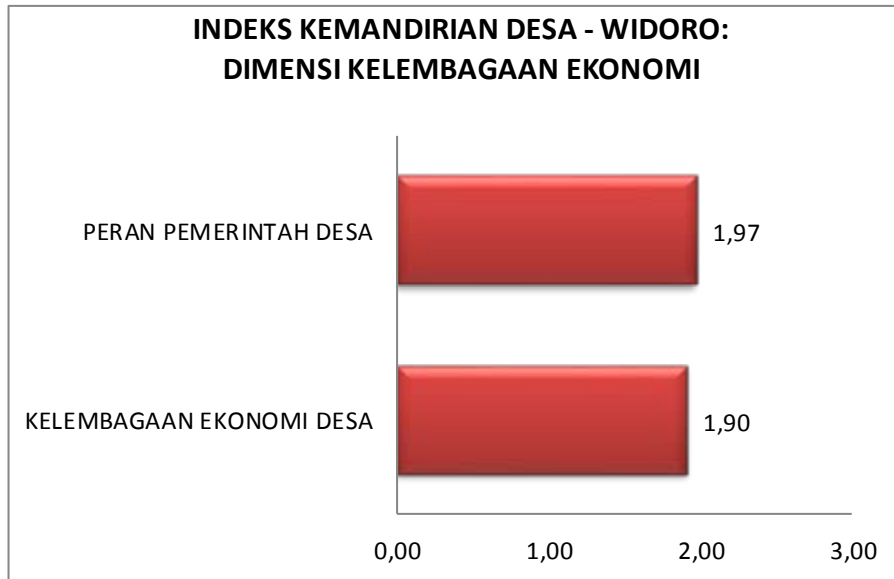
Sub dimensi nilai-nilai organisasi memiliki skor 2,40 masuk dalam status interdependen, kondisi ini disumbang oleh dua indikator. Dimana indikator yang tertinggi disumbang oleh praktek nilai oleh lembaga sosial dengan skor 2,58 jika dmengacu pada rentang status maka masuk dalam status interdependen. Kemudian disusul skor terendah yaitu 2,29 yang dimiliki oleh indikator jaringan praktik dan promosi nilai.

2.4. Sub-dimensi Dampak

Pada sub dimensi ini, menunjukkan status independen dengan skor 2,21 yang disumbang oleh tiga indikator di dalamnya. Skor tertinggi dimiliki oleh indikator kepercayaan publik dengan skor 2,47 yang artinya masuk dalam status interdependen, kemudian disusul skor 2,10 yang dimiliki oleh indikator dampak kebijakan dan skor 2,06 yang dimiliki oleh indikator dampak sosial, kedua indikator terakhir ini masuk dalam rentang status independen.

3. Dimensi Kelembagaan Ekonomi

Dimensi kelembagaan ekonomi desa pesuruhan masuk dalam kategori status independen dengan skor rata-rata yang dimiliki 1,94, kondisi ini merupakan kontribusi dari dua indikator yang ada. Indikator yang tertinggi memiliki skor 1,97 yaitu indikator peran pemerintahan desa dan skor terendah dimiliki oleh indikator kelembagaan ekonomi desa dengan skor 1,90. Secara umum grafik yang menunjukkan skor tersebut sebagaimana gambar dibawah.



Sumber: Data Peneliti, 2015

3.1. Sub-dimensi Kelembagaan Ekonomi

Sub dimensi kelembagaan ekonomi desa memiliki empat indikator yang menjadi penilaian dan menyumbang pada sub dimensi ini. Indikator tertinggi dimiliki oleh indikator manajemen/pengelolaan kelembagaan ekonomi dengan skor 2,23, disusul kemudian oleh indikator peran kelembagaan ekonomi dengan skor 1,90 dan kemudian disusul dengan skor 1,87 milik indikator kelembagaan ekonomi desa dan terendah skor 1,61 indikator akumulasi modal. Skor dari indikator ini menunjukkan status independen.

3.2. Sub-dimensi Peran Pemerintah Desa

Pada sub dimensi peran pemerintahan desa memiliki satu indikator yang menentukan nilai dalam sub dimensi ini, indikator yang dimaksud adalah peran pemerintah desa dalam mendukung kelembagaan ekonomi desa memiliki skor 1,97, jika melihat rentang status masuk dalam status independen.

BAB 5

PENUTUP

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Bagi pemerintah pusat dan kabupaten, penelitian ini dapat memberikan data awal (*baseline*) mengenai kondisi 10 desa di Kebumen. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam mengetahui kondisi kemandirian desanya sehingga diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kemandiriannya.

Penelitian ini fokus pada kemandirian desa yang ditinjau dalam kelembagaan pemerintah desa, kelembagaan sosial, dan kelembagaan ekonomi sehingga ada beberapa hal yang tidak *ter-capture*. Oleh karena itu, hasil penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan sehingga instrumen pengukuran kemandirian desa yang dirumuskan dapat lebih komprehensif.

Alamat : Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302

Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id